

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberdayakan arsip dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien serta tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bukti akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja organisasi dan aparatur lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar, perlu mengatur Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten Banjar;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip, dan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, klasifikasi arsip di atur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Arsip adalah arsip daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar.
5. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
6. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
9. Klasifikasi Arsip adalah pengelompokkkan dokumen atau arsip menurut permasalahan dari seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh instansi atau unit kerja dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya dari suatu organisasi akan terdapat sejumlah proses kegiatan.
10. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip.
11. Arsip Fasilitatif adalah arsip pendukung yang mencerminkan tugas dan fungsi pendukung instansi.
12. Arsip Substantif adalah merupakan arsip pokok yang mencerminkan tugas dan fungsi utama instansi.

BAB II
KLASIFIKASI ARSIP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Klasifikasi Arsip yang diatur dalam peraturan Bupati ini meliputi :

a. Klasifikasi Arsip Fasilitatif, terdiri dari sebagai berikut :
    1. Fungsi Keuangan;
    2. Fungsi Kepegawaian;
    3. Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian.

b. Klasifikasi Arsip Substantif, terdiri dari sebagai berikut:

1. Urusan Pertanian;
2. Urusan Perdagangan;
3. Urusan Perhubungan;
4. Urusan Perikanan;
5. Urusan Penanaman Modal;
6. Urusan Lingkungan Hidup;
7. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
8. Urusan Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik;
9. Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
10. Urusan Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya;
11. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB);
13. Urusan Perencanaan Pembangunan;
14. Urusan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan;
15. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan;
16. Urusan Pariwisata;
17. Urusan Sosial;
18. Urusan Kesehatan;
19. Urusan Pendidikan dan Pelatihan;
20. Urusan Kepemudaan dan Olahraga;
21. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
22. Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
23. Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB III
TATA CARA KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 3

(1) Tata cara klasifikasi merupakan hasil analisis fungsi dalam menyusun skema Klasifikasi Arsip yang terdiri dari jenjang fungsi yang disusun secara sistematis dan logis dari pengertian yang luas ke pengertian yang bersifat spesifik dan teknis.

(2) Pengklasifikasi dilakukan berjenjang yakni terdiri dari beberapa kegiatan dan masing-masing kegiatan terdiri dari beberapa transaksi Arsip seperti jenjang pertama adalah nama fungsi (primer), jenjang kedua nama kegiatan (sekunder), dan jenjang ketiga nama transaksi (tersier).

Pasal 4

Skema Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut secara detail dan lengkap kerangka induk klasifikasi menjadi bentuk yang berjenjang yakni terdiri dari beberapa kegiatan dan masing-masing kegiatan terdiri dari beberapa transaksi seperti nomor urut, kode klasifikasi, judul pokok masalah, sub masalah dan sub-sub masalah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 20 Mei 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 20 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 23

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 23 TAHUN 2021
TANGGAL : 20 MEI 2021

A. KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR

No.	Kode Klasifikasi			Jenis Dokumen/Arsip
	P	S	T	
1	*2*			*3*
I.				FUNGSI KEUANGAN
	KU			KEUANGAN
1.	KU.00			A. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P)
	KU.00.00			1. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) a. Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra – Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja) b. Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemda c. KUA beserta Nota Kesepakatannya d. Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) e. Nota Kesepakatan PPA f. Prioritas Plafon Anggaran
	KU.00.01			2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) a. Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah b. Dokumen RKA-SKPD
	KU.00.02			3. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD: – Nota Keuangan Pemerintah – Materi RAPBD b. Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah c. Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD d. Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta Lampirannya e. Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD beserta penjabarannya f. Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD g. Penetapan Perda APBD oleh Gubernur beserta Penjabarannya h. Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD
	KU.00.03			4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) a. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan 1) Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra Perubahan – Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja) 2) Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah

		3) KUA Perubahan beserta Nota Kesepakatan 4) Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 5) Nota Kesepakatan PPA Perubahan 6) Prioritas Plafon Anggaran Perubahan b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan 1) Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah 2) Dokumen RKA-SKPD Perubahan c. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 1) Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Perubahan: – Nota Keuangan Pemerintah – Materi RAPBD 2) Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah 3) Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD Perubahan 4) Dokumen Rancangan Penjabaran APBD Perubahan beserta lampirannya 5) Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD Perubahan beserta penjabarannya 6) Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD Perubahan 7) Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Gubernur beserta Penjabarannya 8) Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Perubahan
2.	KU.01 KU.01.00 KU.01.01 KU.01.02 KU.01.03	B. PENYUSUNAN ANGGARAN 1. Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan 2. Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten/Kota 3. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
3.	KU.02 KU.02.00 KU.02.01	C. PELAKSANAAN ANGGARAN 1. Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS 2. Pendapatan a. Pendapatan Asli Daerah 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah 2) Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah, antara lain: – Pajak Restoran – Pajak Hiburan – Pajak Reklame – Pajak Penerangan Jalan – Pajak Mineral Bukan Logam Bantuan – Pajak Parkir – Pajak Air Tanah – Pajak Sarang Burung Walet – PBB Sektor Perdesaan dan perkotaan – Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) 3) Surat Ketetapan Retribusi Daerah 4) Bukti Pembayaran Retribusi, antara lain: a. Retribusi Jasa Umum – Retribusi Pelayanan Kesehatan

		– Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil – Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat – Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – Retribusi Pelayanan Pasar – Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta – Retribusi Pengujian Kapal Perikanan b. Retribusi Jasa Usaha – Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – Retribusi Tempat Pelelangan – Retribusi Terminal – Retribusi Tempat Khusus Parkir – Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa – Retribusi Penyedotan Kakus – Retribusi Rumah Potongan Hewan – Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal – Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga – Retribusi Penyebrangan di Atas Air – Retribusi Pengolahan Limbah Cair – Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah c. Retribusi Perizinan Tertentu – Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – Retribusi Izin Gangguan – Retribusi Izin Trayek d. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas e. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 5) Bukti Penerimaan Jasa Layanan kesehatan Masyarakat 6) Dokumen Rasionalitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 7) Bukti Penerimaan SKPD dari Badan Layanan Umum 8) Bukti Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 9) Bukti Penerimaan Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank b. Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan 1) Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak & Bukan Pajak 2) Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten 3) Dana Alokasi Umum (DAU) 4) Dana Perimbangan untuk Daerah Yang Tidak Menerima DAU 5) Dana Alokasi Khusus (DAK) c. Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah 1) Alokasi Dana Penyesuaian 2) Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah 3) Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi 4) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi 5) Penerimaan Hibah Yang Bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah lainnya atau Sumbangan Pihak Ketiga d. Surat setoran bukan pajak (SSBP) e. Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) f. Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah g. Dokumen Piutang Daerah h. Dokumen Pengelolaan Investasi

	KU.02.02	3. Belanja a. Dokumen Belanja langsung – Belanja Pegawai – Belanja Barang Jasa – Belanja Modal b. Dokumen Belanja tidak langsung – Pegawai – Hibah – Belanja Bagi Hasil – Subsidi – Bunga – Bantuan Sosial – Bantuan Keuangan – Belanja tidak terduga
	KU.02.03	4. Pembiayaan Daerah a. Bukti Penerimaan Pembiayaan – SILPA – Dana Cadangan – Dana Bergulir – Pinjaman Daerah – Pengalihan Piutang PBB P2 menjadi PAD b. Bukti Pengeluaran Pembiayaan – Investasi Jangka Panjang Dalam Bentuk Dana Bergulir – Penyertaan Modal pada BUMD – Penambahan Penyertaan Modal pada BUMD – Pengeluaran dari Dana Cadangan – Pembiayaan Bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) – Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Milik Pemda
	KU.02.04	5. Dokumen Penatausahaan Keuangan – Surat Penyediaan Dana (SPD) – Surat Permohonan Pembayaran (SPP) – Surat Perintah Membayar (SPM) – Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
	KU.02.05	6. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana – Buku Kas Umum (BKU) – Buku Kas Pembantu (BKP) – Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek – Rekening Koran Bank – Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi – Bukti Penyetoran Pajak – Register Penutupan Kas – Berita Acara Pemeriksaan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Termasuk Arsip Data Komputer (ADK) – Laporan Pendapatan Negara – Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Tiwulan/Semesteran
	KU.02.06	7. Daftar Gaji
	KU.02.07	8. Kartu Gaji
	KU.02.08	9. Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
	KU.02.09	10. Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari : – Laporan Realisasi Anggaran (LRA) – Neraca – Laporan Arus Kas – Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

4.	KU.03 KU.03.00 KU.03.01 KU.03.02 KU.03.03 KU.03.04 KU.03.05 KU.03.06 KU.03.07 KU.03.08 KU.03.09 KU.03.10 KU.03.11 KU.03.12 KU.03.13	D. PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI 1. Dokumen Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri *(Blue Book)* 2. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai *(Green Book)* 3. Dokumen *Memorandum of Understanding* (MoU), dan dokumen sejenisnya 4. Dokumen *Loan Agreement* (PHLN) seperti : *Draft Agreement, Legal Opinion*, Surat menyurat dengan *Lender* 5. Dokumen Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, a.l. : Usulan Luncuran Dana 6. Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya : – *Reimbursement* – *Direct Payment/ Transfer Procedure* – *Special Commitment/ L/C Opening* – *Special Account/ Imprest Fund* 7. Dokumen Otorisasi Penarikan Dana *(Payment Advice)* 8. Dokumen Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, antara lain: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya. 9. *Replenishment* (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: *No Objection Letter* (NOL), *Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization* (WA), *Statement of Expenditure* (SE) 10. *Staff Appraisal Report* 11. *Report* /Laporan yang terdiri dari: – *Progress Report* – *Monthly Report* – *Quarterly Report* 12. Laporan Hutang Daerah : – Laporan Pembayaran Hutang Daerah – Laporan Posisi Hutang Daerah 13. *Completion Report/Annual Report* 14. Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
5.	KU.04 KU.04.00	E. PENGELOLAAN APBD/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) 1. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan: – Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran – Pejabat Pembuat Komitmen – Kuasa Pengguna Barang/Jasa – Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah – Pejabat Penandatanganan SPM – Bendahara Penerimaan/Pengeluaran – Pengelola Barang termasuk berita acara serah terima jabatan
6.	KU.05 KU.05.00 KU.05.01 KU.05.02 KU.05.03	F. SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) 1. Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 2. Kebijakan Akuntansi 3. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi 4. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran
7.	KU.06 KU.06.00 KU.06.01	G. PENYALURAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN 1. Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan 2. Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya : – SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil – Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota

		Kredit Bank – Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
	KU.06.02 KU.06.03 KU.06.04	3. Buku Rekening Bank 4. Keputusan Pembukuan Rekening 5. Pembukuan anggaran terdiri : Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran
8.	KU.07 KU.07.00 KU.07.01	H. PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN 1. Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan Termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran Lainnya 2. Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn, dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan
9.	KU.08 KU.08.00	I. PENGELOLAAN ANGGARAN PEMILU A. Dokumen Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD a. Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu b. Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu c. Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Provinsi, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas d. Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu e. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Provinsi f. Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Provinsi dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD g. Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada h. Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD i. Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD
10.	KU.09 KU.09.00 KU.09.01 KU.09.02 KU.09.03 KU.09.04	J. PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN PEMILU 1. Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu 2. Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu 3. Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro 4. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank 5. Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya
11.	KU.10 KU.10.00 KU.10.01 KU.10.02	K. PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PEMILU 1. Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya 2. Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD Provinsi, Panwasda dan Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) PPK dan Panwas 3. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank

12.	KU.11	L. PEMERINTAHAN DESA
	KU.11.00	1. Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
	KU.11.01	2. Program Kerja Pemerintah Desa : a. Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa b. Rencana Kerja Perangkat Desa
	KU.11.02	3. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
	KU.11.03	4. Bukti Pungutan Desa
	KU.11.04	5. Dokumen Pembebasan Eks Tanah Kas Desa : a. Peraturan Desa tentang Pembebasan Tanah Kas Desa b. Pemohonan tentang Pembebasan Tanah Kas Desa c. Hasil persetujuan/rapat d. Rekomendasi Bupati tentang persetujuan pembebasan tanah e. Persetujuan Bupati tentang hasil musyawarah harga tanah kas Desa f. Proses Pelepasan Hak Tanah Kas Desa g. Pembelian Tanah Pengganti h. Musyawarah tanah Hak Milik untuk dibeli menjadi pengganti i. Rekomendasi Bupati tentang Persetujuan Pembebasan Tanah j. Pelepasan Tanah Hak Milik menjadi Kas Desa
	KU.11.05	6. Dokumen Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa a. Sewa Tanah Kas Desa tidak berubah fungsi b. Sewa Tanah Kas Desa berubah fungsi 1) Peraturan Desa tentang sewa tanah kas Desa 2) Penawaran dari Penyewa 3) Rekomendasi Bupati tentang ijin penyewaan tanah kas Desa 4) Permohonan Ijin Gubernur 5) Ijin Gubernur
	KU.11.06	7. Dokumen Perubahan Peruntukkan Tanah Kas Desa a. Peraturan Desa tentang perubahan peruntukkan Tanah Kas Desa b. Rekomendasi Bupati tentang persetujuan pembebasan tanah c. Ijin tertulis Gubernur
	KU.11.07	8. Surat Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Pamong
	KU.11.08	9. Lain-lain Pendapatan Asli Desa
	KU.11.09	10. Pembukuan Kas Desa a. Buku Kas Umum b. Buku Bantu Pengeluaran
	KU.11.10	11. Bukti Pengeluaran Keuangan Kas Desa
	KU.11.11	12. Laporan Keuangan Kas Desa
	KU.11.12	13. Pertanggungjawaban Kepala Desa (Laporan Keuangan Tahunan Desa)
13.	KU.12	M. PEMERIKSAAN/PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
	KU.12.00	1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
	KU.12.01	2. Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
	KU.12.02	3. Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional: a. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) b. MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan) c. Tindak Lanjut/ Tanggapan LHP
	KU.12.03	4. Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah: a. Tuntutan Perbendaharaan b. Tuntutan Ganti Rugi
14.	KU.13	N. PERIMBANGAN KEUANGAN
	KU.13.00	1. KEBIJAKAN Rumusan kebijakan di bidang dana perimbangan, non dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah, dan pembiayaan meliputi: a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b. Penyiapan Bahan c. Perumusan Kebijakan

		d. Penetapan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)
	KU.13.01	2. DANA PERIMBANGAN: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) a. Pendataan informasi b. Perencanaan Alokasi c. Rincian Rencana Alokasi
	KU.13.02	3. NON DANA PERIMBANGAN : Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Keistimewaan DIY, Dana Desa, Dana Darurat a. Pendataan informasi b. Perencanaan Alokasi c. Rincian Rencana Alokasi
	KU.13.03	4. HIBAH DAERAH a. Pendataan Informasi b. Perencanaan Alokasi Hibah c. Alokasi Hibah d. Perumusan Perjanjian Hibah
	KU.13.04	5. PEMBIAYAAN DAERAH a. Persetujuan/Penolakan atas usulan Penerbitan Obligasi Daerah b. Persetujuan/Penolakan atas usulan Penerbitan Obligasi Daerah c. Persetujuan/Penolakan atas usulan Penerbitan Obligasi Daerah
	KU.13.05	6. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) a. Pendataan Informasi terkait pengembangan potensi daerah PAD b. Sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang PDRB c. Rekomendasi Hasil Sinkronisasi Raperda PDRD d. Penghitungan potensi
	KU.13.06	7. PELAKSANAAN TRANSFER a. Transfer Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) b. Transfer Non Dana Perimbangan (Dana Otsus, DID, Dana Keistimewaan, Dana Desa) c. Transfer Hibah Daerah, Pinjaman Daerah, dan Dana Darurat d. Rekonsiliasi Transfer
	KU.13.07	8. LAPORAN KEUANGAN a. Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa b. Laporan Keuangan Pembiayaan, Hibah, dan Dana Darurat
	KU.13.08	9. EVALUASI KEUANGAN DAERAH a. Evaluasi Dana Desentralisasi b. Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan c. Penilaian Kinerja Keuangan Daerah
	KU.13.09	10. PENGEMBANGAN PENDANAAN DAERAH a. Pengembangan Pendanaan Perkotaan b. Pengembangan Pendanaan Perdesaan c. Pengembangan Pendanaan Daerah Otonom Baru (DOB) d. Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Kawasan Ekonomi Khusus dan Perbatasan, Kawasan Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana
	KU.13.10	11. DATA KEUANGAN DAERAH DAN DATA NON KEUANGAN DAERAH a. Pengumpulan data b. Verifikasi dan pengolahan data c. Informasi Keuangan Daerah
	KU.13.11	12. PEMANTAUAN, SUPERVISI DAN EVALUASI Pemantauan Dan Evaluasi di Bidang Perimbangan Keuangan, meliputi a. Penyiapan Bahan b. Pelaksanaan

		c. Laporan Pelaksanaan
	KU.13.12	13. SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Di Bidang Perimbangan Keuangan, meliputi: a. Penyiapan Bahan b. Pelaksanaan c. Laporan Pelaksanaan
	KU.13.13	14. KAJIAN DAN DISEMINASI Kajian dan Desiminasi Di Bidang Perimbangan Keuangan, meliputi: a. Penyiapan Bahan b. Pelaksanaan c. Laporan Pelaksanaan d. Hasil Kajian
	KU.13.14	15. BAHAN MASUKAN NOTA KEUANGAN Bahan masukan penyusunan nota keuangan di bidang perimbangan keuangan

B. KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEPEGAWAIAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR

No.	Kode Klasifikasi			Jenis Dokumen/Arsip
	P	S	T	
1	2			*3*
II.				FUNGSI KEPEGAWAIAN
1.	KP			KEPEGAWAIAN
	KP.00			A. Kebijakan Bidang Kepegawaian
	KP.00.00			1. Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik
	KP.00.01			2. Penyusunan kebijakan
	KP.00.02			3. Perumusan kebijakan
	KP.00.03			4. Pemberian masukan dan dukungan
	KP.00.04			5. Penetapan kebijakan
	KP.00.05			6. Memorandum of Understanding
2.	KP.01			B. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
	KP.01.00			1. Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara a. Bahan penyusunan rencana kebutuhan b. Analisis Kebutuhan 1) Aparatur Sipil Negara 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) c. Pengolahan data kebutuhan
	KP.01.01			2. Perencanaan Pertimbangan Formasi a. Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN b. Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas
	KP.01.02			3. Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
	KP.01.03			4. Standarisasi Jabatan a. Informasi Jabatan b. Kompetensi Jabatan c. Klasifikasi Jabatan
3.	KP.02			C. Formasi dan Pengadaan Pegawai
	KP.02.00			1. Formasi ASN a. Usulan formasi disertai dengan: 1) Analisa Jabatan 2) Beban Kerja b. Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN c. Persetujuan Formasi d. Penetapan Formasi e. Penetapan Formasi Khusus
	KP.02.01			2. Pengadaan ASN a. Proses Rekrutmen ASN b. Penetapan Pengumuman Kelulusan c. Berkas Lamaran yang tidak diterima d. Nota Usul Pengangkatan ASN e. Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)
	KP.02.02			3. Sistem Rekrutmen ASN a. Pengelolaan Sistem Rekrutmen 1) Standar dan prosedur sistem rekrutmen dan seleksi pegawai 2) Kisi kisi dan materi soal kompetensi dasar dan kompetensi 3) Evaluasi dan analisis kelayakan materi kompetensi b. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi 1) Pelayanan teknis dan administrasi seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian 2) Penyelenggaraan dan pengolahan seleksi 3) Sertifikasi dan pelaporan a. penyiapan dan pengelolaan sertifikat kelulusan b. pengelolaan laporan dan evaluasi seleksi

4.	KP.03 KP.03.00 KP.03.01 KP.03.02 KP.03.03 KP.03.04 KP.03.05	D. Mutasi Pegawai 1. Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN/BKD 2. Usulan Kenaikan pangkat/golongan/jabatan 3. Usulan Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional 4. Penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai 5. Usulan Peninjauan Masa Kerja 6. Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat
5.	KP.04 KP.04.00 KP.04.01 KP.04.02 KP.04.03 KP.04.04	E. Pengembangan Karir 1. Usulan Tugas Belajar/Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/Magang/Ujian Dinas/Praktek Kerja di Instansi lain/Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta 1) Perencanaan dan penyusunan analisis kebutuhan 2) Pelaksanaan 3) Pelaporan 4) Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat 2. Penyesuaian ijazah 3. Penyusunan Sistem Karier 4. Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja 5. Angka Kredit a. Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit b. Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit
6.	KP.05 KP.05.00 KP.05.01 KP.05.02	F. Kinerja Aparatur Sipil Negara 1. Hasil penilaian kinerja dan standar kerja a. Sistem penilaian kerja ASN b. Standar kinerja jabatan pegawai ASN c. Penilaian kinerja pegawai ASN 2. Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja a. Pengelolaan database penilaian kinerja pegawai ASN b. Analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN c. Teknis penilaian kinerja ASN 3. Hasil Evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan pegawai ASN
7.	KP.06 KP.06.00 KP.06.01 KP.06.02 KP.06.03	G. Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN 1. Kode Etik Pegawai 2. Disiplin a. Penegakan Disiplin b. Peningkatan Disiplin 3. Pemberhentian a. Pemberhentian Dengan Hormat b. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat 4. Pensiun a. Administrasi Pensiun ASN dan Pejabat Negara 1) Administrasi pensiun ASN 2) Perekaman dan pemeliharaan data pension b. Penetapan Pensiun ASN c. Penetapan Pertimbangan teknis pensiun ASN d. Pensiun pejabat negara dan janda/dudanya 1) Administrasi pensiun Pejabat Negara 2) Penyiapan pensiun pejabat Negara 3) Penetapan pensiun janda/duda pejabat negara
8.	KP.07 KP.07.00 KP.07.01	H. Bantuan Hukum 1. Pemberian Bantuan Hukum 2. Bantuan Hukum Pegawai
9.	KP.08 KP.08.00	I. Status dan Kedudukan Pegawai 1. Pertimbangan status kepegawaian

		a. Analisis status kepegawaian b. Penyusunan pertimbangan status kepegawaian
	KP.08.01	2. Pertimbangan kedudukan kepegawaian a. Analisis kedudukan kepegawaian b. Penyusunan pertimbangan kedudukan kepegawaian
	KP.08.02	3. Penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai
	KP.08.03	4. Perselisihan/sengketa kepegawaian
10.	KP.09 KP.09.00	J. Sistem Informasi Kepegawaian 1. Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian a. Pengolahan Data 1) Pengelolaan database kepegawaian ASN 2) Penyelesaian permasalahan data kepegawaian ASN b. Informasi Kepegawaian 1) Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian ASN 2) Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian non ASN 3) Pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik
	KP.09.01	2. Pengembangan sistem informasi kepegawaian
	KP.09.02	3. Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian a. Arsip kepegawaian elektronik 1) Verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian 2) Perekaman dan arsip kepegawaian 3) Pengelolaan arsip kepegawaian elektronik b. Arsip Kepegawaian Fisik
11.	KP.10 KP.10.00	K. Pengawasan dan pengendalian 1. Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan
	KP.10.01	2. Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan
	KP.10.02	3. Gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi,evaluasi dan pelaporan
	KP.10.03	4. Kode Etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan
	KP.10.04	5. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
	KP.10.05	6. Berkas Sanggahan terhadap permasalahan Tenaga honorer
12.	KP.11 KP.11.00	L. Administrasi Pegawai 1. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
	KP.11.01	2. Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan
	KP.11.02	3. Cuti Alasan Penting
	KP.11.03	4. Cuti Besar dan Cuti Diluar Tanggungan Negara
	KP.11.04	5. Dokumentasi Identitas Pegawai a. Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu b. Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan c. Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
	KP.11.05	6. Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
	KP.11.06	7. Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/tunjangan
13.	KP.12 KP.12.00	M. Kesejahteraan Pegawai 1. Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
	KP.12.01	2. Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/BPJS
	KP.12.02	3. Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan
	KP.12.03	4. Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial
	KP.12.04	5. Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas

	KP.12.05 KP.12.06 KP.12.07 KP.12.08 KP.12.09	6. Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal karena Dinas 7. Berkas tentang Pemberian Tali Kasih 8. Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa 9. Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi 10. Berkas tentang Medical Record
14.	KP.13 KP.13.00	N. Administrasi Perseorangan 1. Berkas perseorangan Aparatur Sipil Negara - Berkas Lamaran yang diterima - Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya - Nota Persetujuan / Pertimbangan Kepala BKN - SK Pengangkatan CASN - Hasil Pengujian Kesehatan - Surat Tanda Lulus Pelatihan Prajabatan - SK Pengangkatan ASN - SK Peninjauan Masa Kerja - SK Kenaikkan Pangkat - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/ Menduduki Jabatan dan Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan - SK Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional - SK Perpindahan Wilayah Kerja - SK. Perpindahan Antar Instansi - SK. Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN) - SK Hukuman Jabatan / Hukuman Disiplin ASN - SK Perbantuan / Dipekerjakan di luar Instansi Induk - SK Penarikan Kembali dari Perbantuan / Dipekerjakan - SK Pemberian Uang Tunggu - SK Pembebasan dari Jabatan Organik diangkat sebagai Pejabat Negara - SK Pengalihan ASN - SK Pemberhentian Sebagai ASN - Surat Keterangan Pernyataan Hilang - Surat Keterangan Kembali ASN yang dinyatakan Hilang - SK Penggantian Nama - Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran - Akta Nikah / Cerai - Akta Kelahiran - Isian Formulir PUASN - Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji ASN dan Jabatan - Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol / Ormas/ LSM - Surat Keterangan Mutasi Keluarga - Surat Keterangan Meninggal Dunia/hilang - Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan - Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional - Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus - Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala - Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri - Surat Izin Berpergian Ke Luar Negeri - Kartu Daftar Ulang (Kardaf) ASN - Ijazah / Sertifikat - SK Penempatan / Penarikan Pegawai - SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk - Surat Pertimbangan Status ASN - SK Pengaktifan Kembali Sebagai ASN - Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah - SK. Pensiun

	KP.13.01 KP.13.02 KP.13.03 KP.13.04 KP.13.05	2. Berkas perseorangan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan perjajian Kerja) 3. Berkas perseorangan Pejabat Negara dan Pejabat lainnya yang disetarakan a. Bupati dan Wakil Bupati b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah c. Pejabat negara lainnya yang ditentukan Undang-Undang 4. Berkas perseorangan Sekretaris Daerah Kabupaten 5. Berkas perseorangan Kepala Desa 6. Berkas perseorangan ASN yang berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
15.	KP.14 KP.14.00 KP.14.01	O. Penilaian Kompetensi A. Berkas Penilaian Kompetensi B. Hasil Penilaian Kompetensi

C. KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF FUNGSI NON KEUANGAN DAN FUNGSI NON KEPEGAWAIAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR

No.	Kode Klasifikasi			Jenis Dokumen/Arsip
	P	S	T	
1	2			*3*
III.				FUNGSI NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN
1.	HK			A. Hukum
	HK.00			1. Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan meliputi kebijakan dibidang: Pembentukan Peraturan Daerah, Pembentukan Keputusan/Penetapan, Publikasi, Kerjasama Hukum, Dokumentasi Hukum.
	HK.00.00			a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan
	HK.00.01			b. Penyiapan kebijakan
	HK.00.02			c. Perumusan dan penyusunan bahan
	HK.00.03			d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
	HK.00.04			e. Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)
	HK.01			2. Program Legislasi / Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemda)
	HK.01.00			a. Bahan/materi program legislasi daerah dari SKPD
	HK.01.01			b. Program legislasi daerah / Propemperda
	HK.02			3. Peraturan Daerah termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai dengan diundangkan
	HK.03			4. Peraturan Bupati termasuk naskah akdemik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum
	HK.04			5. Keputusan / Ketetapan Bupati termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum
	HK.05			6. Keputusan Sekretaris Daerah termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum
	HK.06			7. Instruksi / Surat Edaran Bupati
	HK.07			8. Instruksi / Surat Edaran Kepala SKPD / Pejabat Eselon II dan III Daerah
	HK.08			9. Surat Perintah Bupati
	HK.09			10. Surat Perintah Pejabat setingkat Eselon II dan III
	HK.10			11. Dokumentasi Hukum : Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Peraturan peraturan lain yang dijadikan sebagai referensi
	HK.11			12. Standar, Pedoman, Prosedur Kerja, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis yang bersifat nasional/regional/instansional
	HK.12			13. Nota kesepahaman / Memorandum of Understanging (MoU)/ Kontrak/ Perjanjian
	HK.13			14. Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum
	HK.13.00			a. Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum
	HK.13.01			b. Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan hukum
	HK.14			15. Kasus / Sengketa Hukum
	HK.14.00			a. Pidana Berkas tentang kasus/sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran – Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis – Berkas pembelaan dan bantuan hukum – Telaah hukum dan opini hukum
	HK.14.01			b. Perdata Berkas tentang kasus/sengketa perdata : – Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis

		– Berkas pembelaan dan bantuan hukum – Telaah hukum dan opini hukum
	HK.14.02	c. Tata Usaha Negara Berkas tentang kasus/sengketa Tata Usaha Negara : – Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis – Berkas pembelaan dan bantuan hukum – Telaah hukum dan opini hukum
	HK.14.03	d. Arbitrase Berkas tentang kasus/sengketa arbitrase : – Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis – Berkas pembelaan dan bantuan hukum – Telaah hukum dan opini hukum
	HK.14.04	e. Sengketa adat
	HK.15	16. Bantuan / Konsultasi Hukum / Advokasi Berkas tentang pemberian bantuan / konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)
2.	HM	B. HUBUNGAN MASYARAKAT
	HM.00	1. Keprotokolan
	HM.00.00	a. Penyelenggaraan acara kedinasan (Upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari hari besar)
	HM.00.01	b. Buku tamu
	HM.00.02	c. Agenda kegiatan pimpinan Lemabaga Instansi
	HM.00.03	d. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri 1) Kunjungan dinas pimpinan organisasi/instansi (Pejabat Negara dan Eselon I) 2) Kunjungan dinas Pejabat lain/pegawai
	HM.00.04	e. Daftar nama/alamat kantor/pejabat
	HM.01	2. Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas/foto/video/rekaman suara/multimedia.
	HM.02	3. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi kelembagaan:
	HM.02.00	a. Kliping Koran
	HM.02.01	b. Brosur/leaflet/poster/plakat
	HM.02.02	c. Pengumuman/pemberitaan
	HM.03	4. Hubungan antar Lembaga Negara dan badan Pemerintah/Instansi
	HM.03.00	a. Hubungan antar Lembaga Pemerintah
	HM.03.01	b. Hubungan dengan Organisasi sosial/LSM
	HM.03.02	c. Hubungan dengan Perusahaan
	HM.03.03	d. Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG) / Praktek Kerja Lapangan (PKL)
	HM.03.04	e. Forum Kehumasan (Bakohumas/Perhumas)
	HM.03.05	f. Hubungan dengan media massa: 1) Siaran pers/konfrensi pers/press release 2) Kunjungan wartawan/peliputan 3) Wawancara
	HM.04	5. Dengar pendapat/hearing DPRD
	HM.05	6. Bahan/materi pidato/sidang DPRD, Muspida Kabupaten
	HM.06	7. Penerbitan majalah, buletin, koran, dan jurnal
	HM.07	8. Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
	HM.08	9. Pameran/sayembara/lomba, Festival, pembuatan spanduk dan iklan
	HM.09	10. Penghargaan/ tanda kenag-kenangan administrasi pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan kepada masyarakat yang memiliki jasa prestasi besar
	HM.10	11. Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan maaf

3.	OG OG.00 OG.01 OG.02 OG.03 OG.03.00 OG.03.01 OG.04 OG.04.00 OG.04.01 OG.04.02 OG.05	C. ORGANISASI 1. Susunan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah 2. Uraian Jabatan, Tugas dan Fungsi 3. Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional 4. Tata Laksana : a. Standar Operasional Prosedur b. Mekanisme Kerja 5. Pembinaan dan Evaluasi Organisasi a. Evaluasi Organisasi, Tugas dan Fungsi b. Evaluasi Uraian Jabatan, Analisa beban kerja c. Uraian Tata Laksana 6. Pengembangan Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4.	PW PW.00 PW.00.00 PW.00.01 PW.00.02 PW.01 PW.01.00 PW.01.01 PW.01.02 PW.01.03 PW.01.04 PW.01.05 PW.01.06 PW.01.07 PW.01.08 PW.01.09 PW.01.10 PW.01.11 PW.01.12 PW.01.13 PW.01.14 PW.01.15	D. PENGAWASAN / INSPEKTORAT 1. Rencana Pengawasan a. Rencana Strategis Pengawasan b. Rencana Kerja Tahunan c. Rakor Pengawasan Tingkat Nasional 2. Pelaksanaan Pengawasan a. Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan Tindak Lanjut (TL) b. Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan Tindak Lanjut (TL) c. Laporan Hasih Audit Investigasi (LHAI), yang mengandung unsur tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut d. Laporan perkembangan Penanganan Surat Pengaduan masyarakat e. Laporan Pemutahiran Data f. Laporan Perkembangan Barang Milik Negara g. Laporan Hasil Pemeriksaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) h. Laporan Hasil Pemeriksaan Non Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (Non PKPT) i. Laporan Hasil Pemeriksaan Reksus (Pemeriksaan Khusus) j. Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) k. Review Renja l. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah m. Review Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah n. Review Renstra o. Review DPA p. Hasil Evaluasi Tindak Lanjut
5.	PL PL.00 PL.00.00 PL.00.01 PL.00.02 PL.00.03 PL.01 PL.01.00 PL.01.01 PL.01.02 PL.01.03 PL.01.04	E. PERLENGKAPAN 1. Rencana Kebutuhan Barang a. Usulan Kebutuhan BMN satuan Kerja/Wilayah/Kementerian b. Dokumen Pemetaan Rencana Kebutuhan BMN c. Dokumen Analisis Kebutuhan BMN lima tahunan d. Dokumen Persetujuan Kebutuhan BMN 2. Pengadaan Barang dan Jasa/Hibah a. Pengadaan barang Persediaan (Barang habis pakai) b. Pengadaan Aset Tetap c. Dokumen Pekerjaan Konstruksi d. Dokumen Jasa Konsultasi dan jasa lainnya e. Dokumen Pengadaan Hibah

	PL.02	3. Penyimpanan dan Penyaluran
	PL.02.00	a. Penyimpanan Barang Milik Negara (BMN) – SK Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan – Surat Pemberitahuan Pemeriksaan barang – Berita Acara Pemeriksaan barang – Surat Jalan Pengiriman Barang ke Gudang – Berita Acara serah terima Hasil Pekerjaan – Berita Acara Serah Terima Barang dari PPK ke Kabag Penyimpanan dan Penyaluran – Buku Persediaan – Laporan Persediaan per semester
	PL.02.01	b. Penyaluran Barang Milik Negara (BMN) – Surat Permohonan Permintaan barang dan Unit Kerja – Bon Permintaan Barang – Surat Pemberitahuan Pengiriman barang dari penyedia – Surat Pemberitahuan Barang Pengiriman Barang – Bukti Pengiriman Barang – Berita Acara Serah Terima barang
	PL.03	4. Penatausahaan BMN
	PL.03.00	a. Daftar Barang Ruangan (DBR)
	PL.03.01	b. Daftar Barang Lainnya (DBL)
	PL.03.02	c. Kartu Identitas Barang (KIB)
	PL.03.03	d. Laporan Barang Kuasa Pengguna
	PL.03.04	e. Laporan Barang Pengguna
	PL.03.05	f. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan
	PL.03.06	g. Laporan Perkembangan BMN
	PL.04	5. Penghapusan barang Milik Negara (BMN)
	PL.04.00	a. Berkas Usulan Penghapusan BMN
	PL.04.01	b. Penetapan Penghapusan BMN
	PL.04.02	c. Risalah Lelang
	PL.04.03	d. Dokumen Penarikan BMN
	PL.04.04	e. Berita Acara Serah Terima BMN ke Masyarakat
	PL.05	6. Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN
	PL.05.00	a. Berkas Usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN
	PL.05.01	b. Kontrak/Perjanjian Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN
	PL.05.02	c. Penetapan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN
	PL.06	7. Penetapan status penggunaan BMN
	PL.06.00	a. Berkas Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN
	PL.06.01	b. Penetapan Status Penggunaan BMN
	PL.06.02	c. Berkas Usulan pengalihan Status Penggunaan BMN
	PL.06.03	d. Penetapan pengalihan Status Penggunaan BMN
	PL.07	8. Bukti-bukti Kepemilikan Asset
	PL.07.00	a. Sertifikat tanah
	PL.07.00	b. IMB
	PL.07.00	c. Gambar/Denah bangunan/instalasi listrik, air dan gas dan As Built Drawing
	PL.07.00	d. BPKB
	PL.07.00	e. STNK
6.	DL	F. PENDIDIKAN DAN LATIHAN
	DL.00	1. Pedoman-pedoman kediklatan
	DL.01	2. Kurikulum-kurikulum diklat
	DL.02	3. Modul-modul diklat
	DL.03	4. Panduan fasilitator
	DL.04	5. Saran/Rekomendasi penyelenggaraan Diklat
	DL.05	6. Notulen Sosialisasi/Rapat koordinasi kebijakan Diklat
	DL.06	7. Akreditasi Lembaga Diklat – Surat Permohonan akreditasi – Laporan hasil Verifikasi lapangan – Berita acara rapat verifikasi – Berita acara rapat Tim Penilai – Surat Keputusan Penetapan Akreditasi

		– Sertifikat Akreditasi – Laporan Akreditasi Lembaga Diklat
	DL.07	8. Sertifikat sumber daya manusia kediklatan – Surat Permohonan akreditasi – Laporan hasil Verifikasi lapangan – Berita acara rapat verifikasi – Berita acara rapat Tim Penilai – Surat Keputusan Penetapan Sertifikasi – Sertifikat Sertifikasi – Laporan sertifikasi individual
	DL.08	9. Sistem Informasi diklat – Data lembaga diklat – Data prasarana Diklat – Data sarana Diklat – Data pengelola Diklat – Data penyelenggara Diklat – Data Widyaiswara – Data program diklat
	DL.09	10. Registrasi sertifikat / STPL peserta Diklat a. Surat permohonan kode registrasi b. Buku registrasi c. Surat penyampaian kode registrasi
	DL.10	11. Rencana tahunan Diklat
	DL.11	12. Rencana penyelenggaraan Diklat
	DL.12	13. Penyelenggaraan Diklat – Surat pemanggilan peserta – Surat Keputusan Tim Penyelenggara Dillat – Surat Keputusan tim Pengajar Diklat – Panduan Diklat – Laporan Panitia Penyelenggara Diklat – Sambutan Pembukaan Penyelenggaraan Diklat – Daftar peserta Diklat – Bahan ajar Diklat – Daftar hadir peserta Diklat – Daftar hadir widyaiswara – Formulir Evaluasi Diklat – Formulir Evaluasi Widyaiswara – Hasil Formulasi Evaluasi peserta Diklat – Sertifikat/STTPL – Sambutan penutupan Diklat
	DL.13	14. Laporan penyelenggaraan Diklat
	DL.14	15. Evaluasi penyelenggaraan Diklat
	DL.15	16. Evaluasi alumni pasca Diklat
7.	TI	G. TEKNOLOGI INFORMASI
	TI.00	1. Rencana Strategis/master plan Pembangunan Sistem Informasi (SIM)
	TI.01	2. Dokumentasi Arsitektur
	TI.01.00	– Sistem Informasi
	TI.01.01	– Sistem Aplikasi
	TI.01.02	– Infrastruktur
	TI.02	3. Dokumentasi Implementasi :
	TI.02.00	– Sistem Informasi
	TI.02.01	– Sistem Aplikasi
	TI.02.02	– Infrastruktur
	TI.03	4. Perekaman dan Pemutakhiran Data :
	TI.03.00	– Formulir Isian
	TI.03.01	– Daftar Petugas Perekaman
	TI.03.02	– Jadwal Pelaksanaan

	TI.03.03 TI.04 TI.04.00 TI.04.01 TI.04.02 TI.04.03 TI.04.04 TI.05 TI.05.00 TI.05.01 TI.05.02 TI.06	– Laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data 5. Migrasi Sistem Aplikasi dan Data : – Perencanaan Migrasi – Pelaksanaan Migrasi – Berita Acara Kegiatan Migrasi – Daftar Sistem Aplikasi dan Data yang dimigrasi – Laporan hasil migrasi 6. Dokumen hosting : – Formulir permintaan hosting – Laporan hasil uji kelayakan – Laporan pelaksanaan hosting 7. Layanan Back-up Data Digital

D. KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF

I. URUSAN PERTANIAN

No.	Kode Klasifikasi P	S	T	Jenis Dokumen/Arsip
1	*2*			*3*
I.	PT			PERTANIAN
	PT.00			**A.** KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perkebunan, Hortikultura, Sarana Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan.
	PT.00.00			1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
	PT.00.01			2. Penyiapan Bahan
	PT.00.02			3. Perumusan Kebijakan
	PT.00.03			4. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan
	PT.00.04			5. Penetapan Berbentuk NSPK
				B. PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	PT.01			1. Perbibitan Ternak
	PT.01.00			a. Produksi Bibit Ternak Ruminansia
				1) Produksi Bibit Ternak Ruminansia Besar
				2) Produksi Bibit Ternak Ruminansia Kecil
	PT.01.01			b. Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia
				1) Produksi Bibit Ternak Unggas
				2) Produksi Bibit Aneka Ternak
	PT.01.02			c. Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak
				1) Penilaian Bibit Ternak
				2) Pelepasan Bibit Ternak
	PT.01.03			d. Mutu Bibit ternak
				1) Sertifikasi Bibit Ternak Pengawasan Mutu Bibit Ternak
				2) Pengembangan Bibit Ternak
	PT.01.04			e. Pengembangan Bibit Ternak
				1) Analisis Pengembangan Bibit Ternak
				2) Kelembagaan Pengembangan Bibit Ternak
	PT.01.05			f. Surat Rekomendasi & Persetejuan Pemasukan/Pengeluaran
	PT.02			2. Pakan Ternak
	PT.02.00			a. Bahan Pakan
				1) Bahan Pakan Asal Hewan
				2) Bahan Pakan Asal Tumbuhan
	PT.02.01			b. Pakan Hijauan
				1) Budidaya Pakan Hijauan
				2) Kawasan Penggembalaan dan Integrasi Ternak
	PT.02.02			c. Pakan Olahan
				1) Produksi Pakan Olahan
				2) Pengolahan Pangan
	PT.02.03			d. Mutu Pakan
				1) Sertifikasi Pakan
				2) Pengawasan Pakan
	PT.02.04			e. Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran
	PT.03			3. Budidaya Ternak
	PT.03.00			a. Ternak Potong
				1) Ternak Sapi dan Kerbau Potong
				2) Ternak Kambing dan Domba Potong
	PT.03.01			b. Ternak Perah
				1) Ternak Sapi dan Kerbau Perah
				2) Ternak Kambing Perah
	PT.03.02			c. Ternak Unggas dan Aneka Ternak

		1) Ternak Unggas 2) Aneka Ternak dan Monogastrik
	PT.03.03	d. Usaha dan Kelembagaan 1) Pemberdayaan masyarakat/lembaga (LM3) 2) Sarjana Membangun Desa (SMD)
	PT.04 PT.04.00 PT.04.01 PT.04.02 PT.04.03 PT.04.04	4. Kesehatan Hewan a. Pengamatan Penyakit Hewan 1) Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner 2) Penyidikan Penyakit Hewan b. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan 1) Pencegahan Penyakit Hewan 2) Pemberantasan Penyakit Hewan 3) Rekomendasi Surat Keterangan Kesehatan Hewan c. Perlindungan Hewan 1) Analisis Risiko Penyakit Eksotik 2) Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan d. Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan 1) Kelembagaan Kesehatan Hewan 2) Sumber Daya Kesehatan Hewan 3) Laporan THL 4) Proposal Poskeswan e. Pengawasan Obat Hewan 1) Mutu Obat Hewan 2) Peredaran Obat Hewan 3) Pendaftaran Obat Hewan 4) Rekomendasi Obat Hewan
	PT.05 PT.05.00 PT.05.01 PT.05.02 PT.05.03 PT.05.04 PT.05.05	5. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen a. Pasca panen 1) Teknologi Pasca panen 2) Sarana Pasca panen b. Higien Sanitasi 1) Penerapan Higiene Sanitasi 2) Inspeksi Higiene Sanitasi c. Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan 1) Pengawasan Sanitary 2) Pengawasan Keamanan Produk Hewan d. Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan 1) Zoonosis 2) Kesejahteraan Hewan e. Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan 1) Pengujian Produk Hewan; 2) Registrasi dan Sertifikasi Produk Hewan f. Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan/ Pengeluaran
	 PT.06 PT.06.00 PT.06.01 PT.06.02 PT.06.03	**C.** PERKEBUNAN 1. Tanaman Semusim a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya 1. Identifikasi Sumber Daya Tanaman Semusim 2. Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim b. Perbenihan 1) Penyiapan Perbenihan Tanaman Semusim 2) Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Semusim c. Budidaya 1) Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim 2) Penerapan Teknologi Budidaya Tenaman Semusim d. Pemberdayaan dan Kelembagaan 1) Pemberdayaan Tanaman Semusim 2) Kelembagaan Tanaman Semusim

	PT.07	2. Tanaman Rempah & Penyegar
	PT.07.00	a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya
		1) Identifikasi Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar
		2) Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar
	PT.07.01	b. Perbenihan
		1) Penyiapan Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar
		2) Bimbingan Peredaran Tanaman Rempah & Penyegar
	PT.07.02	c. Budidaya
		1) Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar
		2) Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar
	PT.07.03	d. Pemberdayaan dan Kelembagaan
		1) Pemberdayaan Tanaman Rempah & Penyegar
		2) Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar
	PT.08	3. Tanaman Tahunan
	PT.08.00	a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya
		1) Identifikasi Sumber Daya Tanaman Tahunan
		2) Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Tahunan
	PT.08.01	b. Perbenihan
		1) Penyiapan Perbenihan Tanaman Tahunan
		2) Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Tahunan
	PT.08.02	c. Budidaya
		1) Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan
		2) Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan
	PT.08.03	d. Pemberdayaan dan Kelembagaan
		1) Pemberdayaan Tanaman Tahunan
		2) Kelembagaan Tanaman Tahunan
	PT.09	4. Perlindungan Perkebunan
	PT.09.00	a. Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim
		1) Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim
		2) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim
	PT.09.01	b. Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar
		1) Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar
		2) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar
	PT.09.02	c. Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan
		1) Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan
		2) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan
	PT.09.03	d. Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
		1) Dampak Perubahan Iklim
		2) Pencegahan Kebakaran
	PT.10	5. Pascapanen dan Pembinaan Usaha
	PT.10.00	a. Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
		1) Teknologi Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
		2) Penerapan Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
	PT.10.01	b. Pascapanen Tanaman Tahunan
		1) Teknologi Pascapanen Tanaman Tahunan
		2) Penerapan Pascapanen Tanaman Tahunan

	PT.10.02 PT.10.03	c. Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan 1) Bimbingan Usaha Perkebunan 2) Perkebunan Berkelanjutan d. Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik 1) Gangguan Usaha Perkebunan 2) Penanganan Konflik
	 PT.11 PT.11.00 PT.11.01 PT.11.02 PT.11.03	**D.** HORTIKULTURA 1. Perlindungan Hortikultura a. Perlindungan Tanaman Buah 1) Teknologi Perlindungan Tanaman Buah 2) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan b. Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat 1) Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat 2) Pengendalian Organisme Tumbuhan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat c. Perlindungan Tanaman Florikultura 1) Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura 2) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Flirikultura d. Dampak iklim dan Persyaratan Teknis 1) Pengelolaan Dampak iklim dan lingkungan 2) Informasi dan Persyaratan Teknis
	PT.12 PT.12.00

		E. PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
	PT.13	1. Perluasan dan Pengelolaan Lahan
	PT.13.00	a. Basis Data Lahan
		1) Identifikasi Lahan
		2) Analisis dan Penyajian Data Lahan
	PT.13.01	b. Pengendalian Lahan
		1) Identifikasi dan Analisis Lahan
		2) Rekomendasi Teknis pengendalian lahan
	PT.13.02	c. Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
		1) Identifikasi dan Analisis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.
		2) Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.
	PT.13.03	d. Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
		1) Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan.
		2) Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan tanaman pangan.
	PT.13.04	e. Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
		1) Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan
		2) Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura, perkebunan
	PT.14	2. Pengelolaan Air Irigasi
	PT.14.00	a. Pengembangan Sumber Air
		1) Air Permukaan
		2) Air Tanah
	PT.14.01	b. Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
		1) Pengembangan Jaringan
		2) Optimasi Air
	PT.14.02	c. Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
		1) Iklim
		2) Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
	PT.14.03	d. Kelembagaan
		1) Identifikasi Kelembagaan
		2) Pengembangan Kelembagaan
	PT.15	3. Pupuk Pestisida
	PT.15.00	a. Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
		1) Tanaman Pangan
		2) Hortikultura dan Perkebunan
	PT.15.01	b. Pupuk Anorganik
		1) Tanaman Pangan
		2) Hortikultura dan Perkebunan
	PT.15.02	c. Pestisida
		1) Pestisida Kimia
		2) Pestisida Hayati
	PT.15.03	d. Pengawasan Pupuk dan Pestisida
		1) Pengawasan Pupuk
		2) Pengawasan Pestisida
	PT.16	4. Alat dan Mesin Pertanian
	PT.16.00	a. Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
		1) Tanaman Pangan dan Hortikultura
		2) Perkebunan dan Peternakan
	PT.16.01	b. Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
		1) Tanaman Pangan dan Hortikultura
		2) Perkebunan dan Peternakan
	PT.16.02	c. Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
		1) Kelembagaan
		2) Pelayanan

		F. TANAMAN PANGAN
	PT.17	1. Perbenihan Tanaman Pangan
	PT.17.00	a. Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
		1) Penilaian Varietas
		2) Pengawasan Mutu Benih
	PT.17.01	b. Produksi Benih Serealia
		1) Padi
		2) Serealia Non Padi
	PT.17.02	c. Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
		1) Aneka Kacang
		2) Aneka Umbi
	PT.17.03	d. Kelembagaan Benih
		1) Kelembagaan Produksi
		2) Kelembagaan Pengawasan
	PT.18	2. Budidaya Serealia
	PT.18.00	a. Padi Irigasi dan Rawa
		1) Padi Irigasi
		2) Padi Rawa
	PT.18.01	b. Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
		1) Padi Tadah Hujan
		2) Padi Lahan Kering
	PT.18.02	c. Jagung
		1) Intensifikasi Jagung
		2) Pengembangan Jagung
	PT.18.03	d. Serealia
		1) Intensifikasi Serealia Lain
		2) Pengembangan Serealia Lain
	PT.19	3. Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
	PT.19.00	a. Kedelai
		1) Intensifikasi Kedelai
		2) Pengembangan Kedelai
	PT.19.01	b. Ubi Kayu
		1) Intensifikasi Ubi Kayu
		2) Pengembangan Ubi Kayu
	PT.19.02	c. Aneka Kacang
		1) Intensifikasi Aneka Kacang
		2) Pengembangan Aneka Kacang
	PT.19.03	d. Aneka Umbi
		1) Intensifikasi Aneka Umbi
		2) Pengembangan Aneka Umbi
	PT.20	4. Perlindungan Tanaman Pangan
	PT.20.00	a. Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan
		1) Monitoring dan Analisis Data organisme pengganggu tumbuhan
		2) Evaluasi dan Pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan.
	PT.20.01	b. Teknologi pengendalian organisasi pengganggu tumbuhan
	PT.21	5. Pascapanen Tanaman Pangan
	PT.21.00	a. Padi
		1) Teknologi pascapanen padi.
		2) Sarana pascapanen padi.
	PT.21.01	b. Jagung dan Serealia Lain
		1) Teknologi pascapanen jagung dan serealia lain.
		2) Sarana pascapanen jagung dan serealia lain.
	PT.21.02	c. Kedelai dan Aneka Kacang
		1) Teknologi pascapanen kedelai dan aneka kacang.
		2) Sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang.
	PT.21.03	d. Aneka Umbi
		1) Teknologi pascapanen aneka umbi.
		2) Sarana pascapanen aneka umbi.

		G. PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
	PT.22	1. Pengolahan Hasil Pertanian
	PT.22.00	a. Tanaman Pangan
		1) Serealia
		2) Aneka Kacang dan Aneka Umbi
	PT.22.01	b. Hortikultura
		1) Tanaman Buah dan Sayuran
		2) Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat
	PT.22.02	c. Perkebunan
		1) Tanaman Semusim
		2) Tanaman Tahunan
	PT.22.03	d. Peternakan
		1) Ruminansia
		2) Non Ruminansia
	PT.23	2. Mutu dan Standariasi
	PT.23.00	a. Standardisasi
		1) Tanaman Pangan dan Hortikultura
		2) Perkebunan dan Peternakan
	PT.23.01	b. Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
		1) Tanaman Pangan dan Hortikultura
		2) Perkebunan dan Peternakan
	PT.23.02	c. Akreditasi dan Kelembagaan
		1) Tanaman Pangan dan Hortikultura
		2) Perkebunan dan Peternakan
	PT.23.03	d. Kerjasama dan Harmonisasi
		1) Tanaman Pangan dan Hortikultura
		2) Perkebunan dan Peternakan
	PT.24	3. Pengembangan Usaha dan Investasi
	PT.24.00	a. Kemitraan dan Kewirausahaan
		1) Kemitraan
		2) Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif
	PT.24.01	b. Investasi
		1) Tanaman Pangan dan Hortikultura
		2) Perkebunan dan Peternakan
	PT.24.02	c. Promosi Dalam Negeri
		1) Daya Saing
		2) Eksibisi dan Ekspo
	PT.24.03	d. Promosi Luar Negeri
		1) Daya saing
		2) Eksibisi dan Ekspo
	PT.25	4. Pemasaran Domestik
	PT.25.00	a. Informasi Pasar
		1) Analisis Pasar
		2) Deseminasi Informasi Pasar
	PT.25.01	b. Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
		1) Pemantauan Pasar
		2) Stabilisasi Harga
	PT.25.02	c. Sarana dan Kelembagaan Pasar
		1) Sarana Pasar
		2) Kelembagaan Pasar
	PT.25.03	d. Jaringan Pemasaran
		1) Akses Pasar
		2) Sarana Pemasaran

		H. PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
	PT.26	1. Administrasi meliputi : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat
	PT.27	2. Hasil Penelitian,Pengkajian, dan Pengembangan
	PT.27.00	a. Hasil Penelitian dan Pengembangan
	PT.27.01	b. Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
	PT.28	3. Diseminasi
	PT.29	4. Publikasi Hasil Penelitian/Pengkajian
	PT.29.00	a. Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis,Demlot, Seminar Lokakarya,Temu Karya,
	PT.29.01	b. Jurnal, Buletin, Monografi, Prosiding, dan Pubikasi lainnya
	PT.30	5. Bimbingan Teknis Penelitian,Pengkajian, dan Pengembangan
	PT.31	6. Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
	PT.32	7. Data Penelitian dan Pengembangan
	PT.33	8. Evaluasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Pertanian
		I. KETAHANAN PANGAN
	PT.34	1. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
	PT.34.00	a. Ketersediaan Pangan 1) Analisis Ketersediaan Pangan 2) Sumberdaya Pangan
	PT.34.01	b. Akses Pangan 1) Analisis Akses Pangan 2) Pengembangan Akses Pangan
	PT.34.02	c. Kerawanan Pangan 1) Analisis Kerawanan Pangan 2) Penanggulangan Kerawanan Pangan
	PT.35	2. Distribusi dan Cadangan Pangan
	PT.35.00	a. Distribusi Pangan 1) Analisis Distribusi Pangan 2) Kelembagaan Distribusi Pangan
	PT.35.01	b. Harga Pangan 1) Analisis Harga Pangan Produsen 2) Analisis Harga Pangan Konsumen
	PT.35.02	c. Cadangan Pangan 1) Cadangan Pangan Pemerintah 2) Cadangan Pangan Masyarakat
	PT.36	3. Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
	PT.36.00	a. Konsumsi Pangan 1) Pola Konsumsi Pangan 2) Kebutuhan Konsumsi Pangan
	PT.36.01	b. Penganekaragaman Pangan 1) Pengembangan Pangan Lokal 2) Promosi Penganekaragaman Pangan
	PT.36.02	c. Keamanan Pangan Segar 1) Pengawasan Keamanan Pangan Segar 2) Kelembagaan Keamanan Pangan Segar
	PT.37	4. Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
	PT.37.00	a. Pengelolaan Database Kelembagaan
	PT.37.01	b. Bahan Penguatan dan Pengembangan dan Kapasitas dibidang Kelembagaan
	PT.37.02	c. Penghargaan Ketahanan Pangan

II. URUSAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No.	Kode Klasifikasi P	T	S	Jenis Dokumen/Arsip
1	*2*			*3*
II.	DG			URUSAN PERDAGANGAN
	DG.00 DG.00.00 DG.00.01 DG.00.02 DG.00.03 DG.00.04			**A.** KEBIJAKAN Kebijakan tentang Perdagangan, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen. a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b. Penyiapan kebijakan c. Perumusan kebijakan d. Masukan dan Dukungan Kebijakan e. Penetapan NSPK
	DG.01 DG.01.00 DG.01.01 DG.01.02 DG.01.03 DG.01.04			**B.** PERDAGANGAN 1. Perdagangan Dalam Negeri a. Bina Usaha Kelembagaan dan penguatan usaha - Kelembagaan - penguatan Usaha b. Jasa Perdagang - Perdagangan berbasis elektronik - Perdagangan berbasis jasa distribusi dan bisnis c. Usaha dagang asing dan keagenan - Usaha dagang asing - Keagenan d. Informasi perusahaan - Pendaftaran perusahaan - Seksi analisa LKTP e. Pelaku pasar - Pengecer - Pemasok
	DG.02 DG.02.00 DG.02.01 DG.02.02 DG.02.03			2. Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri a. Iklim usaha dan bimbingan teknis - Iklim usaha - bimbingan teknis b. Fasilitasi usaha dan pemasaran - Fasilitasi usaha produktif - Pemasaran c. Pengembangan produk lokal - Penelaahan potensi produk - Fasilitasi penguatan produk d. Pencitraan produk dalam negeri - kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri - peningkatan promosi
	DG.03 DG.03.00 DG.03.01 DG.03.02 DG.03.03			3. Logistik dan Sarana Distribusi a. Pengembangan Sarana Distribusi - Perencanaan - Bimbingan Teknis Pengembangan b. Pengelolaan sarana distribusi - Bimbingan teknis pengelolaan - Evaluasi pengelolaan c. Kerja sama pengembangan sistem logistik - Pemerintah - Lembaga non pemerintah d. Informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik - Informasi logistik - Bimbingan teknis penyedia jasa logistik

	DG.04 DG.04.00 DG.04.01 DG.04.02 DG.04.03	4. Bahan Pokok dan Barang Strategis a. Informasi Pasar 1 Informasi harga - Pengumpulan - Pengolahan data - Penyiapan - Penyajian informasi - Analisis 2 Informasi non harga - Pengumpulan - Pengolahan data - Penyiapan - Penyajian informasi - Analisis b. Hasil industri - Gula dan tepung - Minyak goreng dan garam c. Barang strategis - Hasil agro - Hasil industri d. Bahan pokok agro - Serelia - Hewan dan non serelia
	 DG.05 DG.05.00 DG.05.01 DG.05.02 DG.05.03	**C.** STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1. Standardisasi a. Kelembagaan dan informasi standar - Hubungan kelembagaan - Informasi standar b. Kerjasama standarisasi - Kerjasama Regional - Kerjasama Bilateral dan Multilateral c. Perumusan dan Penerapan Standar - Penerapan Standar - Perumusan Standar d. Tata Usaha - Kepegawaian - Keuangan - Perencanaan dan Program - Inventaris Kantor/BMAN
	DG.06 DG.06.00 DG.06.01 DG.06.02 DG.06.03	2. Pemberdayaan Konsumen a. Kerjasama, informasi, dan publikasi - Kerja sama - Informasi dan publikasi b. Analisa penyelenggara pelindungan konsumen - Konsultasi hukum - Analisis c. Bimbingan konsumen dan pelaku usaha - Bimbingan konsumen - Bimbingan pelaku usaha d. Fasilitasi kelembagaan - Pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat - Pemberdayaan badan penyelesaian sengketa konsumen

	DG.07 DG.07.00 DG.07.01 DG.07.02 DG.07.03	3. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa a. Produk pertambangan dan aneka industri - Produk pertambangan dan olahan - Produk aneka industri b. Produk pertanian, kimia, dan kehutanan - Produk pertanian dan kehutanan - Produk kimia dan olahan c. Jasa - jasa distribusi - jasa bisnis d. Kerjasama - Kerja sama baik lembaga pemerintah dan non pemerintah
	DG.08 DG.08.00 DG.08.01 DG.08.02 DG.08.03 DG.08.04 DG.08.05	4. Metrologi a. Sarana dan Kerjasama - Sarana metrologi legal - Kerja sama metrologi legal b. Kelembagaan dan Penilaian - Kelembagaan metrologi legal - Penilaian kelembagaan metrologi legal c. UTTP dan Standar Ukuran - Besaran massa, listrik, tekanan dan suhu - Besaran arus, panjang dan volume d. Pengawasan - Pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya - Pengawasan barang dalam keadaan terbungkus dan satuan internasional e. Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) - Bimbingan Mutu - Pelayanan Teknis f. Balai Pengujian UTTP - Bimbingan Mutu - Pelayanan Teknis
	 DG.09 DG.09. 00 DG.09. 01 DG.09. 02 DG.09. 03	**D.** PERDAGANGAN LUAR NEGERI 1. Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan a. Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan b. Perkebunan (tanaman tahunan dan semusim) c. Holtikultura (rempah dan tanaman obat-obatan) d. Kehutanan (hasil kayu dan produk kayu)
	DG.10 DG.10. 00 DG.10. 01 DG.10. 02 DG.10. 03	2. Ekspor Produk Industri dan Pertambangan a. Produk TPT, aneka dan jasa b. Produk logam, mesin, alat transportasi dan elektronika c. Produk Industri Agro dan Kimia d. Produk migas dan Pertambangan
	DG.11 DG.11. 00 DG.11. 01 DG.11. 02 DG.11. 03 DG.11. 04	3. Impor a. Impor Barang Modal - Mesin dan peralatan mesin - Alat angkut b. Barang pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan - Barang pertanian dan kehutanan - Barang kelautan dan perikanan c. Barang aneka industri dan bahan baku industri - Barang aneka industri - Bahan baku industri d. Barang konsumsi - Barang konsumsi tahan lama - Barang konsumsi tidak tahan lama e. Barang kimia, tambang dan limbah - Barang kimia dan bahan berbahaya - Barang tambang dan limbah

	DG.12 DG.12. 00 DG.12. 01 DG.12. 02 DG.12. 03 DG.12. 04	4. Fasilitasi Ekspor dan Impor a. Kerjasama Internasional b. Sumber pembayaran dan sistem pembayaran c. Prosedur dan dokumen d. Penunjang perdagangan internasional e. Pelayanan Perdagangan
	DG.13 DG.13. 00 DG.13. 01 DG.13. 02	5. Pengamanan Perdagangan a. Monitoring Hambatan Perdagangan - Monitoring - Evaluasi b. Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan - Hambatan teknis perdagangan c. Penanganan Tuduhan - Dumping - Subsidi - Safeguard
	 DG.14 DG.14. 00 DG.14. 01 DG.14. 02 DG.15 DG.15. 00 DG.15. 01 DG.15. 02 DG.15. 03 DG.16 DG.16. 00 DG.16. 01 DG.17 DG.17. 00 DG.17. 01	**E.** PENGEMBANGAN EKSPORT NASIONAL 1. Pasar dan Informasi Ekspor a. Pengembangan pasar b. Pengembangan sistem informasi ekspor c. Pelayanan informasi 2. Produk Ekspor dan Ekonomi Kreatif a. Hasil Industri b. Produk agro c. Jasa d. Ekonomi kreatif 3. Kerjasama Pengembangan Ekspor a. Luar negeri b. Dalam negeri 4. Promosi dan Citra a. Promosi b. Perencanaan dan Citra
	 DG.18 DG.18. 00 DG.18. 01 DG.18. 02 DG.19 DG.19. 00 DG.19. 01 DG.19. 02 DG.20 DG.20. 00 DG.20. 01 DG.20. 02 DG.21 DG.22	**F.** PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI 1. Perniagaan a. Bina Usaha b. Pengawasan Transaksi c. Pengawasan Keuangan dan Audit 2. Analisa Pasar a. Pengkajian pasar b. Pengembangan Pasar c. Sistem Informasi 3. Pasar Fisik dan Jasa a. Pembinaan pasarlelang dan sistem resi gudang b. Pengawasan pasar lelang c. Pengawasan sistem resi gudang **G.** BIMBINGAN TEKNIS **H.** EVALUASI

No.	Kode Klasifikasi P	S	T	Jenis Dokumen/Arsip
1	2			*3*
	IN			URUSAN PERINDUSTRIAN
	IN. 00			A. KEBIJAKAN Kebijakan mengenai idustri manufaktur, industri agro, industri unggulan berbasis teknologi tinggi, industri kecil menengah, pengembangan perwilayaham industri, kerjasama industri internasional, pengkajian kebijakan iklim & mutu industri meliputi :
	IN. 00. 00			a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
	IN. 00. 01			b. Penyiapan kebijakan
	IN. 00. 02			c. Perumusan dan penyusunan bahan
	IN. 00. 03			d. Masukan dan Dukungan Kebijakan
	IN. 00. 04			e. Penetapan NSPK
	IN. 01			B. IKLIM USAHA DAN KERJASAMA
	IN. 01. 00			1. INDUSTRI MANUFAKTUR a. Industri Material Dasar Logam 1) Logam Besi 2) Logam Bukan Besi 3) Logam Lainnya b. Industri Kimia Dasar c. Industri Kimia Hilir d. Industri Tekstil dan Aneka 1) Tekstil 2) Pakaian jadi, Tekstil lainnya 3) Alas Kaki, Kulit, dan Aneka
	IN. 01. 01			2. INDUSTRI AGRO a. Industri Hasil Hutan 1) Kayu dan rotan 2) Selulosa dan Karet 3) Hasil Perkebunan non Pangan Lainnya b. Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan 1) Hasil tanaman pangan 2) Hasil perkebunan 3) Hasil laut, perikanan, dan peternakan c. Industri Minuman dan Tembakau 1) Hasil holtikultura dan minuman ringan 2) Hasil tembakau 3) Hasil susu dan Minuman Lainnya
	IN. 01. 02			3. INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI a. Alat Transportasi Darat 1) Kendaraan roda empat atau lebih 2) Kendaraan roda dua dan kereta api 3) Industri komponen b. Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan 1) Industri perkapalan 2) Industri kedirgantaraan dan alat pertahanan 3) Industri bangun c. Elektronika dan Telematika 1) Industri softwar 2) Industri peralatan TIK, perkantoran dan elektronika profesional 3) Industri elektronika konsumsi dan komponen d. Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 1) Industri mesin, peralatan listrik, dan alat kesehatan

		2) Industri mesin perkakas pabrik, alat mesin pertanian, dan alat berat
	IN. 01. 03	4. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Industri Kecil dan menengah Wilayah I, Wilayah II (Jawa Bali), Wilayah III (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua) a. Industri Pangan, 1) Pangan 2) Industri kimia dan bahan bangunan b. Industri kerajinan dan sandang 1) Kerajinan 2) Sandang c. Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika 1) Industri produk logamdan alat angkut 2) Industri kreatif telematika dan elektronik
	IN. 02 IN. 02. 00	C. PROMOSI INDUSTRI 1. INDUSTRI MANUFAKTUR Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, logam Lainnya. a. Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya. b. Industri Kimia Dasar : Anorganik dasar, Organik dasar, Dasar lainnya. c. Industri Kimia Hilir : Kimia anorganik hilir, Kimia organik hilir, Kimia hilir lainnya. d. Industri Tekstil dan Aneka : Tekstil, Pakaian jadi, Tekstil lainnya, Alas Kaki, Kulit, dan Aneka.
	IN. 02. 01	2. INDUSTRI AGRO a. Industri Hasil Hutan: Kayu dan rotan, Selulosa dan Karet, Hasil Perkebunan non Pangan Lainnya. b. Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan: Hasil tanaman pangan, Hasil perkebunan, Hasil laut, perikanan, dan peternakan. c. Industri Minuman dan Tembakau: Hasil holtikultura dan minuman ringan, Hasil tembakau, Hasil susu dan Minuman Lainnya.
	IN. 02. 02	3. INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI a. Alat Transportasi Darat 1) Kendaraan roda empat atau lebih 2) Kendaraan roda dua dan kereta api 3) Industri komponen b. Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan 1) Industri perkapalan 2) Industri kedirgantaraan dan alat pertahanan 3) Industri bangun c. Elektronika dan Telematika 1) Industri softwar 2) Industri peralatan TIK, perkantoran dan elektronika profesional 3) Industri elektronika konsumsi dan komponen d. Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 1) Industri mesin, peralatan listrik, dan alat kesehatan 2) Industri mesin perkakas pabrik, alat mesin pertanian, dan alat berat

	IN. 02. 03	5. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Industri Kecil dan menengah Wilayah I, Wilayah II (Jawa Bali), Wilayah III (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua) a. Industri Pangan: Pangan, Industri kimia dan bahan bangunan. b. Industri kerajinan dan sandang: Kerajinan, Sandang. c. Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika: 1) Industri produk logamdan alat angkut 2) Industri kreatif telematika dan elektronik
	IN. 03 IN. 03. 00	D. STANDARISASI DAN TEKNOLOGI 1. INDUSTRI MANUFAKTUR Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, logam Lainnya. a. Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya. b. Industri Kimia Dasar : Anorganik dasar, Organik dasar, Dasar lainnya. c. Industri Kimia Hilir : Kimia anorganik hilir, Kimia organik hilir, Kimia hilir lainnya. d. Industri Tekstil dan Aneka : Tekstil, Pakaian jadi, Tekstil lainnya, Alas Kaki, Kulit, dan Aneka.
	IN. 03. 01	2. INDUSTRI AGRO a. Industri Hasil Hutan: Kayu dan rotan, Selulosa dan Karet, Hasil Perkebunan non Pangan Lainnya. b. Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan: Hasil tanaman pangan, Hasil perkebunan, Hasil laut, perikanan, dan peternakan. c. Industri Minuman dan Tembakau: Hasil holtikultura dan minuman ringan, Hasil tembakau, Hasil susu dan Minuman Lainnya.
	IN. 03. 02	3. INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI a. Alat Transportasi Darat 1) Kendaraan roda empat atau lebih 2) Kendaraan roda dua dan kereta api 3) Industri komponen b. Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan 1) Industri perkapalan 2) Industri kedirgantaraan dan alat pertahanan 3) Industri bangun c. Elektronika dan Telematika 1) Industri softwar 2) Industri peralatan TIK, perkantoran dan elektronika profesional 3) Industri elektronika konsumsi dan komponen d. Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 1) Industri mesin, peralatan listrik, dan alat kesehatan 2) Industri mesin perkakas pabrik, alat mesin pertanian, dan alat berat
	IN. 03. 03	4. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Industri Kecil dan menengah Wilayah I, Wilayah II (Jawa Bali), Wilayah III (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua) a. Industri Pangan: Pangan, Industri kimia dan bahan bangunan. b. Industri kerajinan dan sandang: Kerajinan, Sandang. c. Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika: 1) Industri produk logamdan alat angkut 2) Industri kreatif telematika dan elektronik

	IN. 04 IN. 04. 00	E. HAK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL 1. INDUSTRI MANUFAKTUR Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, logam Lainnya. a. Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya. b. Industri Kimia Dasar : Anorganik dasar, Organik dasar, Dasar lainnya. c. Industri Kimia Hilir : Kimia anorganik hilir, Kimia organik hilir, Kimia hilir lainnya. d. Industri Tekstil dan Aneka : Tekstil, Pakaian jadi, Tekstil lainnya, Alas Kaki, Kulit, dan Aneka.
	IN. 04. 01	2. INDUSTRI AGRO a. Industri Hasil Hutan: Kayu dan rotan, Selulosa dan Karet, Hasil Perkebunan non Pangan Lainnya. b. Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan: Hasil tanaman pangan, Hasil perkebunan, Hasil laut, perikanan, dan peternakan. c. Industri Minuman dan Tembakau: Hasil holtikultura dan minuman ringan, Hasil tembakau, Hasil susu dan Minuman Lainnya.
	IN. 04. 02	3. INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI a. Alat Transportasi Darat 1) Kendaraan roda empat atau lebih 2) Kendaraan roda dua dan kereta api 3) Industri komponen b. Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan 1) Industri perkapalan 2) Industri kedirgantaraan dan alat pertahanan 3) Industri bangun c. Elektronika dan Telematika 1) Industri softwar 2) Industri peralatan TIK, perkantoran dan elektronika profesional 3) Industri elektronika konsumsi dan komponen d. Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 1) Industri mesin, peralatan listrik, dan alat kesehatan 2) Industri mesin perkakas pabrik, alat mesin pertanian, dan alat berat
	IN. 04. 03	4. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Industri Kecil dan menengah Wilayah I, Wilayah II (Jawa Bali), Wilayah III (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua) a. Industri Pangan: Pangan, Industri kimia dan bahan bangunan. b. Industri kerajinan dan sandang: Kerajinan, Sandang. c. Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika: 1) Industri produk logamdan alat angkut 2) Industri kreatif telematika dan elektronik
	IN. 05 IN. 05. 00	F. INDUSTRI HIJAU 1. INDUSTRI MANUFAKTUR Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, logam Lainnya. a. Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya. b. Industri Kimia Dasar : Anorganik dasar, Organik dasar, Dasar lainnya.

		c. Industri Kimia Hilir : Kimia anorganik hilir, Kimia organik hilir, Kimia hilir lainnya. d. Industri Tekstil dan Aneka : Tekstil, Pakaian jadi, Tekstil lainnya, Alas Kaki, Kulit, dan Aneka.
	IN. 05. 01	2. INDUSTRI AGRO a. Industri Hasil Hutan: Kayu dan rotan, Selulosa dan Karet, Hasil Perkebunan non Pangan Lainnya. b. Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan: Hasil tanaman pangan, Hasil perkebunan, Hasil laut, perikanan, dan peternakan. c. Industri Minuman dan Tembakau: Hasil holtikultura dan minuman ringan, Hasil tembakau, Hasil susu dan Minuman Lainnya.
	IN. 05. 02	3. INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI a. Alat Transportasi Darat 1) Kendaraan roda empat atau lebih 2) Kendaraan roda dua dan kereta api 3) Industri komponen b. Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan 1) Industri perkapalan 2) Industri kedirgantaraan dan alat pertahanan 3) Industri bangun e. Elektronika dan Telematika 1) Industri softwar 2) Industri peralatan TIK, perkantoran dan elektronika profesional 3) Industri elektronika konsumsi dan komponen f. Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 1) Industri mesin, peralatan listrik, dan alat kesehatan 2) Industri mesin perkakas pabrik, alat mesin pertanian, dan alat berat
	IN. 05. 03	4. INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Industri Kecil dan menengah Wilayah I, Wilayah II (Jawa Bali), Wilayah III (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua) a. Industri Pangan: Pangan, Industri kimia dan bahan bangunan. b. Industri kerajinan dan sandang: Kerajinan, Sandang. c. Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika: 1) Industri produk logamdan alat angkut 2) Industri kreatif telematika dan elektronik
	IN. 06 IN. 06. 00	G. ANALISIS INDUSTRI UNGGULAN Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota
	IN. 07 IN. 07. 00	H. MONITORING DAN EVALUASI Monitoring dan Evaluasi Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota
	IN. 08 IN. 08. 00	I. PENGEMBANGAN Pengembangan Kawasan Industri Wilayah Industri I, II, III
	IN. 09 IN. 09. 00	J. FASILITAS PENGEMBANGAN Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri
	IN. 10 IN. 10. 00	K. KERJASAMA INDUSTRI Ketahanan Industri

	IN. 11	L. STANDARISASI
	IN. 11. 00	1. Standar
	IN. 11. 01	2. Penyiapan Penerapan
	IN. 11. 02	3. Infrastruktur Standar
	IN. 12	M. TEKNOLOGI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
	IN. 12. 00	1. Pengkajian dan Penerapan
	IN. 12. 01	2. Pengkajian dan Penerapan
	IN. 12. 02	3. Pengembangan Hak

III. URUSAN PERHUBUNGAN

No.	Kode Klasifikasi P S T	Jenis Dokumen/Arsip
1	*2*	*3*
III.	HB	PERHUBUNGAN
	HB. 00	A. KEBIJAKAN Kebijakan teknis dan strategis Bidang Perhubungan
	HB. 00. 00	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan
	HB. 00. 01	b. Penyiapan Bahan
	HB. 00. 02	c. Perumusan Kebijakan
	HB. 00. 03	d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
	HB. 00. 04	e. Penetapan kebijakan dalam bentuk NSPK
	HB. 01	B. PERHUBUNGAN DARAT (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
	HB. 01. 00	1. Jaringan Transportasi Jalan: a. Jaringan Prasarana dan Pelayanan: - penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang - penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C - penetapan lokasi terminal barang utama - standar pelayanan minimal pengoperasian terminal - jaringan trayek angkutan antar kota/propinsi - jaringan lintas pada jaringan jalan primer - penetapan kelas jalan primer - kualifikasi teknis petugas terminal - jaringan transportasi jalan sekunder b. Pengembangan Transportasi Jalan : - sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan - pengembangan transportasi jalan
	HB. 01. 01	2. Sarana Angkutan Jalan a. Pengujian Kendaraan Bermotor - pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor - sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor - sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor - akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor b. Teknologi Kendaraan Bermotor : - sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor - pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor - persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor - harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor
	HB. 01. 02	3. Lalu lintas jalan a. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas : - analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan - manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional b. Perlengkapan Jalan : - Pedoman teknis perlengkapan jalan - penimbangan kendaraan bermotor di jalan - akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor - kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor - pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional

	HB. 01. 03	4. Angkutan jalan a. Angkutan Penumpang: - tarif angkutan penumpang kelas ekonomi - izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara - izin trayek antar kota antar propinsi - izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/propinsi - penilaian kinerja perusahaan angkutan umum - pemberian subsidi angkutan umum - angkutan perintis - penghargaan perusahaan angkutan umum b. Angkutan Barang: - tarif angkutan barang - izin operasi angkutan barang tertentu - pembinaan angkutan barang - tarif angkutan barang - izin operasi angkutan barang tertentu - pembinaan angkutan barang
	HB. 01. 04	5. Pengendalian operasioanl a. Monitoring Operasional : - pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan b. Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil : - Pedoman Teknis - penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik - Pegawai Negeri Sipil (PPNS) - Bimtek PPNS - Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri - Sipil (PPNS)
	HB. 02	C. Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
	HB. 02. 00	1. Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan a. Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan - Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan - Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan b. Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan - Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan) - pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
	HB. 02. 01	2. Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan a. Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan. b. Usaha dan Investasi
	HB. 02. 02	3. Pelayanan Usaha a. Pelayanan usaha mikro, kecil dan menengah

	HB. 02. 03 HB. 02. 04 HB. 02. 05	4. Kemitraan Usaha a. Kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah 5. Ketenagakerjaan pengelolaan dan pemasaran a. Tenaga kerja pengolahan b. Tenaga kerja Pemasaran 6. Informasi dan Promosi
	HB. 03 HB. 03. 00 HB. 03. 01

IV. URUSAN PERIKANAN

No.	Kode Klasifikasi			Jenis Dokumen/Arsip
	P	S	T	
1	*2*			*3*
IV.	LP			PERIKANAN
	LP. 00			A. KEBIJAKAN Rumusan Kebijakan di bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Karantina Ikan.
	LP. 00. 00			1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan
	LP. 00. 01			2. Penyiapan bahan
	LP. 00. 02			3. Perumusan kebijakan
	LP. 00. 03			4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
	LP. 00. 04			5. Penetapan kebijakan
	LP. 01 LP. 01. 00			B. PERIKANAN TANGKAP 1. Sumber Daya Ikan a. Data dan Statistik Perikanan Tangkap 1) Pengumpulan dan pengolahan 2) Analisis dan penyajian b. Pelabuhan Perikanan 1) Identifikasi dan Penyiapan Pelabuhan Perikanan - identifikasi dan analisis - penyiapan bangunan 2) Tata Operasional Pelabuhan Perikanan - Tata laksana pelabuhan perikanan - Pengusahaan dan pelayanan 3) Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan - Bimbingan pembangunan pps, ppn, dan ppp - Bimbingan pembangunan ppi dan pelabuhan swasta 4) Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan - Tata laksana dan sarana - Keselamatan pelayaran 5) Pemantauan dan Evaluasi Pelabuhan Perikanan - Pemantauan dan evaluasi pps, ppn, dn ppp - Pemantauan dan evaluasi ppi dan pelbuhan swasta c. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan 1) Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan - Verifikasi pengusahaan penangkapan ikan - Administrasi pengusahaan penangkapan ikan 2) Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan - Penerbitan dokumen penangkapan ikan - Tata laksana dokumen penangkapan ikan d. Pengembangan Usaha Penangkapan 1) Kenelayanan - Identifikasi dan kapasitas nelayan - Bimbingan nelayan
	LP. 02 LP. 02. 00			C. PERIKANAN BUDIDAYA 1. Prasarana dan Sarana Budidaya a. Lahan dan Air 1) Identifikasi potensi 2) Penataan

		b. Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau 1) Standarisasi 2) Pemantauan dan evaluasi c. Prasara dan sarana Budidaya Air Laut 1) Standarisasi 2) Pemantauan dan evaluasi d. Minapolitan Budidaya 1) Identifikasi potensi 2) Pemanfaatan potensi
	LP. 02. 01	2. Perbenihan a. Induk 1) Pengelolaan induk ikan air tawar 2) Pengelolaan induk ikan air payau dan laut b. Perbenihan Skala Kecil 1) Perbenihan skala kecil ikan air tawar c. Perbenihan Skala Besar 1) Perbenihan skala besar ikan air tawar 2) Perbenihan skala besar ikan air payau d. Standarisasi dan Sertifikasi Perbenihan 1) Standarisasi perbenihan 2) Sertifikasi perbenihan e. Informasi dan Distribusi Perbenihan 1) Informasi perbenihan 2) Distribusi perbenihan
	LP. 02. 02	3. Produksi a. Budidaya air tawar 1) Standarisasi 2) Penerapan teknologi budidaya air tawar b. Budidaya ikan hias 1) Standarisasi 2) Penerapan teknologi budidaya ikan hias c. Sertifikasi 1) Penerapan sertifikasi 2) Monitoring dan evaluasi sertifikasi d. Data dan statistik perikanan budidaya 1) Pengumpulan dan pengolahan data 2) Analisis dan penyajian data statistik
	LP. 02. 03	4. Kesehatan Ikan dan Lingkungan a. Hama dan penyakit ikan 1) Metode dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan 2) Monitoring dan evaluasi hama dan penyakit ikan b. Perlindungan lingkungan budidaya 1) Pengendalian lingkungan budidaya 2) Rehabilitasi lingkungan budidaya c. Pengendalian Residu 1) Perencanaan pengendalian residu 2) Tindak lanjut pengendalian residu
	LP. 02. 04	5. Usaha Budidaya a. Investasi dan Permodalan b. Kewirausahaan c. Pelayanan usaha 1) Perizinan 2) Pemantauan dan evaluasi d. Kelembagaan dan ketenagakerjaan e. Infomasi usaha dan promosi

	LP. 03 LP. 03. 00

		1) Mitigasi dan adaptasi c. Investasi dan promosi pulau-pulau kecil 1) Promosi
	LP. 04. 04	5. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha a. Akses permodalan 1) Akses Perbankan b. Akses ilmu pengetahuan dan teknologi c. Sosial Budaya Masyarakat 1) Peningkatan peran masyarakat d. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1) Pelayanan usaha mikro, kecil dan menengah
	LP. 05 LP. 05. 00	F. PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan a. Pengawasan penangkapan ikan wilayah timur 1) Pengawasan penangkapan ikan wilayah timur II b. Pengawasan pengangkutan, pengolahan dan pemasaran 1) Pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan dan pemasaran wilayah timur c. Pengawasan usaha budidaya 1) Pengawasan usaha wilayah timur
	LP. 05. 01	2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan a. Pengawasan ekosistem pengairan dan kawasan konservasi 1) Pengawasan ekosistem pengairan 2) Pengawasan kawasan konservasi b. Pengawasan pencemaran pengairan 1) Pengawasan pencemaran pesisir laut dan pesisir pantai 2) Pengawasan pencemaran perairan umum dan pendalaman
	LP. 05. 02	3. Pengawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil

V. URUSAN PENANAMAN MODAL

No.	Kode Klasifikasi P	S	T	Jenis Dokumen/Arsip
1	2			*3*
V.	PM			PENANAMAN MODAL
	PM. 00 PM. 00. 00 PM. 00. 01 PM. 00. 02 PM. 00. 03 PM. 00. 04			A. KEBIJAKAN 1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan 2. Penyiapan Kebijkan 3. Perumusan Kebijakan 4. Masukan dan Dukungan Kebijakan 5. Penetapan NSPK
	PM. 01 PM. 01. 00			B. PERENCANAAN PENANAMAN MODAL 1. Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya a. Agribisnis 1) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan 2) Kelautan, Perikanan dan peternakan b. Energi 1) Energi Terbarukan 2) Energi Tak Terbarukan c. Sumber Daya Mineral 1) Mineral Logam 2) Mineral Non Logam
	PM. 01. 01			2. Perencanaan Industri Manufaktur a. Industri Logam, Mesin,Tekstil dan Aneka 1) Industri Logam Dan Mesin 2) Industri Tekstil dan Aneka b. Industri Kimia 1) Industri Kimia Dasar 2) Industri barang Kimia dan Farmasi c. Industri Alat Transportasi dan Telematika 1) Industri Alat Transportasi 2) Industri Telematika
	PM. 01. 02			3. Perencanaa Jasa dan Kawasan a. Jasa Perdagangan dan Pariwisata 1) Jasa Perdagangan 2) Jasa Pariwisata b. Jasa Kesehatan, Pendidikan,Ketenaga Kerjaan, dan Jasa Lainnya 1) Jasa Kesehatan , Pendidikan , dan Ketenaga Kerjaan 2) Jasa lainnya c. Kawasan Ekonomi 1) Kawasan ekonomi Khusus 2) Kawasan Ekonomi Lainnya
	PM. 01. 03			4. Perencanaan Infrastruktur a. Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan dan Jembatan 1) Infra Struktur Transportasi, Darat, Jalan dan Jembatan 2) Infra Struktur Jalan dan Jebatan b. Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air 1) Infrastruktur Energi 2) Infarastruktur Sumber Daya Air c. Infrastruktur Transportasi Laut, Udara dan Infrastruktur Lainnya 1) Infrastruktur Transportasi Laut 2) Infra Struktur Transportasi Udara dan Infrastruktur Lainnya

	PM. 02 PM. 02. 00 PM. 02. 01 PM. 02. 02	C. PEGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 1. Deregulasi Penanaman Modal a. Sektor Primer 1) Pertanian, Kelautan dan Perikanan 2) Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan b. Sektor Tersier 1) Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi 2) Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya 2. Pegembangan Potensi Daerah a. Sektor Primer dan Tersier 1) Sektor Primer 2) Sektor Tersier b. Sektor Sekunder 1) Sektor Industri Logam, Mesin Transportasi dan Telematika 2) Industri Agro, Kimia, Tekstil dan aneka 3. Pemberdayaan Usaha a. Pembinaan dan penyuluhan 1) Pembinaan 2) Penyuluhan b. Kemitraan Usaha 1) Sektor Primer 2) Sektor Sekunder c. Pelayanan Usaha 1) Sektor Primer dan Tersier 2) Sektor Sekunder
	PM. 03 PM. 03. 00 PM. 03. 01 PM. 03. 02	D. PROMOSI PENANAMAN MODAL 1. Pengembangan Promosi a. Analisis Strategi Promosi 1) Analisis Target Promosi 2) Analisis Target Daya Saing Promosi 2. Promosi Sektoral a. Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa Dan Kawasan b. Promosi Industri Manufaktur 1) Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronik 2) Industri Manufaktur Lainnya c. Promosi Infrastruktur 1) Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur lainnya 3. Pameran dan Sarana Promosi a. Pameran 1) Penyusunan Program dan Monitoring 2) Penyelenggaraan dan Evaluasi b. Media Cetak 1) Materi Promosi 2) Publikasi dan Distribusi c. Media Elektronik 1) Materi Promosi 2) Pelayanan Informasi
	PM. 04 PM. 04. 00	E. PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1. Pelayanan Aplikasi a. Aplikasi Sektor Primer dan Tersier 1) Aplikasi Baru 2) Aplikasi Perluasan 3) Aplikasi Perubahan b. Kerjasama Dunia Usaha Internasional 1) Aplikasi Baru 2) Aplikasi Perluasan 3) Aplikasi perubahan

	PM. 04. 01 PM. 04. 02	2. Pelayanan Perizinan a. Perizinan Sektor Primer dan Tersier 1) Pertanian Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana 2) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi 3) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan aneka Jasa b. Perizinan Sektor Sekunder 1) Industri Mesin Logam dan Barang Logam 2) Industri Kimia dan barang Kimia 3) Industri Aneka 3. Pelayanan Fasilitas a. Perizinan Sektor Primer dan Tersier 1) Pertanian ,Peternakan, Perkebunan,Pariwisata dan Prasarana 2) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi 3) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan aneka Jasa b. Perizinan Sektor Sekunder 1) Industri Mesin Logam dan Barang Logam 2) Industri Kimia dan barang Kimia 3) Industri Aneka
	PM. 05 PM. 05. 00 PM. 05. 01 PM. 05. 02 PM. 05. 03 PM. 05. 04 PM. 05. 05	F. PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 1. Pemantauan Penanaman Modal 2. Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal 3. Fasilitasi Penyelesaian Masalah 4. Pengawasan Penanaman Modal 5. Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal 6. Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal.

VI. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Kode Klasifikasi P S T	Jenis Dokumen/Arsip
1	*2*	*3*
VI.	LH	LINGKUNGAN HIDUP
	LH. 00	A. KEBIJAKAN Kebijakan dibidang Tata Lingkungan, Pegendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah, Penataan Hukum Lingkungan, Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas.
	LH. 00. 00	1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan a. Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Wilayah b. Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Sektor c. Kajian dampak Lingkungan d. pengembangan Perangkat kebijakan
	LH. 00. 01	2. Penyiapan Bahan
	LH. 00. 02	3. Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan
	LH. 00. 03	4. Pengumpulan dan pengolahan Data
	LH. 00. 04	5. Penetapan dalam bentuk NSPK
	LH. 01	B. TATA LINGKUNGAN
	LH. 01. 00	1. Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup a. Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan 1) Dokumentasi Inventarisasi 2) Pedoman Inventarisasi 3) Penetapan Ekoregion 4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 5) Pedoman Penyusunan RPPLH Provinsi, RPPLH Kabupaten/Kota b. Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam 1) Evaluasi pemanfaatan dan Pencadangan Sumber daya Alam 2) Kebijakan pemanfaatan Sumber Daya Alam
	LH. 01. 01	2. Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor a. Evaluasi Penerapan b. Perencanaan Lingkungan Hidup
	LH. 01. 02	3. Ekonomi Lingkungan a. Perencanaan 1) Valuasi ekonomi 2) Internalisasi Lingkungan b. Perencanaan
	LH. 01. 03	4. Dampak Lingkungan a. Bimtek Dampak Lingkungan b. Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan 1) Penilaian dokumen lingkungan 2) Pemeriksaan Dokumen Lingkungan c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1) Evaluasi 2) Tindak Lanjut

	LH. 02 LH. 02. 00

	LH. 03. 02 LH. 03. 03 LH. 03. 04	3. Pengendalian Kerusakan Pesisir dan laut a. Pencegahan b. Penaggulangan c. Pemulihan 4. Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer a. Perangkat mitigasi b. Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca 1) Laporan Inventarisasi GRK Nasional 2) Data Bidang Inventarisasi GRK c. Pengendalian Bahan Perusak Ozon 1) Surat Rekomendasi Kepada Infortir Terdaftar dan Bahan perusak Ozon 2) Hibah Bantuan Luar negeri Terkait Program Perlindungan Lapisan Ozon d. Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan 5. Adaptasi Perubahan Iklim a. Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim 1) Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim 2) Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim b. Kerentanan Perubahan Iklim 1) Identifikasi dan Analisis Kerentanan Perubahan Iklim 2) Media Kliring Kerentanan Perubahan Iklim
	LH. 04 LH. 04. 00 LH. 04. 01 LH. 04. 02 LH. 04. 03	E. PENGELOLAAN B3, LIMBAH, DAN SAMPAH 1. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun a. Registrasi dan Notifikasi 1) Registrasi 2) Notifikasi b. Pemantauan 1) Sektor Industri 2) Sektor Non Industri c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1) Sektor Industri 2) Sektor Non Industri 2. Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun a. Pengumpulan dan pemanfaatan b. Pengangkutan dan Pengolahan c. Penimbunan dan Dumping d. Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas 1) Notifikasi 2) Rekomendasi Limbah Lintas Batas 3. Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 a. Pemantauan 1) Sektor Industri 2) Manufaktur 3) Agroindustri 4) Prasarana, Jasa dan Non Institusi b. Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi 1) Pertambangan Energi 2) Manufaktur 3) Agroindustri 4) Prasarana Jasa dan Non Intuisi 4. Pengelolaan Sampah a. Pembatasan sampah b. Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah c. Pembentukan Dewan Adipura d. Penetapan pemenang adipura

	LH. 05 LH. 05. 00 LH. 05. 01 LH. 05. 02 LH. 05. 03	F. HUKUM LINGKUNGAN 1. Hukum Administrasi Lingkungan a. Pengelolaan dan pengembangan pengaduan 1) Pengelolaan pengaduan 2) Pengembangan pengaduan b. penaatan hukum administrasi lingkungan 1) Penerapan hukum administrasi lingkungan 2) Pengembangan hukum administrasi lingkungan 2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan a. Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan 1) Administrasi gugatan 2) Gugatan b. penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan 1) Kerugian negara dan masyarakat 2) lembaga penyedia jasa Penyelesaian sengketa lingkungan hidup 3. Penegakan hukum pidana lingkungan a. penyidikan 1) Administrasi penyidikan 2) Pelaksana penyidikan b. Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut 1) Koordinasi penuntutan 2) Evaluasi dan tindak lanjut 4. Perjanjian Internasional Lingkungan a. Pendapat Hukum perjanjian nasional 1) Pendapatan Hukum Proses pengesahan perjanjian Internasional 2) Tindak lanjut perjanjian Nasional a. Evaluasi Perjanjian Nasional 1) Evaluasi perjanjian Internasional Pencemaran 2) Evaluasi perjanjian Internasional Perusakan
	LH. 06 LH. 06. 00 LH. 06. 01 LH. 06. 02 LH. 06. 03	G. KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Komunikasi Lingkungan 2. Penguatan Inisiatif Masyarakat 3. Peningkatan Peran Masyarakat 4. Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
	LH. 07 LH. 07. 00 LH. 07. 01 LH. 07. 02 LH. 07. 03	H. PEMBINAAN TEKNIS LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS 1. Data dan Informasi Lingkungan 2. Kelembagaan Lingkungan 3. Standarisasi dan teknologi 4. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan

VII. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

No.	Kode Klasifikasi P S T	Jenis Dokumen/Arsip
1	2	*3*
VII.	KM	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	KM. 00	A. KEBIJAKAN Kebijakan dalam Kelembagaan Koperasi dan UKM, Produksi, Pembiayaan, Pemasaran dan Jaringan Usaha, Pengkajian Sumber Daya UKMK Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Pengembangan Sumber Daya Manusia, MOU (Perjanjian Kerja Sama), Gerakan Kewirausahaan Nasional, Penetapan Bantuan
	KM. 00. 00	1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
	KM. 00. 01	2. Penyiapan Bahan
	KM. 00. 02	3. Perumusan Kebijakan
	KM. 00. 03	4. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan
	KM. 00. 04	5. Penetapan Berbentuk NSPK
	KM. 01	B. MONITORING DAN EVALUASI
	KM. 02	C. KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM
	KM. 02. 00	1. Organisasi dan Badan Hukum Koperasi a. Organisasi Koperasi dan UKM - Organisasi Koperasi - Organisasi UKM b. Badan Hukum Koperasi - Penatausahaan Badan Hukum Koperasi - Evaluasi Badan Hukum Koperasi c. Penelaahan Kasus Hukum - Kasus Hukum Koperasi - Kasus Hukum UKM
	KM. 02. 01	2. Tata laksana Koperasi dan UKM a. Tata laksana Koperasi - Tata laksana Koperasi Primer - Tata laksana Koperasi Sekunder b. Tata laksana Usaha Kecil dan Menengah - Tata laksana Usaha Kecil - Tata laksana Usaha Mengah c. Klasifikasi Koperasi dan UKM - Klasifikasi Koperasi - Klasifikasi UKM
	KM. 02. 02	3. Keanggotaan Koperasi a. Partisipasi Usaha dan Permodalan - Partisipasi Usaha - Partisipasi Permodalan b. Partisipasi Pengawasan - Rapat Anggota - Pengawasan c. Pengembangan Anggota - Kaderisasi - Penyuluhan
	KM. 02. 03	4. Pengendalian dan Akuntabilitas a. Pengendalian - Pengendalian Intern - Tindak Lanjut Hasil Pengendalian b. Bidang Akuntabilitas dan Akuntansi - Akuntabilitas

		- Akuntansi dan Audit c. Monitoring dan Evaluasi - Monitoring - Evaluasi
	KM. 03 KM. 03. 00 KM. 03. 01 KM. 03. 02 KM. 03. 03 KM. 03. 04	D. PRODUKSI 1. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura a. Tanaman Pangan - Padi - Palawija b. Hortikultura - Buah-Buahan dan Tanaman Obat - Tanaman Hias dan Sayur c. Sarana - Sarana Produksi - Sarana Pengolahan 2. Kehutanan dan Perkebunan a. Kehutanan - Hutan Produksi - Hutan Kemasyarakatan b. Perkebunan - Tanaman Semusim dan Rempah-Rempah - Tanaman Keras c. Sarana - Sarana Produksi - Sarana Pengolahan 3. Perikanan dan Peternakan a. Perikanan - Perikanan Tangkap - Perikanan Budidaya b. Peternakan - Ternak Besar - Ternak Kecil c. Sarana - Sarana Produksi - Sarana Pengolahan 4. Industri Kerajinan dan Pertambangan a. Industri - Sandang, Logam dan Elektronika - Pangan, Kimia dan Aneka b. Kerajinan - Logam - Non Logam c. Pertambangan dan Migas - Pertambangan Umum - Pertambangan Migas 5. Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha a. Ketanagalistrikan dan Konstruksi - Listrik - Konstruksi b. Aneka Usaha - Jasa Umum - Angkutan c. Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi - Pariwisata - Pos dan Telekomunikasi

	KM. 04 KM. 04. 00 KM. 04. 01 KM. 04. 02 KM. 04. 03 KM. 04. 04 KM. 04. 05	E. PEMBIAYAAN 1. Program Pendanaan a. Program Pendanaan Jangka Pendek - Program Pendanaan Koperasi Jangka Pendek - Program Pendanaan UKM Jangka Pendek b. Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang - Program Pendanaan Koperasi Jangka Menengah dan - Program Pendanaan UKM Jangka Menengah dan c. Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir - Program Pendanaan Usaha Mikro - Program Pendanaan Dana Bergulir 2. Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam a. Pengembangan dan Pengendalian KSP - Pengembangan Kelembagaan KSP - Pengendalian Kelembagaan KSP b. Pengembangan dan Pengendalian USP Koperasi - Pengembangan USP Koperasi - Pengendalian USP Koperasi c. Pengembangan dan Pengendalian USP-LKM - Pengembangan USP-LKM - Pengendalian USP-LKM 3. Urusan Permodalan a. Pengembangan Permodalan Sendiri - Permodalan Sendiri Koperasi - Permodalan Sendiri UKM b. Pengembangan Permodalan Luar - Permodalan Bank - Permodalan Non Bank c. Pengembangan Kredit Program - Kredit Program Bank - Kredit Program Non Bank 4. Asuransi dan Jasa Keuangan a. Asuransi - Asuransi Koperasi - Asuransi UKM b. Perpajakan - Perpajakan Koperasi - Perpajakan UKM c. Jasa Keuangan dan Kredit Komersial - Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank - Jasa Keuangan dan Kredit Non Komersial Bank 5. Pembiayaan dan Penjaminan Kredit a. Lembaga Pembiayaan - Modal Ventura - Sewa Guna Usaha dan Anak Piutang b. Penjaminan Kredit - Penjaminan - Asuransi Kredit c. Pasar Modal - Obligasi - Modal Penyertaan 6. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)

	KM. 05 KM. 05. 00 KM. 05. 01 KM. 05. 02 KM. 05. 03 KM. 05. 04 KM. 05. 05	F. PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA 1. Perdagangan Dalam Negeri a. Pengadaan - Pengadaan Sektor Formal - Pengadaan Sektor Informal b. Distribusi - Distribusi Sektor Formal - Distribusi Sektor Informal c. Pengembangan - Pengembangan Sektor Formal - Pengembangan Sektor Informal 2. Ekspor dan Impor a. Ekspor - Ekspor Koperasi - Ekspor UKM b. Impor - Impor Koperasi - Impor UKM c. Hubungan Perdagangan Internasional - Hubungan Perdagangan Multilateral dan Regional - Hubungan Perdagangan Bilateral 3. Sarana dan Prasarana Pemasaran a. Sarana - Pengembangan Pasar Tradisional - Pengembangan Sentra Pemasaran b. Prasarana - Lembaga Perantara - Fasilitasi HAKI c. Pengembangan Potensi Pemasaran - Pengembangan Potensi Pemasaran Koperasi - Pengembangan Potensi Pemasaran UKM 4. Kemitraan dan Jaringan Usaha a. Kemitraan - Kemitraan Koperasi - Kemitraan UKM b. Jaringan Usaha - Jaringan Usaha Koperasi - Jaringan Usaha UKM c. Pengembangan Kerja sama Kelembagaan - Pengembangan Kerja sama Kelembagaan Koperasi - Pengembangan Kerja sama Kelembagaan UKM 5. Informasi dan Publikasi Bisnis a. Pengumpulan Informasi - Pengumpulan Informasi Koperasi - Pengumpulan Informasi UKM b. Pengolahaan Informasi - Pengolahan Informasi Koperasi - Pengolahan Informasi UKM c. Publikasi dan Promosi - Publikasi dan Promosi Koperasi - Publikasi dan Promosi UKM 6. Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM

	KM. 06 KM. 06. 00

	KM. 07 KM. 07. 00

	KM. 08 KM. 08. 00 KM. 08. 01 KM. 08. 02 KM. 08. 03	I. PENGKAJIAN SUMBER DAYA UKM 1. Penelitian Koperasi a. Perencanaan dan Pengendalian - Perencanaan - Evaluasi dan Pelaporan b. Penyelenggaraan - Kelembagaan Koperasi - Bisnis Koperasi c. Tata Laksana Penelitian - Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi - Sarana dan Prasarana 2. Penelitian UKM a. Perencanaan dan Pengendalian - Perencanaan - Evaluasi dan Pelaporan b. Penyelenggaraan - Kelembagaan UKM - Bisnis UKM c. Tata Laksana Penelitian - Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi - Sarana dan Prasarana 3. Penelitian Sumber Daya a. Perencanaan dan Pengendalian - Perencanaan - Evaluasi dan Pelaporan b. Penyelenggaraan - Sumber Daya Manusia - Pembiayaan c. Tata Laksana Penelitian - Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi - Sarana dan Prasarana 4. Pengembangan Perkaderan UMK a. Penyuluhan - Penyelenggaraan - Materi Penyuluhan b. Perkaderan - Penilaian - Pengembangan c. Kerja Sama dan Jaringan - Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah

VIII. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

No.	Kode Klasifikasi P	S	T	Jenis Dokumen/Arsip
1	2			*3*
VIII.	KI. SD. ST.			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	KI. KI. 00 KI. 00. 00 KI. 00. 01 KI. 00. 02 KI. 00. 03 KI. 00. 04			1. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA A. KEBIJAKAN Kebijakan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika 1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan 2. Penyiapan Bahan 3. Perumusan Kebijakan 4. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan 5. Penetapan Berbentuk NSPK
	KI. 01 KI. 01. 00			B. APLIKASI INFORMATIKA 1. E- Government a. Tata Kelola e-Government - Program e-Government - Eevaluasi e-Government b. Teknologi dan Infrastruktur e-Government - Teknologi e-government - Infrastruktur e-government c. Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government - Interoperabilitas e-government - Interkonektivitas e-government d. Aplikasi Layanan Kepemerintahan Daerah e. Aplikasi Layanan Publik
	KI. 02 KI. 02. 00

	KI. 02. 03	4. Kemitraan Komunikasi a. Kemitraan Media dan Dunia Usaha 1) Program Kemitraan Media dan Dunia Usaha 2) b. Monitoring dan Evaluasi
	KI. 03 KI. 03. 00 KI. 03. 01 KI. 03. 02	E. LAYANAN INFORMASI INTERNASIONAL 1. Layanan Informasi Media Asing a. Program Layanan Informasi Media Asing b. Monitoring dan Evaluasi 2. Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional a. Analisis Risiko Penyakit Eksotik b. Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan 3. Layanan Informasi Masyarakat Luar Negeri a. Program Layanan Informasi Masyarakat Luar Negeri b. Monitoring dan Evaluasi
	SD. SD. 00 SD. 00. 00 SD. 00. 01 SD. 00. 02 SD. 00. 03 SD. 00. 04 SD. 01 SD. 02 SD. 02. 00 SD. 02. 01 SD. 02. 02 SD. 03 SD. 03. 00 SD. 03. 01 SD. 03. 02 SD. 03. 03 SD. 03. 04 SD. 03. 05	2. URUSAN PERSANDIAN 1. Kebijakan Kebijakan pembinaan dan pengendalian persandian yang meliputi A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan B. Penyiapan kebijakan C. Perumusan kebijakan D. Masukan dan dukungan kebijakan E. Penetapan NSPK 2. Pengamanan persandian 3. Pembinaan dan Pengendalian Persandian A. Sumber Daya Manusia (SDM) B. Materiil dan jaring komunikasi sandi C. Akreditasi dan Sertifikasi 4. Pengkajian persandian :Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi A. Perencanaan Pengkajian B. Administrasi Pengkajian C. Pelaksanaan D. Pelaporan E. Otoritas Sertifikat Digital (OSD) F. Pelatihan/Workshop/Seminar dalam Rangka Mendukung Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan
	ST ST. 00 ST. 00. 00 ST. 00. 01 ST. 00. 02 ST. 00. 03 ST. 00. 04	3. URUSAN STATISTIK **A.** PERUMUSAN KEBIJAKAN DIBIDANG STATISTIK MELIPUTI: METODOLOGI DAN INFORMASI 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan kebijakan 3. Perumusan kebijakan 4. Masukan dan dukungan kebijakan 5. Penetapan NSPK

	ST. 01 ST. 01. 00 ST. 01. 01

	ST. 01. 04 ST. 01. 05	e. Pemeriksaan tabulasi f. Laporan konsistensi tabulasi 5. Analisis dan Penyajian Hasil Sensus a. Pembahasan angka hasil pengolahan b. Penyusunan angka sementara c. Penyusunan angka tetap d. Penyusunan/pembahasan draft publikasi e. Analisis data f. Penyusunan publikasi hasil sensus 6. Diseminasi hasil sensus a. Penyusunan bahan diseminasi 1) leaflet, booklet 2) website 3) Penyusunan CD dan sejenisnya b. Sosialisasi hasil sensus melalui berbagai media c. Layanan dan promosi statistik
	ST. 02 ST. 02. 00 ST. 02. 01	**C.** SURVEI 1. Perencanaan a. Master Plan dan Network planing b. Perumusan dan penyusunan bahan 1) Penyiapan bahan penyusunan rancangan survei 2) Penyusunan metode pencacahan survei 3) Penentuan volume survei 4) Penyusunan desain penarikan sampel 5) Penyusunan kerangka sampel c. Studi pendahuluan (desk study) 2. Persiapan a. Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus b. Penyusunan Koesioner c. Penyusunan konsep dan definisi d. Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur. 1) Inventarisasi , penyusunan dan pengembangan ukuran-ukuran yang digunakan dalam sensus 2) Inventarisasi , penyusunan dan pengembangan lapangan usaha, jabatan, komoditas, perdesaan, perkotaan 3) Penyusunan daftar nama dan kode pembagian wilayah administrasi e. Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan) f. Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah g. Penyusunan pedoman sosialisasi h. Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan) i. Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan eksterm) j. Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT) k. Pelaksanaan pelatihan petugas l. Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi) m. Pelatihan petugas pengolahan n. Perancangan table o. Pelaksanaan Ujicoba 1) Ujicoba koesioner survei (meliputi reliabilitas koesioner dan sistem pengolahan) 2) Ujicoba metodologi survei (meliputi ujicoba pelaksanaan pencacahan, organisasi lapangan

	ST. 02. 02 ST. 02. 03 ST. 02. 04 ST. 02. 05	3. Pelaksanaan Lapangan a. Pelaksanaan listing b. Pemilihan sampel c. Pengumpulan data d. Pemeriksaan e. Pengawasan Lapangan f. Monitoring kualitas 4. Pengolahan a. Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching) b. Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding) c. Perekaman data (entri, scanner) d. Tabulasi Data e. Pemeriksaan tabulasi f. Laporan konsistensi tabulasi 5. Analisis dan Penyajian Hasil Survei a. Pembahasan angka hasil pengolahan b. Penyusunan angka sementara c. Penyusunan angka tetap d. Penyusunan/pembahasan draft publikasi e. Analisis data f. Penyusunan publikasi 6. Diseminasi hasil Survei a. Penyusunan bahan diseminas 1) leaflet, booklet 2) Website 3) Penyusunan CD dan sejenisnya b. Sosialisasi hasil survei melalui berbagai media
	ST. 03 ST. 03. 00 ST. 03. 01 ST. 03. 02	**D.** KONSOLIDASI DAN STATISTIK 1. Kompilasi Data 2. Analisis data 3. Penyusunan Publikasi
	ST. 04	**E.** EVALUASI DAN PELAPORAN SENSUS, SURVEI, DAN KONSOLIDASI DATA STATISTIK

IX. URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

No.	Kode Klasifikasi P S T	Jenis Dokumen/Arsip
1	*2*	*3*
IX.	KT. TR.	KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	KT.	1. URUSAN KETENAGAKERJAAN
	KT. 00	**A.** KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pembinaan Pelatihan dan Produktiivitas, Pembinaan pemberdayaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja
	KT. 00. 00	1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan
	KT. 00. 01	2. Penyiapan bahan
	KT. 00. 02	3. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
	KT. 00. 03	4. Pengumpulan dan pengolahan data
	KT. 00. 04	5. Penetapan dalam bentuk pengaturan berupa norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK)
	KT. 01	**B.** PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan
	KT. 01. 00	a. Pengembangan Standarisasi Kompetensi 1) Penerapan Standar Kompetensi 2) Bimbingan Penerapan Standar Kompetensi 3) Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan - Program Pelatihan Ketenagakerjaan - Penyusunan Materi Pelatihan Ketenagakerjaan 4) Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan - Program pelatihan produktivitas dan kewirausahaan - Penyusunan Materi Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan 5) Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian - Program Pelatihan Ketransmigrasian - Penyusunan Materi Pelatihan Ketransmigrasian
	KT. 01. 01	b. Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja 1) Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan - Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja - Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan 2) Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan - Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan - Bimbingan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas 3) Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan - Standar Mutu Lembaga Pelatihan - Bimbingan Penerapan Standar Mutu 4) Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga - Sistem Pendanaan Pelatihan - Kerjasama Antar Lembaga
	KT. 01. 02	c. Bina Pemagangan 1) Pemagangan Dalam Negeri - Program Pemagangan Dalam Negeri - Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Dalam Negeri 2) Pemagangan Luar Negeri - Program Pemagangan Luar Negeri - Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Luar Negeri

	KT. 01. 03	3) Perizinan dan Advokasi Pemagangan - Perizinan dan Rekomendasi - Advokasi dan Perlindungan 4) Promosi dan Jenjang Pemagangan - Promosi dan Sistem Informasi Pemagangan - Pemagangan Jejaring Pemagangan d. Produktivitas dan Kewirausahaan 1) Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan - Promisi Produktivitas dan Kewirausahaan - Kerjasama Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan 2) Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas - Sistem dan Metode Produktivitas - Alat dan Teknik Peningkatan Produktivitas 3) Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas - Pengukuran Produktivitas - Kajian Produktivitas 4) Pengembangan Kewirausahaan - Pelatihan Manajemen Kewirausahaan - Bimbingan Konsultasi
	KT. 02 KT. 02. 00

		c. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 1) Advokasi dan Kepulangan 2) Sarana dan Perlindungan d. Kerjasama Internasional 1) Kerjasama Bilateral 2) Kerjasama Regional dan Multilateral
	KT. 02. 03	5. Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal a. Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal 1) Tenaga Kerja Mandiri 2) Tenaga Kerja Sektor Informal b. Pengembangan Padat Karya 1) Padat Karya Perdesaan 2) Padat Karya Perkotaan c. Terapan Teknologi Tepat Guna 1) Pengembangan Teknologi Tepat Guna 2) Penyebarluasan Teknologi Tepat Guna d. Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga 1) Pemberdayaan Pendampingan 2) Kerjasama Antar Lembaga
	KT. 02. 04	6. Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing a. Analisis dan Perizinan Sektor Industri 1) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri 2) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri b. Analisis dan Perizinan Sektor Jasa 1) Rencana Pembangunan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa 2) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa c. Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan 1) Pengendalian 2) Kerjasama Kelembagaan
	KT. 02. 05	7. Standardisasi Profesi a. Sistem Informasi dan Registrasi 1) Dokumen yang behubungan dengan sistem informasi dan registrasi 2) Dokumen yang behubungan dengan Sertifikasi kompetensi kerja b. Pembakuan Akreditasi 1) Dokumen yang behubungan dengan kompetensi dan akreditasi kelembagaan sertifikasi 2) Dokumen yang behubungan dengan penyelenggaraan konvensi dan persidangan
	KT. 03	**D.** PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
	KT. 03. 00	1. Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi a. Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama 1) Peraturan Perusahaan 2) Perjanjian Kerja Bersama b. Perjanjian Kerja c. Kesejahteraan Pekerja 1) Program Kesejahteraan 2) Fasilitas Kesejahteraan d. Analisis Diskriminasi Syarat Kerja 1) Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja 2) Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja
	KT. 03. 01	2. Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial a. Organisasi Pekerja dan Pengusaha 1) Organisasi Pekerja 2) Organisasi Pengusaha

		b. Kelembagaan Hubungan Industrial 1) Lembaga Kerjasama BIPARTIT 2) Lembaga Kerjasama TRIPARTIT c. Pemasyarakatan Hubungan Industrial 1) Penyiapan Masyarakat Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial 2) Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial
	KT. 03. 02	3. Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial a. Pengupahan 1) Penerapan Standar Pengupahan 2) Pengurusan Pengupahan b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja 1) Pengurusan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja 2) Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja
	KT. 03. 03	4. Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial 1) Pencegahan Dini 2) Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan b. Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 1) Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial 2) Evaluasi dan Pelaporan c. Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 1) Fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Hubungan 2) Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan
	KT. 04 KT. 04. 00	**E.** PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 1. Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja a. Pengawasan Norma Kerja 1) Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat 2) Pengawasan Norma Pengupahan b. Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat 1) Pengawasan Norma Hubungan Kerja 2) Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat c. Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja 1) Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Negeri 2) Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri 3) Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek
	KT. 04. 01	2. Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak a. Pengawasan Norma Kerja Perempuan 1) Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi 2) Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan b. Pengawasan Norma Kerja Anak 1) Pengawasan Norma Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak 2) Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Anak c. Kerjasama Lintas Sektoral 1) Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Perempuan 2) Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Anak d. Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak 1) Advokasi Tenaga Kerja Perempuan 2) Advokasi Tenaga Kerja Anak

	KT. 04. 02	3. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja a. Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan 1) Pengawasan Norma Mekanik 2) Pengawasan Norma Pesawat Uap dan Bejana Tekan b. Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran 1) Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan 2) Pengawasan Norma Listrik dan Penanggulangan Kebakaran c. Pengawasan Norma Kesehatan Kerja 1) Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja 2) Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja d. Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya 1) Pengawasan Norma Lingkungan Kerja 2) Pengawasan Norma Bahan Berbahaya e. Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3 1) Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K3 2) Pengawasan Norma Sistem Manajemen K3
	KT. 04. 03	4. Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan
	KT. 04. 04	5. Bina Penegakan Hukum a. Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan 1) Teknis Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan 2) Penindakan Norma Ketenagakerjaan b. Penyidikan Norma Ketenagakerjaan 1) Teknis Penyedikan Norma Ketenagakerjaan 2) Administrasi Penyidikan Norma Ketenagakerjaan c. Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 1) Pemberdayaan PPNS 2) Sarana dan Prasarana PPNS d. Kerjasama Penegakan Hukum 1) Kerjasama Lembaga Penegakan Hukum 2) Kerjasama Pemeriksaan dan Penyidikan
	KT. 05	**F.** KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	KT. 05. 00	1. Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) a. Pengkajian K3 1) Analisis dan Standardisasi bidang K3 2) Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3 3) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3 b. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
	KT. 05. 01	2. Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 a. SDM K3 1) Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 2) Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 b. Kompetensi K3 1) Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 2) Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 3) Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 4) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

	TR	2. URUSAN TRANSMIGRASI
	TR. 00	A. KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan
	TR. 00. 00	1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
	TR. 00. 01	2. Penyiapan Bahan
	TR. 00. 02	3. Perumusan Kebijakan
	TR. 00. 03	4. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan
	TR. 00. 04	5. Penetapan Berbentuk NSPK
	TR. 01	B. PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
	TR. 01. 00	1. Perencanaan Teknis Pembangunan Kawasan Transmigrasi a. Perencanaan Kawasan 1) Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi 2) Perencanaan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT)/Lokasi Permukiman b. Perencanaan Teknis Permukiman 1) Perencanaan Teknis Satuan Kawasan Pengembangan 2) Perencanaan Teknis Satuan Permukiman c. Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana 1) Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman 2) Perencanaan Teknis Infrastruktur Kawasan d. Perencanaan Sumber Daya Manusia 1) Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia 2) Penataan Persebaran
	TR. 01. 01	2. Penyediaan Tanah Transmigrasi a. Fasilitasi Pengadaan Tanah 1) Identifikasi Status dan Penggunaan Tanah 2) Pengurusan Status Tanah b. Pengurusan Legalitas Tanah 1) Pengurusan Hak Pengelolaan Tanah 2) Pengurusan Hak Milik Atas Tanah c. Dokumentasi Pertanahan 1) Pengumpulan dan Pengolahan Data Pertanahan 2) Penyajian Informasi Pertanahan d. Advokasi Pertanahan 1) Identifikasi Kasus Pertanahan 2) Rekognisi dan Kompensasi
	TR. 01. 02	3. Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi a. Penyiapan Lahan 1) Bina Teknis Penyiapan Lahan 2) Evaluasi Penyiapan Lahan b. Penyiapan Sarana 1) Bina Teknis Penyiapan Sarana 2) Evaluasi Penyiapan Sarana c. Penyiapan Prasarana 1) Bina Teknis Penyiapan Sarana 2) Evaluasi Penyiapan Prasarana d. Evaluasi Kelayakan Permukiman 1) Bina Teknis Kelayakan Permukiman 2) Penilaian Kelayakan Permukiman
	TR. 01. 03	4. Fasilitasi Penempatan Transmigrasi a. Penyiapan Calon Transmigrasi 1) Pendaftaran dan Seleksi 2) Keterampilan Calon Transmigrasi

		b. Penyiapan Perpindahan 1) Penyerahan Perpindahan 2) Administrasi Perpindahan c. Pelaksanaan Perpindahan 1) Penampungan 2) Pengangkutan d. Penataan dan Adaptasi 1) Penataan Persebaran 2) Adaptasi
	TR. 01. 04	5. Partisipasi Masyarakat a. Promosi dan Motivasi 1) Promosi 2) Motivasi b. Kerjasama Kelembagaan 1) Kerjasama Lembaga Pemerintah 2) Kerjasama Lembaga Non Pemerintah c. Kerjasama Antar Daerah 1) Mediasi Kerjasama Antar Daerah 2) Pelayanan Kerjasama Antar Daerah d. Pelayanan Investasi 1) Pelayanan Aplikasi Investasi 2) Evaluasi Pelaksanaan Investasi
	TR. 02 TR. 02. 01	C. PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI 1. Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan a. Bina Sistem Informasi 1) Sistem Informasi Permukiman 2) Sistem Informasi Kawasan b. Perencanaan Pengembangan Kawasan 1) Penataan Ruang dan Infrastruktur Kawasan 2) Pengembangan Sosial dan Ekonomi c. Perencanaan Pengembangan Masyarakat 1) Pengembangan Usaha Ekonomi 2) Pengembangan Sosial Budaya d. Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan 1) Penataan Ruang dan Infrastruktur Pusat Pertumbuhan 2) Pengelolaan Kelembagaan Sosial dan Ekonomi
	TR. 02. 02	2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat a. Bantuan Pangan dan Kesehatan 1) Penyediaan Bantuan Pangan 2) Penyediaan Bantuan Kesehatan b. Fasilitas Sosial Budaya 1) Pendidikan dan Seni Budaya 2) Mental Spiritual c. Pengembangan Kelembagaan 1) Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 2) Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kawasan Transmigrasi d. Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi 1) Penyediaan Tenaga Pendamping Non PNS 2) Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping Non PNS
	TR. 02. 03	3. Pengembangan Usaha a. Kewirausahaan 1) Pembangunan Usaha Mandiri 2) Pelayanan Investasi dan Kemitraan b. Produksi 1) Tanaman Pangan 2) Non Tanaman Pangan

		c. Pengolahan Hasil dan Pemasaran 1) Pengolahan Hasil 2) Pemasaran d. Lembaga Ekonomi dan permodalan 1) Penguatan Kelembagaan 2) Kerjasama Kelembagaan
	TR. 02. 04	4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan a. Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana 1) Analisis dan Standarisasi Sarana 2) Analisis dan Standarisasi Prasarana b. Pengembangan Sarana 1) Bina Perencanaan Teknis Sarana 2) Bina Pelaksanaan Sarana c. Pengembangan Prasarana 1) Bina Perencanaan Teknis Prasarana 2) Pemantauan Pengembangan Sarana dan Prasarana d. Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana 1) Pemantauan Pengembangan Sarana dan Prasarana 2) Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana
	TR. 02. 05	5. Penyerasian Lingkungan a. Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 1) Persiapan Pengelolaan Lingkungan 2) Pemantauan Lingkungan b. Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan 1) Adaptasi Lingkungan 2) Mitigasi Lingkungan c. Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi 1) Pemantauan Perkembangan Permukiman Transmigrasi 2) Pengalihan Status Pembinaan Permukiman Transmigrasi d. Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan 1) Analisis Perkembangan Pusat Pertumbuhan 2) Pemantauan Perkembangan Pusat Pertumbuhan

X. URUSAN BENCANA, KECELAKAAN, DAN KONDISI BAHAYA

No.	Kode Klasifikasi P S T	Jenis Dokumen/Arsip
1	*2*	*3*
X.	PB. PP.	BENCANA, KECELAKAAN, DAN KONDISI BAHAYA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
	PB. PB. 00 PB. 00. 00 PB. 00. 01 PB. 00. 02 PB. 00. 03 PB. 00. 04	A. URUSAN BENCANA, KECELAKAAN, DAN KONDISI BAHAYA 1. Kebijakan Kebijakan Penanggulangan Bencana meliputi kebijakan dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Logistik dan Peralatan meliputi: A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan B. Penyiapan kebijakan C. Perumusan kebijakan D. Masukan dan dukungan kebijakan E. Penetapan NSPK
	PB. 01 PB. 01. 00 PB. 01. 01 PB. 01. 02	2. Pencegahan Dan Kesiapsiagaan A. Pengurangan Resiko Bencana 1. Pencegahan a. Pengkajian Resiko b. Pengelolaan Resiko 2. Mitigasi a. Mitigasi Struktur b. Mitigasi Non Struktur B. Pemberdayaan Mayarakat 1. Peran Lembaga Usaha a. Usaha Padat Modal b. Usaha Padat Karya 2. Peran Organisasi Sosial Masyarakat a. Organisasi Internasional b. Organisasi Sosial Masyarakat Nasional 3. Peran Masyarakat a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat b. Peningkatan Ketahanan Masyarakat C. Kesiapsiagaan 1. Peringatan Dini a. Pemaduan Sistem Jaringan b. Pemantauan dan Peringatan 2. Perencanaan Siaga a. Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya b. Penerapan Rencana Strategis 3. Penyiapan Sumber Daya a. Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya b. Pengendalian
	PB. 02 PB. 02. 00	3. Penanganan Darurat A. Tanggap Darurat 1. Perencanaan Darurat a. Pendataan Darurat b. Perencanaan Operasi 2. Pengendalian Operasi a. Pengorganisasian Pos Komando b. Sarana dan Prasarana Pos Komando

		3. Penyelamatan dan Evakuasi a. Penyelamatan b. Evakuasi
	PB. 02. 01	B. Bantuan Darurat 1. Bantuan Sandang Pangan a. Bantuan Sandang b. Bantuan Pangan 2. Bantuan Kesehatan dan Air Bersih a. Bantuan Kesehatan b. Bantuan Air Bersih 3. Bantuan Hunian Sementara a. Pembangunan Hunian Sementara b. Pendukung Hunian Sementara
	PB. 02. 02	C. Perbaikan Darurat 1. Pembersihan Lingkungan a. Penyiapan Peralatan b. Angkutan 2. Perbaikan Sarana Vital a. Prasarana Sosial b. Prasarana Ekonomi 3. Pemantauan dan Pelaporan a. Pemantauan b. Pelaporan
	PB. 03	4. Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
	PB. 03. 00	A. Penilaian Kerusakan 1. Inventarisasi Kerusakan a. Inventarisasi Fisik b. Inventarisasi Sosial Ekonomi 2. Estimasi Pembiayaan a. Estimasi Pembiayaan Pembangunan b. Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi
	PB. 03. 01	B. Pemulihan dan Peningkatan Fisik 1. Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Umum a. Rehabilitasi Fasilitas Umum b. Rekonstruksi Fasilitas Umum 2. Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Sosial a. Rehabilitasi Fasilitas Sosial b. Rekonstruksi Fasilitas Sosial 3. Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan a. Rehabilitasi Rekonstruksi Berat b. Rehabilitasi Rekonstruksi Ringan
	PB. 03. 02	C. Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi 1. Pemulihan dan Peningkatan Sosial a. Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya b. Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan 2. Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi a. Pemulihan Ekonomi b. Peningkatan Ekonomi
	PB. 03. 03	D. Penanganan Pengungsi 1. Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi a. Perlindungan Pengungsi b. Pemberdayaan Pengungsi 2. Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi a. Kompensasi b. Pengembalian hak 3. Penempatan Pengungsi a. Pemulangan dan Repatriasi b. Relokasi/Pengalihan

	PB. 04 PB. 04. 00 PB. 04. 01	5. Logistik Dan Peralatan A. Logistik 1. Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan a. Analisis Kebutuhan b. Pengadaan 2. Penyimpanan dan Distribusi a. Penyimpanan b. Distribusi B. Peralatan 1. Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan a. Analisis Kebutuhan b. Pengadaan 2. Penyimpanan dan Pemeliharaan a. Penyimpanan b. Pemeliharaan 3. Pengerahan dan Distribusi a. Pengerahan b. Distribusi
	PP. PP. 00 PP. 00. 00 PP. 00. 01 PP. 00. 02 PP. 00. 03 PP. 00. 04	B. URUSAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 1. Kebijakan Kebijakan Pencarian Dan Pertolongan Meliputi Kebijakan Di Bidang Potensi dan Operasi Pencarian dan Pertolongan. 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan kebijakan 3. Perumusan kebijakan 4. Masukan dan dukungan kebijakan 5. Penetapan NSPK
	     PP. 01 PP. 01. 00 PP. 01. 01 PP. 02 PP. 02. 00 PP. 02. 01 PP. 03 PP. 04 PP. 04. 00 PP. 04. 01	2. Potensi Pencarian dan Pertolongan A. Sarana dan Prasarana 1. Rencana dan Standardisasi a. Perencanaan dan analisa kebutuhan - Kajian Kebutuhan Peralatan - Spesifikasi Rencana Peralatan yang dibutuhkan b. Standardisasi, dan inventarisasi - Standarisasi Peralatan - Daftar Inventarisasi Peralatan 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Darat, laut, Udara dan Peralatan Pencarian dan Pertolongan 3. Pengawakan dan perbekalan a. Pengawakan - Awak sarana Pencarian dan Pertolongan darat laut dan udara - Kebutuhan awak sarana Pencarian dan Pertolongan darat, laut dan udara - Bahan pembinaan awak sarana darat, laut dan udara b. Perbekalan - Perbekalan dalam menunjang kegiatan operasi dan pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan - Daftar perbekalan - Inventarisasi sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan - Bahan pelaksanaan pembinaan inventarisasi sarana dan prasarana - Pencarian dan Pertolongan

	PP. 05 PP. 05. 00 PP. 05. 01 PP. 05. 02	B. Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan 1. Rencana Pendidikan dan Pelatihan a. Kurikulum dan Silabus b. Evaluasi dan Monitoring 2. Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan a. Penyiapan Tenaga Pencarian dan Pertolongan b. Penyiapan Potensi Pencarian dan Pertolongan 3. Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan a. Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan) b. Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
	  PP. 06 PP. 06. 00 PP. 06. 01 PP. 06. 02	3. Operasi Pencarian dan Pertolongan A. Operasi dan Latihan 1. Perencanaan dan Standardisasi a. Perencanaan dan Evaluasi b. Standardisasi Operasi dan Latihan SAR 2. Penyelenggaraan Operasi SAR a. Pengerahan Potensi SAR b. Pengendalian Operasi SAR c. Evaluasi Operasi 3. Siaga dan Latihan a. Siaga - Laporan harian - Laporan bulanan - Laporan tahunan - Evaluasi b. Latihan - Lokal - Nasional - Internasional
	   PP. 07 PP. 07. 00 PP. 07. 01 PP. 08 PP. 08. 00 PP. 08. 01 PP. 08. 02 PP. 09 PP. 09. 00 PP. 09. 01	B. Komunikasi 1. Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi a. Perencanaan dan Pengembangan Sistem Komunikasi - Analisa Kebutuhan b. Standardisasi dan Evaluasi 2. Operasi Komunikasi a. Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR) b. Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR) c. Registrasi BEACON 3. Inventarisasi dan Pemeliharaan a. Inventarisasi Perangkat Komunikasi b. Pemeliharaan Peralatan Komunikasi
	   PP. 10 PP. 10. 00 PP. 10. 01 PP. 11 PP. 11. 00 PP. 11. 01	C. Data dan Informasi 1. Pengembangan Sistem Informasi a. Perangkat Lunak b. Perangkat Keras 2. Pelayanan Informasi a. Penyajian dan pelayanan Data Informasi b. Laporan dan Pembuatan Dokumentasi (Data Base)

XI. URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No.	Kode Klasifikasi P S T	Jenis Dokumen/Arsip
1	*2*	*3*
XI.	DK.	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	DK. 00 DK. 00. 00 DK. 00. 01	A. KEBIJAKAN BERSIFAT PENGATURAN 1. Kebijakan tentang pendidikan dan kebudayaan meliputi: kurikulum, pendidikan anak usia a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan bahan c. Perumusan kebijakan d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e. Penetapan dalam bentuk NSPK f. Perumusan dan penerapan standar 2. MOU (*Memorandum of Understanding*)
	DK. 01 DK. 01. 00 DK. 01. 01 DK. 01. 02 DK. 01. 03 DK. 01. 04	B. KEBIJAKAN BERSIFAT PENETAPAN 1. Pengkajian dan pengusulan penetapan 2. Penyiapan bahan 3. Perumusan penetapan 4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan 5. Penetapan dalam bentuk keputusan
	DK. 02 DK. 02. 00 DK. 02. 01 DK. 02. 02 DK. 02. 03 DK. 02. 04 DK. 02. 05	C. PEMBINAAN PENDIDIKAN 1. Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal a. Paud 1) Bahan ajar - Alat Permainan Edukatif 2) Pelatihan 3) *Block Grant* 4) Sosialisasi 5) Peringatan hari anak nasional 6) Pameran/publikasi/sosialisasi
	DK. 03 DK. 03. 00 DK. 03. 01 DK. 03. 02 DK. 03. 03 DK. 03. 04 DK. 03. 05	b. Pendidikan masyarakat 1) Penyelenggaraan program - Bahan Ajar - Penyusunan majalah 2) Pemberian bantuan sosial - Penilaian Proposal - Pemberian Bansos 3) Pembinaan program - Temu Koordinasi - Bimtek Program/Pendampingan - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 4) Lomba, penghargaan, dan anugerah 5) Peringatan hari anak internasional 6) Pameran/publikasi/sosialisasi

	DK. 04	c. Kursus dan pelatihan
	DK. 04. 00	1) Penyelenggaraan program - Uji kompetensi (akreditasi) - Penilaian dan Penetapan Kinerja - Pendataan lembaga kursus dan pelatihan - Penguatan kerja sama dengan lembaga/mitra
	DK. 04. 01	2) Pemberian bantuan social
	DK. 04. 02	3) Pembinaan program: bintek, orientasi teknis, dan temu
	DK. 04. 03	4) Standar kursus dan pelatihan - Kurikulum - Bahan ajar
	DK. 04. 04	5) Lomba lembaga kursus berprestasi
	DK. 04. 05	6) Publikasi dan promosi kursus
	DK. 04. 06	7) Sertifikasi
	DK. 05	d. Pendidik dan tenaga pendidikan
	DK. 05. 00	1) Bahan ajar
	DK. 05. 01	2) *Block grant*
	DK. 05. 02	3) Sosialisasi (modul)
	DK. 05. 03	4) Data pendidik dan tenaga pendidikan
		2. Pendidikan Dasar
	DK. 06	a. Sekolah dasar
	DK. 06. 00	1) Kurikulum
	DK. 06. 01	2) Bahan ajar
	DK. 06. 02	3) Pelatihan
	DK. 06. 03	4) *Block grant*
	DK. 06. 04	5) Bimbingan teknis/sosialisasi
	DK. 06. 05	6) Lomba, sayembara, dan festival
	DK. 06. 06	7) Bantuan operasional sekolah (BOS) - Rencana pemberian BOS - Penetapan emberian BOS - Laporan dan Evaluasi
	DK. 06. 07	8) Bantuan siswa miskin - perencanaan - penetapan - laporan dan evaluasi
	DK. 07	b. Sekolah menengah pertama
	DK. 07. 00	1) Kurikulum
	DK. 07. 01	2) Bahan ajar
	DK. 07. 02	3) Pelatihan
	DK. 07. 03	4) *Block grant*
	DK. 07. 04	5) Bimbingan teknis/sosialisasi
	DK. 07. 05	6) Lomba, sayembara, dan festival
	DK. 07. 06	7) Bantuan operasional sekolah (BOS) - Rencana pemberian BOS - Penetapan emberian BOS - Laporan dan Evaluasi
	DK. 07. 07	8) Bantuan siswa miskin - perencanaan - penetapan - laporan dan evaluasi
	DK. 08	c. Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK
	DK. 08. 00	1) Bahan ajar
	DK. 08. 01	2) Petunjuk teknis
	DK. 08. 02	3) *Block grant*
	DK. 08. 03	4) Sosialisasi
	DK. 08. 04	5) Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jamboree
	DK. 08. 05	6) Kurikulum/bahan pembelajaran
	DK. 08. 06	7) Alat bantu pembelajaran

	DK. 08. 07 DK. 08. 08	8) Pendataan 9) Kelembagaan - Unit Kesehatan Sekolah - Pendidikan Jasmani Adaptif - Pendidikan Inklusi - Block Grant - Bimbingan Teknis/sosialisasi - Lomba, Sayembara, Festival, Gebyar
	DK. 09 DK. 09. 00 DK. 09. 01 DK. 09. 02 DK. 09. 03 DK. 09. 04 DK. 09. 05 DK. 09. 06 DK. 09. 07	d. Pendidik dan tenaga pendidik 1) Pendataan dan pemetaan 2) Pembinaan guru dan tenaga pendidik 3) Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi) 4) Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah 5) Penghargaan guru dan tenaga kependidikan 6) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan 7) *Block grant* 8) Bimbingan teknis/sosialisasi
		D. KEBUDAYAAN
	DK. 10 DK. 10. 00 DK. 10. 01 DK. 10. 02 DK. 10. 03	1. Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman a. Registrasi nasional - Pendaftaran dan penetapan - Pengelolaan data b. Pelindungan - Perizinan dan pengamanan - Pemeliharaan dan pemugaran c. Pengembangan dan pemanfaatan - Pengembangan - Pemanfaatan d. Eksplorasi dan dokumentasi - Eksplorasi cagar budaya - Dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum
	DK. 11 DK. 11. 00 DK. 11. 01 DK. 11. 02 DK. 11. 03	2. Pembinaan Kesenian dan Perfilman a. Pembinaan seni pertunjukan - Seni pertunjukan tradisional - Seni pertunjukan tradisional b. Pembinaan seni rupa - Seni rupa murni - Seni rupa terapan c. Pembinaan literasi dan apresiasi film - Literasi - Apresiasi d. Dokumentasi dan publikasi - Dokumentasi seni dan film - Publikasi seni dan film
	DK. 12 DK. 12. 00 DK. 12. 01 DK. 12. 02	3. Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa a. Kelembagaan dan kepercayaan - Pemberdayaan lembaga - Hubungan antar lembaga b. Komunitas kepercayaan - Komunitas adat - Upacara adat c. Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional - Pengetahuan tradisional - Ekspresi budaya tradisional

	DK. 12. 03	d. Lingkungan budaya dan pranata sosial - Lingkungan budaya - Pranata sosial
	DK. 13 DK. 13. 00 DK. 13. 01 DK. 13. 02 DK. 13. 03	4. Sejarah dan Nilai Budaya a. Sejarah 1) Penggalian sumber sejarah 2) Penggalian sumber sejarah b. Pemetaan nilai 1) Pemetaan 2) Klasifikasi c. Verfikasi dan perumusan nilai 1) Verifikasi nilai 2) Perumusan nilai d. Dokumentasi dan publikasi 1) Dokumentasi sejarah dan nilai budaya 2) Publikasi sejarah dan nilai budaya
	DK. 14 BD. 14. 00 DK. 14. 01 DK. 14. 02 DK. 14. 03	5. Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya a. Internalisasi nilai budaya 1) Pengemasan nilai budaya 2) Penanaman nilai budaya b. Kekayaan budaya 1) Pencatatan kekayaan budaya 2) Penetapan kekayaan budaya c. Warisan budaya nasional dan dunia 1) Warisan budaya benda 2) Warisan budaya takbenda d. Diplomasi budaya 1) Diplomasi dalam negeri 2) Diplomasi luar negeri
	DK. 15 DK. 15. 00 DK. 15. 01 DK. 15. 02 DK. 15. 03 DK. 15. 04 DK. 15. 05 DK. 15. 06 DK. 15. 07	E. PERBUKUAN 1. Penyusunan standar mutu buku 2. Pengumpulan naskah 3. Penilaian mutu buku dan pemilihan 4. Persetujuan dan pengesahan naskah 5. Penerbitan dan percetakan 6. Master buku dan naskah yang cetak 7. Distribusi buku 8. Pengembangan naskah
	DK. 16 DK. 16. 00 DK. 16. 01 DK. 16. 02	F. PENILAIAN PENDIDIKAN 1. Penilaian akademik 2. Penilaian non akademik 3. Analisis dan sistem informasi penilaian
	DK. 17 DK. 17. 00	G. PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU 1. Pengembangan profesi pendidik a. Peningkatan kompetensi 1) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal 2) Pengembangan profesi pendidikan dasar 3) Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah

	DK. 17. 01	b. Sertifikasi 1) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal 2) Pengembangan profesi pendidikan dasar 3) Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah 4) Pengembangan profesi pendidik pendidikan 5) tinggi (dosen)
	DK. 18 DK. 18. 00 DK. 18. 01	2. Pengembangan tenaga kependidikan a. Program 1) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik 2) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai b. Evaluasi 1) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik 2) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai
	DK. 19 DK. 19. 00 DK. 19. 01	3. Pengembangan SDM kebudayaan a. Program 1) Peningkatan kompetensi 2) Sertifikasi b. Evaluasi 1) Peningkatan kompetensi 2) Sertifikasi
	DK. 20 DK. 20. 00 DK. 20. 01	4. Penjaminan mutu pendidikan a. Pemetaan mutu 1) Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal 2) Penjaminan mutu pendidikan dasar 3) Penjaminan mutu pendidikan menengah dan pendidikan tinggi b. Sistem informasi 1) Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal 2) Penjaminan mutu pendidikan dasar 3) Penjaminan mutu pendidikan menengah dan pendidikan tinggi
	DK. 21 DK. 22 DK. 23 DK. 24 DK. 25	5. Penyusunan materi/SOP/instrumen/panduan/pedoman a. Proposal/TOK/KAK 6. Penyelenggaraan pelatihan/diseminasi/sosialisasi 7. Penyelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi 8. Penyaluran block grant pascabencana 9. Lomba/sayembara/festival/olimpiade pendidikan nasional internasional
	DK. 26 DK. 26. 00 DK. 26. 01	H. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN Pengembangan Teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film 1. Pengembangan jejaring a. Pengkajian dan perancangan b. Pemeliharaan dan pengendalian
	DK. 27 DK. 27. 00	I. DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN 1. Data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan a. Validasi dan integrasi data peserta didik b. Validasi dan integrasi data peserta pendidik dan tenaga

	DK. 27. 01 DK. 27. 02	2. Data satuan pendidikan dan proses pembelajaran a. Validasi dan integrasi data satuan pendidikan b. Validasi dan integrasi data proses pembelajaran 3. Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik a. Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik anak b. Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dasar dan menengah c. Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik
	DK. 28 DK. 28. 00 DK. 28. 01	J. ARKEOLOGI 1. Program dan kerja sama penelitian a. Program b. Kerja sama 2. Data dan Informasi Penelitian a. Data b. Informasi
	DK. 29	K. MONITORING DAN EVALUASI

XII. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (KB)

No.	Kode Klasifikasi			Jenis Dokumen/Arsip
	P	S	T	
1	*2*			*3*
XII.	PA. KB.			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	PA.			A. URUSAN P3A
	PA. 00 PA. 00. 00 PA. 00. 01 PA. 00. 02 PA. 00. 03 PA. 00. 04 PA. 00. 05			1. Kebijakan Kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan B. Penyiapan kebijakan C. Perumusan kebijakan D. Masukan dan dukungan kebijakan E. Penetapan NSPK
	PA. 01 PA. 01. 00 PA. 01. 01 PA. 01. 02			2. Pengarusutamaan gender Ekonomi, politik sosial dan hukum A. Data gender B. Advokasi dan fasilitasi C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan gender
	PA. 02 PA. 02. 00 PA. 02. 01 PA. 02. 02 PA. 02. 03 PA. 02. 04			3. Perlindungan perempuan (kekerasan, masalah sosial, tenaga kerja, korban perdagangan) A. Data perlindungan perempuan B. Advokasi dan fasilitasi C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan D. Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender E. Analisis dan penyajian informasi gender
	PA. 03 PA. 03. 00 PA. 03. 01 PA. 03. 02			4. Perlindungan anak (hak sipil, masalah sosial, kekerasan terhadap anak, anak A. Data perlindungan anak B. Advokasi dan fasilitasi C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
	PA. 04 PA. 04. 00 PA. 04. 01 PA. 04. 02			5. Tumbuh kembang anak (pendidikan, kesehatan, partisipasi, lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur, pengembangan kota layak anak) A. Data tumbuh kembang anak B. Advokasi dan fasilitasi C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak

	KB	B. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
	KB. 00	1. Kebijakan Kebijakan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
	KB. 00. 00	A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan
	KB. 00. 01	B. Penyiapan kebijakan
	KB. 00. 02	C. Perumus
	KB. 00. 03	D. Masukan dan dukungan kebijakan
	KB. 00. 04	E. Penetapan NSPK
		2. Pengendalian Penduduk
		A. Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
	KB. 01	1. Analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk
	KB. 01. 00	a. pengumpulan dan pengolahan data
	KB. 01. 01	b. evaluasi dan pelaporan
	KB. 02	2. Fasilitas pemaduan kebijakan pengendalian penduduk
	KB. 02. 00	a. Penyiapan fasilitas
	KB. 02. 01	b. Evaluasi dan pelaporan
		B. Perencanaan Pengendalian Penduduk
	KB. 03	1. Profil dan proyeksi penduduk
	KB. 03. 00	a. Data profil dan proyeksi penduduk
	KB. 03. 01	b. Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
	KB. 04	2. Penetapan parameter pengendalian penduduk
	KB. 04. 00	a. Penetapan sasaran parameter
	KB. 04. 01	b. Evaluasi sasaran parameter
	KB. 05	3. Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk
	KB. 05. 00	a. Pemanfaatan profil dan proyeksi
	KB. 05. 01	b. Pemanfaatan parameter
		C. Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi
	KB. 06	1. Bina kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah
	KB. 06. 00	a. Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah
	KB. 06. 01	b. Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana
	KB. 06. 02	c. Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana
	KB. 06. 03	d. Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah
	KB. 06. 04	e. Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
	KB. 06. 05	f. Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
	KB. 07	2. Bina kesertaan keluarga berencana jalur swasta
	KB. 07. 00	a. Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta
	KB. 07. 01	b. Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta
	KB. 07. 02	c. Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta - Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta - Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
	KB. 08	3. Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran khusus
	KB. 08. 00	a. Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan - Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan

		- Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
	KB. 08. 01	b. Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan - Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan - Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
	KB. 08. 02	c. Kesertaan keluarga berencana pria - Peningkatan akses keluarga berencana pria - Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
	KB. 09	4. Kesehatan Reproduksi
	KB. 09. 00	a. Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
	KB. 09. 01	b. Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
	KB. 09. 02	c. Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas
		D. Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga
	KB. 10	1. Bina keluarga Balita dan Anak
	KB. 10. 00	a. Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak - Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak - Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
	KB. 10. 01	b. Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak - Monitoring bina keluarga Balita dan anak - Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
	KB. 11	2. Bina ketahanan remaja
	KB. 11. 00	a. Pelembagaan bina ketahanan remaja - Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan - Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakan
	KB. 11. 01	b. Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja - Monitoring bina ketahanan remaja - Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
	KB. 12	3. Bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
	KB. 12. 00	a. Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan - Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia - Pengembangan Program Bina Ketahanan keluaraga Rentan
	KB. 12. 01	b. Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan - Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluaraga Lansia dan Rentan - Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	KB. 12. 02	c. Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan - Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan - Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan

	KB. 13 KB. 13. 00 KB. 13. 01 KB. 13. 02 KB. 13. 03	4. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga a. Pengembangan program usaha ekonomi keluarga b. Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga c. Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga - Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga - Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga d. Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga
	KB. 14 KB. 14. 00 KB. 14. 01 KB. 14. 02	5. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera a. Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera b. Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera - Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera - Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera c. Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera - Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera - Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan eluarga Sejahtera
	  KB. 15 KB. 15. 00 KB. 15. 01 KB. 15. 02 KB. 16 KB. 17 KB. 17. 00 KB. 17. 01 KB. 17. 02	E. Advokasi dan Informasi 1. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi a. Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi - Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi - Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi b. Advokasi dan pencitraan c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi - Promosi - Sarana produksi media komunikasi - Produk media komunikasi 2. Bina hubungan antar lembaga 3. Bina lini lapangan a. Tenaga lini lapangan - Pengembangan tenaga lini lapangan - Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan b. Bina Institusi Masyarakat Pedesaan - Pengembangan institusi masyarakat pedesaan - Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan c. Mekanisme Operasional lini lapangan - Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan - Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan

XIII. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

No.	Kode Klasifikasi P	S	T	Jenis Dokumen/Arsip
1	2			*3*
XIII.	RP.			PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	RP. 00			A. PERUMUSAN KEBIJAKAN Rencana Pembangunan
	RP. 00. 00			1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan
	RP. 00. 01			2. Penyiapan kebijakan
	RP. 00. 02			3. Perumusan dan penyusunan bahan
	RP. 00. 03			4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
	RP. 00. 04			5. Penetapan dalam bentuk peraturan perundang-undangan
	RP. 01			B. MUSYARAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN/ MUSRENBANG
	RP. 01. 00			1. Musrenbang Kabupaten
	RP. 02			C. PERENCAAAN PEMBANGUNAN OPD
	RP. 02. 00			1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
	RP. 02. 01			2. Rencana Pembangunan Tahunan Renja-OPD
	RP. 02. 02			3. Program Kerja Tahunan a. Usulan Unit Kerja beserta data pendukungnya b. Program kerja tahunan Unit Kerja c. Program Kerja Tahunan OPD
	RP. 02. 03			4. Penetapan/Kontrak Kinerja a. Pimpinan OPD b. Kepala Daerah
	RP. 02. 04			5. Laporan a. Berkala 1) Laporan Triwulan 2) Laporan Semesteran 3) Laporan Tahunan Unit Kerja 4) Laporan Tahunan OPD 5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah b. Laporan Insidental
	RP. 02. 05			6. Evaluasi Program a. Program OPD b. Program unit kerja
	RP. 03			D. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROVINSI
	RP. 04			E. KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROVINSI
	RP. 05			F. PEMANTAUAN, EVALUASI, PENILAIAN DAN PELAPORAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	RP. 06 RP. 06. 00 RP. 06. 01 RP. 06. 02 RP. 06. 03 RP. 06. 04	G. AKSI STRATEGIS DAERAH (FORUM OPD) 1. Rancangan awal perencanaan aksi strategis Daerah 2. Rapat pembahasan rancangan awal dengan OPD 3. Sosialisasi dengan OPD 4. Rancangan akhir per 5. Penetapan perencanaan aksi strategis daerah
	RP. 07 RP. 07. 00 RP. 07. 01	H. PERENCANAAN PENDANAAN PEMBANGUNAN 1. Pendanaan APBN 2. Pendanaan APBD

XIV. URUSAN PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN

No.	Kode Klasifikasi P S T	Jenis Dokumen/Arsip
1	2	*3*
XIV.	PN	PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
	PN. 00	1. Kebijakan Perumusan kebijakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan serta pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi : kelembagaan, sumber daya dan jaringan ilmu.
	PN. 00. 00	A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan
	PN. 00. 01	B. Penyiapan kebijakan
	PN. 00. 02	C. Perumusan kebijakan
	PN. 00. 03	D. Masukan dan dukungan kebijakan
	PN. 00. 04	E. Penetapan NSPK
	PN. 01	2. Penelitian dan pengkajian
	PN. 01. 00	A. Rencana Kerja 1. Master plan/rencana strategis 2. Rencana kerja tahunan : proposal/idea concept paper (ICP) 3. Berkas/kontrak MoU kerjasama/material transfer agreement (MTA) 4. Perijinan penelitian
	PN. 01. 01	B. Administrasi penelitian : surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja, dokumen/formulir pendukung/instruksi, persiapan survey, penggunaan
	PN. 01. 02	C. Pelaksanaan penelitian/pengkajian 1. Prosedur/petunjuk 2. Data primer 3. Log Book 4. Studi kelayakan 5. Instrumen penelitian 6. Pelaksanaan survey 7. Laporan hasil pendataan/survey 8. Analisis/pengolahan data
	PN. 01. 03	D. Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi 1. Laporan hasil penelitian dan hasil luaran 2. Rekomendasi
	PN. 01. 04	E. Hasil penelitian dan pengkajian hasil jasa layanan
	PN. 02	3. Pengembangan dan Inovasi
	PN. 02. 00	1. Rencana kerja
	PN. 02. 01	2. Administrasi pengembangan dan inovasi
	PN. 02. 02	3. Pelaksanaan
	PN. 02. 03	4. Hasil pengembangan/inovasi
	PN. 03	4. Dokumen penerapan / pemanfaatan/ pendayagunaan/ replikasi /prototipe hasil penelitian/pengkajian/perekayasaan/pengembangan/inovasi : masyarakat, dunia industri, pemerintahan
	PN. 04	5. Dokumen penerapan hasil peneliitian/pengkajian/perekayasaan /pengembangan/inovasi masyarakat, dunia industri, pemerintahan
	PN. 05	6. Dokumen pemanfaatan hasil penelitian/pengkajian /perekayasaan/pengembangan/inovasi : masyarakat, dunia industri, pemerintahan

	PN. 06	7. Dokumen pendayagunaan hasil penelitian/pengkajian/ perekayasaan/Pengembangan/inovasi : masyarakat, dunia industri, pemerintahan
	PN. 07	8. Dokumen replikasi / prototipe hasil penelitian/pengkajian/ perekayasaan/pengembangan/inovasi masyarakat, dunia industri, pemerintahan)
	PN. 08	9. Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi
	PN. 09	10. Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	PN. 09. 00	a. Promosi
	PN. 09. 01	b. Pemasyarakatan
	PN. 10	11. Pembinaan penelitian/pengkajian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	PN. 10. 00	a. Pembinaan penelitian/pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi
	PN. 10. 01	b. Pembinaan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	PN. 11	12. Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	PN. 11. 00	a. Jaringan Sistem Nasional Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	PN. 11. 01	b. Jaringan Sistem Nasional Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan
	PN. 11. 02	c. Jaringan Sistem Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	PN. 12	13. Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan
	PN. 12. 00	a. Data dan informasi hasil penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi
	PN. 12. 01	b. Data dan informasi hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
	PN. 12. 02	c. Data dan informasi hasil penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	PN. 13	14. Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu
	PN. 13. 00	a. Penerbitan: jurnal/buletin ilmiah, bahan publikasi khusus
	PN. 13. 01	b. Leaflet dan booklet
	PN. 13. 02	c. Kamus istilah
	PN. 14	15. Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
	PN. 15	16. Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	PN. 15. 00	a. Forum komunikasi penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi
	PN. 15. 01	b. Forum komunikasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
	PN. 15. 02	c. Forum komunikasi penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	PN. 16	17. Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK
	PN. 16. 00	a. Jasa laboratorium pengujian
	PN. 16. 01	b. Jasa teknologi produksi
	PN. 16. 02	c. Jasa stud
	PN. 16. 03	d. Jasa penyewaan peralatan
	PN. 16. 04	e. Jasa perbantuan tenaga ahli/profesi
	PN. 16. 05	f. Jasa sertifikasi/kalibrasi dan sertifikasi
	PN. 16. 06	g. Buku rekaman barang yang diuji/dikalibrasi
	PN. 17	18. Sertifikasi personil peneliti
	PN. 18	19. Akreditasi laboratorium

XV. URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No.	Kode Klasifikasi P S T	Jenis Dokumen/Arsip
1	*2*	*3*
XV.	PK. KA.	PERPSUATAKAAN DAN KEARSIPAN
	PK	I. URUSAN PERPUSTAKAAN
		A. KEBIJAKAN
	PK. 00	Kebijakan Perpustakaan meliputi kebijakan di bidang pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi dan
	PK. 00. 00	1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
	PK. 00. 01	2. Penyiapan Bahan
	PK. 00. 02	3. Perumusan Kebijakan
	PK. 00. 03	4. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan
	PK. 00. 04	5. Penetapan Berbentuk NSPK
		B. PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI
	PK. 01	1. Deposit Bahan Pustaka
	PK. 01. 00	a. Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
	PK. 01. 01	b. Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
	PK. 01. 02	c. Terbitan Internasional dan Regional
	PK. 01. 03	d. Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
	PK. 01. 04	e. Bibliografi dan Katalog
		1) Bibliografi Daerah (BD)
		2) Katalog Induk Daerah (KID)
		3) Katalog Dalam Terbitan (KDT)
	PK. 02	2. Pengembangan Koleksi
	PK. 02. 00	a. Akuisisi
	PK. 02. 01	1) Pembelian
	PK. 02. 02	2) Hibah
	PK. 02. 03	3) Hadiah
	PK. 02. 04	4) Tukar Menukar
	PK. 02. 05	5) Implementasi Undang-Undang KCKR
	PK. 02. 06	6) Terbitan Internal
	PK. 02. 07	7) Pendistribusian bahan pustaka surplus
	PK. 03	8) Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
	PK. 04	b. Pengolahan Bahan Pustaka
		c. Pangkalan Data Katalog Koleksi
	PK. 05	3. Jasa Perpustakaan dan Informasi
	PK. 05. 00	a. Keanggotaan
	PK. 05. 01	b. Sirkulasi
	PK. 05. 02	c. Referensi
	PK. 05. 03	d. Alih aksara, Alih Bahasa dan Kajian Naskah Nusantara
	PK. 06	e. Kerjasama Perpustakaan
	PK. 06. 00	1) MoU
	PK. 06. 01	2) Perjanjian kerjasama
	PK. 06. 02	3) Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional
	PK. 07	f. Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
	PK. 07. 00	1) Pengembangan situs web

	PK. 07. 01 PK. 07. 02 PK. 07. 03 PK. 08 PK. 09 PK. 09. 00 PK. 09. 01 PK. 09. 02 PK. 10 PK. 11 PK. 12	2) Pengembangan kemas ulang informasi multimedia 3) Pengembangan program aplikasi perpustakaan 4) Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital g. Pangkalan Data Layanan Perpustakaan 4. Preservasi Bahan Pustaka a. Konservasi 1) Perawatan Bahan Perpustakaan 2) Perbaikan Bahan Perpustakaan 3) Penjilidan Bahan Perpustakaan b. Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto) c. Transformasi Digital d. Kurasi Digital
	   PK. 13 PK. 13. 00 PK. 13. 01 PK. 13. 02 PK. 13. 03 PK. 14 PK. 14. 00 PK. 14. 01 PK. 14. 02 PK. 15 PK. 15. 00 PK. 15. 01 PK. 16 PK. 17 PK. 17. 00 PK. 17. 01 PK. 17. 02 PK. 17. 03 PK. 17. 04 PK. 17. 05 PK. 18 PK. 18. 00 PK. 18. 01 PK. 18. 02 PK. 18. 03 PK. 19 PK. 20 PK. 21 PK. 22	C. SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN 1. Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca a. Pengembangan Perpustakaan 1) Perpustakaan Umum 2) Perpustakaan Khusus 3) Perpustakaan Sekolah 4) Perpustakaan Perguruan Tinggi b. Akreditasi Perpustakaan 1) Permintaan akreditasi 2) Pemberian akreditasi 3) Pangkalan Data Perpustakaan yang di akreditasi c. Pangkalan Data Perpustakaan 1) Nomor Pokok Perpustakaan 2) Perpustakaan Berbasis Wilayah d. Pemasyarakatan Minat Baca e. Organisasi Perpustakaan 1) Forum Perpustakaan Umum 2) Forum Perpustakaan Khusus 3) Forum Perpustakaan Sekolah 4) Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi 5) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca 6) Organisasi Perpustakaan Lainnya f. Pengembangan Pustakawan 1) Sertifikasi Tenaga Perpustakaan 2) Pembinaan Tenaga Perpustakaan 3) Penerbitan Jurnal 4) Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan a. Tim Penilai Instansi/Perpustakaan Nasional b. Tim Penilai Pusat 5) Pemasyarakatan 6) Evaluasi Tenaga Perpustakaan 7) Pangkalan data Tenaga Perpustakaan 8) Pangkalan data Tim Penilai Pustakawan

	KA	II. URUSAN KEARSIPAN
		A. KEBIJAKAN
	KA. 00	Kebijakan tentang Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip.
	KA. 00. 00	1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan
	KA. 00. 01	2. Penyiapan kebijakan
	KA. 00. 02	3. Perumusan kebijakan
	KA. 00. 03	4. Penetapan NSPK
		B. PENGELOLAAN KEARSIPAN
	KA. 01	1. Pengelolaan Arsip Dinamis
	KA. 01. 00	a. Penciptaan 1) Pencatatan - Buku Agenda - Kartu Kendali - Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi 2) Pendistribusian
	KA. 01. 01	b. Penggunaan 1) Pengklasifikasian Pengamanan dan Akses Arsip 2) Peminjaman
	KA. 01. 02	c. Pemeliharaan 1) Pemberkasan - Daftar arsip aktif (daftar berkas dan isi berkas) 2) Penataan Arsip Inaktif - Pengaturan fisik arsip - Pengolahan informasi arsip - Penyusunan daftar arsip inaktif 3) Penyimpanan arsip - Skema penyimpanan arsip - Pengamanan 4) Alih Media - Kebijakan alih media - Autentikasi - Berita acara - Daftar arsip yang alih media 5) Program Arsip vital - Identifikasi - Perlindungan dan Pengamanan - Penyelamatan dan pemulihan
	KA. 01. 03	d. Autentikasi Arsip Dinamis 1) Pembuktian Autentisitas 2) Pendapat tenaga ahli 3) Pengujian 4) Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan Pencipta Arsip
	KA. 01. 04	e. Penyusutan 1) Pemindahan Arsip Inaktif - Berita acara Pemindahan - Daftar arsip yang di pindahkan 2) Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna - Panitia Penilai - Penilaian Panitia Penilai - Permintaan Persetujuan (Kepala ANRI, Kepala Lembaga Kearsipan) - Penetapan arsip yang dimusnahkan - Berita Acara Pemusnahan Arsip - Daftar Arsip yang Dimusnahkan

		3) Penyerahan arsip statis - Pembentukan Panitia Penilai - Notulen Rapat Panitia - Surat Pertimbangan Panitia Penilai - Surat Persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan - Surat Pernyataan Autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan dari pencipta arsip - Keputusan Penetapan Penyerahan - Berita Acara Penyerahan Arsip - Daftar Arsip yang diserahkan
	KA. 01. 05	f. Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis 1) Data Base Pengelolaan Arsip Aktif 2) Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
	KA. 02 KA. 02. 00	2. Pengelolaan Arsip Statis a. Akuisisi 1) Monitoring fisik dan daftar 2) Verifikasi terhadap daftar arsip 3) Menetapkan status arsip statis 4) Persetujuan untuk Penyerahan 5) Penetapan arsip yang diserahkan 6) Berita Acara Penyerahan Arsip 7) Daftar arsip yang diserahkan
	KA. 02. 01	b. Sejarah Lisan 1) Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan 2) Hasil Wawancara Sejarah Lisan - Berita acara wawancara Sejarah Lisan - Laporan Kegiatan - Hasil wawancara (Kaset atau CD) dan transkrip
	KA. 02. 02	c. Daftar Pencarian Arsip Statis 1) Pengumuman 2) Akuisisi daftar pencarian arsip statis
	KA. 02. 03	d. Penghargaan dan Imbalan
	KA. 02. 04	e. Pengolahan 1) Menata Informasi 2) Menata Fisik 3) Menyusun Sarana Bantu Temu Balik - Guide - Daftar Arsip Statis - Inventaris Arsip Statis
	KA. 02. 05	f. Preservasi 1) Preventif - Penyimpanan - Berita acara Alih Media - Daftar arsip yang dialih mediakanPerencanaan dan Penanggulangan Bencana 2) Kuratif - Perawatan Arsip 3) Laporan hasil Pengujian Mutu Preservasi
	KA. 02. 06	g. Autentikasi Arsip Statis 1) Pembuktian Autentisitas 2) Pendapat tenaga ahli 3) Pengujian 4) Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan
	KA. 02. 07	h. Akses Arsip Statis 1) Layanan Arsip 2) Penerbitan Naskah Sumber - Administrasi dan proses penyusunan - Hasil naskah sumber arsip 3) Pameran arsip

	KA. 03 KA. 03. 00 KA. 03. 01 KA. 03. 02	3. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN a. Perencanaan menjadi simpul jaringan SIKN melalui JIKN b. Pendidikan dan pelatihan materi simpul jaringan SIKN melalui JIKN c. Pengelolaan informasi arsip simpul jaringan SIKN melalui JIKN.
	KA. 04 KA. 04. 00 KA. 04. 01 KA. 04. 02	4. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana a. Perencanaan pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana b. Pelaksanaan pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana c. evaluasi dan pelaporan pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana.
	KA. 05 KA. 05. 00 KA. 05. 01 KA. 05. 02	5. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran a. Persiapan Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan, b. Pelaksanaan Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan, c. Evaluasi dan Pelaporan Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau
	KA. 06 KA. 06. 00 KA. 06. 01 KA. 06. 02	6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan a. Permohonan izin pengunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan b. Kajian/Telaah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan c. Penolakan/Pemberian izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan.

XVI. URUSAN PARIWISATA

No.	Kode Klasifikasi P	S	T	Jenis Dokumen/Arsip
1	2			*3*
XVI.	PE			PARIWISATA
	PE. 00			A. KEBIJAKAN Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi kebijakan dibidang Pengembangan
	PE. 00. 00			1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
	PE. 00. 01			2. Penyiapan Bahan
	PE. 00. 02			3. Perumusan Kebijakan
	PE. 00. 03			4. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan
	PE. 00. 04			5. Penetapan Berbentuk NSPK
	PE. 01			B. PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
	PE. 01. 00			1. Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata a. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata) b. Kawasan c. Pengembangan Zona Kreatif 1) Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya 2) Zona Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK d. Investasi Pariwisata 1) Pengembangan Potensi Investasi 2) Promosi Investasi
	PE. 01. 01			2. Pengembangan Daya Tarik Wisata a. Bimtek Daya Tarik Wisata b. Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Wisata c. Pengembangan daya tarik wisata kota pusaka d. Penilaian Kelayakan Tugas Pembantuan e. Penghargaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Cipta Award)
	PE. 01. 02			3. Industri Pariwisata a. Sarana Pariwisata 1) usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata 2) penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa b. Jasa Pariwisata: 1) jasa transportasi wisata 2) jasa informasi pariwisata 3) penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi 4) jasa perjalanan wisata 5) jasa konsultan pariwisata 6) jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan 7) insentif 8) konvensi 9) pameran c. Pengembangan Produk dan Pelayanan
	PE. 01. 03			4. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata a. Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata b. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa c. Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat

	PE. 01. 04	5. Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event a. Pengembangan Wisata Kulier dan Belanja b. Pengembangan Rekreasi dan Hiburan 1) Pengembangan Wisata Spa dan Kesehatan 2) Pengembangan Wisata Olah Raga c. Pengembangan Wisata Alam dan Budaya d. Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif dan Event
	PE. 02 PE. 02. 00	C. PEMASARAN PARIWISATA 1. Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata a. Informasi Pasar Dalam Negeri 1) Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri 2) Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri b. Informasi Pasar Luar Negeri 1) Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri 2) Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri c. Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata 1) Hubungan Lembaga Pariwisata 2) Widya Wisata d. Perancangan Pemasaran Pariwisata 1) Perancangan Pemasaran Dalam Negeri 2) Perancangan Pemasaran Luar Negeri
	PE. 02. 01	2. Promosi Pariwisata Luar Negeri a. Wilayah ASEAN b. Wilayah Asia
	PE. 02. 02	3. Promosi Pariwisata Dalam Negeri
	PE. 02. 03	4. Pencitraan Indonesia a. Strategi Pencitraan Indonesia 1) Perencanaan Pencitraan Indonesia 2) Pemantauan dan Evaluasi Pencitraan Indonesia b. Komunikasi Media Cetak, Media Elektronik dan Digital, dan Media Ruang 1) Promosi Media 2) Sarana dan Distribusi Media c. Kerjasama dan Kemitraan 1) Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Pemerintah 2) Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Non-Pemerintah
	PE. 02. 04	5. Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus a. Promosi KIE Korporasi 1) Korporasi Dalam Negeri 2) Korporasi Luar Negeri b. Promosi KIE Pemerintah dan Non Pemerintah 1) Pemerintah 2) Non Pemerintah c. Promosi Minat Khusus 1) Wisata Bahari 2) Wisata Non Bahari 6. Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif a. Program dan Evaluasi b. Penyelenggaraan dan Kerjasama
	PE. 03 PE. 03. 00	D. KEBUDAYAAN 1. Pelestarian cagar budaya dan permuseuman a. Registrasi nasional 1) Pendaftaran dan penetapan 2) Pengelolaan data

		b. Pelindungan 1) Perizinan 2) Pemeliharaan dan pemugaran 3) Pengembangan dan pemanfaatan c. Eksplorasi dan dokumentasi 1) Eksplorasi cagar budaya 2) Dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum
	PE. 03. 01	2. Pembinaan kesenian dan perfilman a. Pembinaan seni pertunjukan 1) Seni pertunjukan tradisional 2) Seni pertunjukan non tradisional b. Pembinaan seni rupa 1) Seni rupa murni 2) Seni rupa terapan c. Pembinaan literasi dan apresiasi film 1) Literasi 2) Apresiasi d. Dokumentasi dan publikasi 1) Dokumentasi seni dan film 2) Publikasi seni dan film
	PE. 03. 02	3. Pembinaan a. Kelembagaan dan kepercayaan 1) Pemberdayaan lembaga 2) Hubungan antar lembaga b. Komunitas kepercayaan 1) Komunitas adat 2) Upacara adat c. Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional 1) Pengetahuan tradisional 2) Ekspresi budaya tradisional d. Lingkungan budaya dan pranata sosial 1) Lingkungan budaya 2) Pranata sosial
	PE. 03. 03	4. Sejarah dan nilai budaya a. Sejarah 1) Penggalian sumber sejarah 2) Penulisan sumber sejarah b. Pemetaan nilai 1) Pemetaan 2) Klasifikasi c. Verfikasi dan perumusan nilai 1) Verifikasi nilai 2) Perumusan nilai d. Dokumentasi dan publikasi 1) Dokumentasi sejarah dan nilai budaya 2) Publikasi sejarah dan nilai budaya
	PE. 03. 04	5. Internalisasi nilai dan diplomasi budaya a. Internalisasi nilai budaya 1) Pengemasan nilai budaya 2) Penanaman nilai budaya b. Kekayaan budaya 1) Pencatatan kekayaan budaya 2) Penetapan kekayaan budaya c. Warisan budaya nasional dan dunia 1) Warisan budaya benda 2) Warisan budaya takbenda d. Diplomasi budaya 1) Diplomasi dalam negeri 2) Diplomasi luar negeri

XVII. URUSAN SOSIAL

No.	Kode Klasifikasi P	S	T	Jenis Dokumen/Arsip
1	*2*			*3*
XVII.	SO			SOSIAL
	SO. 00			1. Kebijakan Kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan:
	SO. 00. 00			a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
	SO. 00. 01			b. Penyiapan Kebijakan
	SO. 00. 02			c. Perumusan Kebijakan
	SO. 00. 03			d. Masukan dan Dukungan Kebijakan
	SO. 00. 04			e. Penetapan NSPK
				2. Rehabilitasi Sosial
	SO. 01			a. Kesejahteraan Sosial Anak
	SO. 01. 00			1) Kesejahteraan Sosial Anak Balita a) Pengangkatan anak b) Pengasuhan anak
	SO. 01. 01			2) Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar a) Pengasuhan anak Dalam Keluarga b) Pengasuhan Anak Dalam Lembaga
	SO. 01. 02			3) Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum a) Perlindungan dan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum b) Pengembangan remaja
	SO. 01. 03			4) Kesejahteraan Sosial AnakDengan Kecacatan a) Kelembagaan dan Penguatan Keluarga b) Aksessibilitas Anak Dengan Kecacatan
	SO. 01. 04			5) Kesejahteraan Sosial Anak yang membutuhkan perlindungan Khusus a) Kelembagaan Perlindungan Anak b) Advokasi dan perlindungan khusus
	SO. 02			b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia
	SO. 02. 00			1) Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Disabilitas a) Dalam Panti b) Luar panti
	SO. 02. 01			2) Kelembagaan dan Advokasi Sosial
	SO. 02. 02			3) Asistensi dan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial
	SO. 03			c. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
	SO. 03. 00			1) Gelandangan, Pengemis dan Pemulung
	SO. 03. 01			2) Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (Trafficking)
	SO. 03. 02			3) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan a) Penyiapan b) Reintegrasi
	SO. 03. 03			4) Pelayanan Sosial orang dengan HIV/AIDS dan Kelompok Minoritas
	SO. 04			d. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalagunaan NAPZA
	SO. 04. 00			1) Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan pengembangan peran
	SO. 04. 01			2) Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Dalam Istitusi
	SO. 05			e. Pelayanan sosial lanjut usia
	SO. 05. 00			1) Pelayanan sosial dalam dan luar panti
	SO. 05. 01			2) Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
	SO. 05. 02			3) Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan

		3. Perlindungan dan Jaminan Sosial
	SO. 06	a. Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial
	SO. 06. 00	1) Bimbingan dan Standarisasi
	SO. 06. 01	2) Perizinan dan Pengumpulan
	SO. 07	b. Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
	SO. 07. 00	1) Perlindungan sosial korban tindak kekerasan meliputi pemulihan sosial, pemulangan dan reintegrasi
	SO. 07. 01	2) Perlindungan sosial pekerja migran meliputi penampungan dan pemulihan sosial, pemulangan dan reintegrasi
	SO. 07. 02	3) Evaluasi dan pelaporan meliputi kerjasama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
	SO. 08	c. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
	SO. 08. 00	1) Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
	SO. 08. 01	2) Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
	SO. 08. 02	3) Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi social
	SO. 08. 03	4) Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
	SO. 09	d. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
	SO. 09. 00	1) Kesiapsiagaan dan mitigasi
	SO. 09. 01	2) Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi social
	SO. 09. 02	3) Pemulihan sosial dan penguatan social
	SO. 09. 03	4) Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
	SO. 10	e. Jaminan Sosial
	SO. 10. 00	1) Seleksi dan verifikasi
	SO. 10. 01	2) Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
	SO. 10. 02	3) Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
	SO. 10. 03	4) Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
		4. Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan
	SO. 11	a. Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial
	SO. 11. 00	1) Ketahanan keluarga meliputi bimbingan kesejahteraan sosial keluarga, konsultasi dan advokasi keluarga
	SO. 11. 01	2) Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
	SO. 11. 02	3) Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi social
	SO. 11. 03	4) Kemitraan dunia usaha meliputi kerjasama, bimbingan social
	SO. 11. 04	5) Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
	SO. 12	b. Pemberdayaan komunitas adat terpencil
	SO. 12. 00	1) Persiapan pemberdayaan meliputi identifikasi, analis
	SO. 12. 01	2) Pemberdayaan sumber daya manusia meliputi pemberdayaan sumberdaya manusia adat terpencil, pemberdayaan pendamping sosial komunitas adat terpencil
	SO. 12. 02	3) Penggalian dan pengembangan potensi meliputi penggalian potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan, pengembangan potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan
	SO. 12. 03	4) Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil meliputi keserasian sosial, penguatan sosial
	SO. 12. 04	5) Kerjasama kelembagaan meliputi kerjasama kelembagaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

	SO. 13	a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
	SO. 13. 00	1) a) Keserasian sosial
		b) Penguatan sumber daya
	SO. 13. 01	2) Tanggap darurat
		a) Bantuan darurat
		b) Advokasi Sosial Pemilihan Sosial
	SO. 13. 02	3) Pemilhan Sosial
		a) Penguatan Sosial
		b) Reintegrasi Sosial Kerjasama
	SO. 13. 03	4) Kerjasama
		a) Kerjasama pemerintah
		b) Kerjasama Non pemerintah
	SO. 14	b. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kesiapsiagaan Dan Mitigasi:
	SO. 14. 00	1) Tanggap Darurat
		a) Bantuan darurat
		b) Advokasi Sosial
	SO. 14. 01	2) Pemulihan Sosial dan Penguatan Sosial: Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus
	SO. 14. 02	3) a) Kelembagaan Perlindungan Anak
		b) Advokasi perlindungan Khusus
	SO. 15	c. Jaminan Sosial Keluarga (PKH) Seleksi dan Verifikasi
	SO. 15. 00	1) Kelembagaan dan Advokasi Sosial
	SO. 15. 01	2) a) Pendampingan
		b) Penyaluran Kerjasama
	SO. 15. 02	3) a) Kerjasama Pemerintah
		b) Kerjasama Non Pemerintah
		4. Pemberdayaan Sosial
	SO. 16	a. Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial
	SO. 16. 00	1) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), meliputi:
		a) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
		b) Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga (TKSK)
		c) Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
	SO. 16. 01	2) Tenaga kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial
	SO. 16. 02	3) Kemitraan Dunia Usaha, meliputi:
		a) Kerjasama
		b) Bimbingan Sosial
	SO. 16. 03	4) Karang Taruna
		a) Kelembagaan
		b) Pengembangan Fasilitas
	SO. 17	b. Pemberdayaan Komunikasi Adat Terpencil
	SO. 17. 00	1) Persiapan Pemberdayaan, meliputi:
		a) Identifikasi
		b) Analisis
	SO. 17. 01	2) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, meliputi:
		a) Pemberdayaan Sumber daya manusia adat terpencil
		b) Pemberdayaan Pendamping Sosial adat Terpencil Penggalian dan
	SO. 17. 02	3) Pengembangan Potensi, meliputi:
		a) Pengendalian Potensi Sosial , Budaya, Ekonomi, dan Lingkungan
		b) Pengembangan Potensi Sosial, Budaya, Ekonomi dan Lingkungan
	SO. 17. 03	4) Keserasian Dan Penguatan Komunikasi adat terpencil
		a) Keserasian sosial
		b) Penguatan Sosial Kerjasama Kelembagaan

	SO. 17. 04	5) Kerjasama a) Kerjasama Kelembagaan b) Penguatan Sosial
	SO. 18	c. Kepahlawanan, Kesetiakawanan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial
	SO. 18. 00	1) Penghargaan dan kesejahteraan Keluarga Pahlawan meliputi: a) Pengangkatan b) Penghargaan c) Kesejahteraan
	SO. 18. 01	2) Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, meliputi: a) Identifikasi b) Pemberdayagunaan
	SO. 18. 02	3) Pengembangan Kesetiakawanan Sosial, meliputi: a) Penggalian Nilai b) Pelestarian Nilai
	SO. 18. 03	4) Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional a) Pengelolaan Taman Makam Nasional Utama b) Standarisasi Taman Makam Pahlawan Dan Makam Pahlawan
	SO. 18. 04	5) Pengelolaan Sumber Dana Sosial a) Bimbingan dan standarisasi b) Pengumpulan
	SO. 19	5. Penanganan Fakir Miskin
	SO. 19. 00	a. Identifikasi dan Analisa 1) Pengembangan Kapasitas a) Pengembangan Kapasitas Sumber daya Manusia b) Pengembangan kapasitas Usaha 2) Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksibilitas a) Advokasi Sosial b) Pengembangan Aksebilitas
	SO. 19. 01	b. Penanganan Fakir Miskin Perdesaan 1) Identifikasi dan Analisa 2) Pengembangan Kapasitas, meliputi: a) Pengembangan Kapasitas Sumber daya Manusia b) Pengembangan kapasitas Usaha 3) Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksibilitas: a) Advokasi Sosial b) Pengembangan Aksebilitas
	SO. 19. 02	c. Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 1) Identifikasi dan Analisa 2) Pengembangan Kapasitas, meliputi: a) Pengembangan Kapasitas Sumber daya Manusia b) Pengembangan kapasitas Usaha 3) Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksibilitas: a) Advokasi Sosial b) Pengembangan Aksebilitas

XVIII. URUSAN KESEHATAN

No.	Kode Klasifikasi P S T	Jenis Dokumen/Arsip
1	2	*3*
XVIII.	KS	KESEHATAN
	KS. 00 KS. 00. 00 KS. 00. 01 KS. 00. 02 KS. 00. 03 KS. 00. 04	A. PERUMUSAN KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Bina Upaya Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan: 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan bahan 3. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 4. Pengumpulan dan pengolahan data 5. Penetapan dalam bentuk nspk dan standarisasi
	KS. 01 KS. 01. 00 KS. 01. 01 KS. 01. 02 KS. 01. 03 KS. 01. 04 KS. 01. 05 KS. 01. 06 KS. 01. 07 KS. 01. 08 KS. 01. 09 KS. 01. 10 KS. 01. 11 KS. 01. 12 KS. 01. 13	B. UPAYA KESEHATAN 1. Upaya Kesehatan Dasar a. Pelayanan Kedokteran Keluarga b. Praktik Klinis Bagi Dokter di Fanyaskes Primer c. Pelaksanaan Kesehatan Primer d. Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas e. Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit f. ICD 10, Destistry & Stomatology g. Infeksi Menular Lewat Tranfusi Darah h. Penyakit Mulut di Tingkat Primer i. Pembiayaan Darah j. Penggunaan Darah Rasional k. Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Darah l. Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, sangat terpencil dan kepulauan m. Akreditasi Puskesmas n. Puskesmas Berprestasi
	KS. 02 KS. 02. 00 KS. 02. 01 KS. 02. 02 KS. 02. 03	2. Upaya Kesehatan Rujukan a. Pelayanan Kesehatan Rujukan 1) Rumah Sakit Bergerak 2) Rumah Sakit Pratama 3) Rumah Sakit Publik 4) Rumah Sakit Privat 5) Rumah Sakit Khusus b. Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK) c. Pelayanan Rumah Sakit Privat 1) Akses Pelayanan SPGDT Call 119 2) Akses Pelayanan Rekayasa Jaringan dan Sel Punca 3) Pelayanan Geriartri 4) Pelayanan Medical Tourism 5) Pelayanan Hyperbarik d. Pelayanan 1) Rumah Sakit Rujukan Regional Jejaring Pelayanan Kanker 2) Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumah Sakit Rujukan Regional 3) Pencegahan Froud di Rumah Sakit

	KS. 02. 04	e. Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan 1) Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan 2) Biaya Klaim Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari Luar Negeri
	KS. 02. 05	f. Badan Pengawas di Rumah Sakit
	KS. 02. 06	g. Badan Pengawas di Rumah Sakit
	KS. 03	3. Keperawatan dan Keteknisian Medik
	KS. 03. 00	a. Pelayanan Keperawatan Dasar
	KS. 03. 01	b. Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit
	KS. 03. 02	c. Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
	KS. 03. 03	d. Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
	KS. 03. 04	e. Bina Pelayanan Kebidanan
	KS. 03. 05	f. Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik
	KS. 04	4. Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
	KS. 04. 00	a. Mikrobiologi dan Imunologi 1) Laboratorium Kesehatan 2) Laboratorium Klinik 3) Laboratorium Puskesmas 4) Laboratorium Mikrobiologi Kultur
	KS. 04. 01	b. Patologi dan Toksikologi 1) PNPME 2) Sarana Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)
	KS. 04. 02	c. Radiologi 1) Pelayanan Radiologi 2) Dosis Radiasi Nasional 3) Radiologi, Radioterapi dan Kedokteran Nuklir 4) Radioterapi di Rumah Sakit 5) Telemedicine 6) Radiologi Diagnostik 7) Teleradiologi
	KS. 04. 03	d. Perijinan dan Sertifikasi 1) Perijinan Pelayanan Radiologi 2) Sertifikasi Peningkatan Kapabilitas
	KS. 04. 04	e. Sarana dan Prasarana Kesehatan 1) Prasarana Bangunan Rumah Sakit Kelas C 2) Prasarana Ruang Gawat Darurat 3) Prasarana Ruang Operasi 4) Prasarana Ruang Perawatan Intensif 5) Prasarana Ruang Rawat Inap 6) Prasarana Ruang Rehabilitasi Medik 7) Prasarana Ruang Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD) 8) Prasarana Ruang Yang Aman dalam Situasi Darurat Dan Bencana 9) Prasarana Instalasi Penyediaan Air Bersih untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan 10) Prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan 11) Prasarana Rumah Sakit Keselamatan Jiwa 12) Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Gas Medik Dan Vakum Medik 13) Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Tata Udara 14) Prasarana Rumah Sakit Sistem Proteksi Kebakaran Aktif
	KS. 04. 05	f. Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1) Kalibrasi BPFK/LPFK/UPFK 2) Kalibrasi Rumah Sakit

		3) Kalibrasi Puskesmas 4) Pemeliharaan Peralatan kesehatan Rumah Sakit 5) Pemeliharaan Peralatan kesehatan Puskesmas
	KS. 04. 06	g. Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) 1) ASPAK Rumah Sakit 2) ASPAK Puskesmas 3) ASPAK Dinas Kesehatan Kabupaten
	KS. 05	5. Kesehatan Jiwa
	KS. 05. 00	a. Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1) Kesehatan Jiwa di Desa Siaga 2) Kegawatdaruratan Psikiatrik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 3) Promosi Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer
	KS. 05. 01	b. Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1) Layanan Unggulan di RS Jiwa 2) Rehabilitasi Psikososial di RS Jiwa 3) Indikator Mutu RS Jiwa 4) Mutu Layanan Jiwa di RS Jiwa dan RSUD sesuai Penyelenggaraan RS
	KS. 05. 02	c. Etikolegal dan Asesmen 1) Penanggulangan Penelantaran dan Pemasungan Serta Penanganan Salah 2) Visum Et Repertum
	KS. 05. 03	d. Pencegahan 1) Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) 2) Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gangguan Penggunaan Alkohol 3) Wajib Lapor Pecandu Narkotika 4) Pencegahan Masalah Akibat Penggunaan Tembakau 5) Rehabilitasi Medis terkait Hukum
	KS. 05. 04	e. Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko 1) Kesehatan Jiwa Di Sekolah 2) Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial Penanggulangan Bencana 3) Penanggulangan Autisme 4) Kesehatan Jiwa Pada Kelompok Berisiko 5) Psikologi Awal (PFA) Bagi Petugas Siaga Bencana
		C. PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
	KS. 06	1. Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra
	KS. 06. 00	a. Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB) 1) Difteri 2) Polio 3) Penyelenggaraan Kegiatan Survei Pre TAS filariasis 4) Surveilans influenza 5) Keracunan Pangan
	KS. 06. 01	b. Imunisasi 1) Pekan Imunisasi Nasional 2) Coldchain Bagi Petugas Imunisasi 3) Introduksi imunisasi DPT-HB-HIB (Pentavalen) pada bayi dan Balita 4) Imunisasi bagi Petugas Kesehatan 5) Imunisasi di Daerah Sulit 6) Imunisasi TT bagi wanita usia subur(WUS) 7) Imunisasi bagi masyarakat umum 8) Vaksin dan serum program imunisasi, Pencanangan vaksin baru DPT-HIB-Hib 9) Imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT, DPT, Pertusis, Tetanus dan HIB B/

	KS. 06. 02	c. Kesehatan Matra 1) Mudik Sehat 2) Kesehatan bagi Penumpang Darat, Penumpang Kapal Laut dan Penumpang Pe 3) Kesehatan Migran 4) Upaya Kesehatan Penyelaman dan Hyperbarik 5) Penanggulangan Kesehatan akibat gangguan Kamtibmas 6) Kesehatan Transmigrasi bagi tenaga kesehatan
	KS. 07 KS. 07. 00 KS. 07. 01 KS. 07. 02 KS. 07. 03 KS. 07. 04	2. Pengendalian Penyakit Menular Langsung a. Pengendalian Tuberkulosis 1) Pengendalian Penyakit TB 2) TB Multi Drug Resitance, TB, DOTS, WARSOR TB, TB Anak, TB HIV, 3) Laboratorium TB b. Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual 1) Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) / Integrated Bio-Behavioural 2) Human Immuno Deficiency Virus (HIV) 3) Infeksi Menular Seksual (IMS), Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), 4) Obat Anti Retro Viral (ARV) dan reagen tes HIV c. Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut 1) Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS CoV) 2) Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) d. Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan 1) Diare 2) Tifoid 3) Hepatitis e. Pengendalian Kusta dan Frambusia 1) Kusta 2) Frambusia 3) Aliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANEK)
	KS. 08 KS. 08. 00 KS. 08. 01 KS. 08. 02 KS. 08. 03 KS. 08. 04	3. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang a. Pengendalian Malaria 1) Kelambu berinsektisida (LLINs) 2) Eliminasi malaria 3) Crosscheker mikroskopis malaria b. Pengendalian Arbovirosisi 1) DBD 2) Chikungunya 3) Ebola c. Pengendalian Zoonosis 1) Penyakit flu burung 2) Vaksin Anti Rabies (VAR) baru 3) Penyakit Pes 4) Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.1) d. Pengendalian Filariasis dan Kecacingan 1) Filariasis 2) Kecacingan 3) Schistosomiasis e. Pengendalian Vektor

	KS. 09 KS. 09. 00 KS. 09. 01 KS. 09. 02 KS. 09. 03 KS. 09. 04	4. Pengendalian Penyakit Tidak Menular a. Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah 1) Penyakit Jantung 2) Penyakit Pembuluh darah 3) Penyakit Hipertensi 4) Penyakit Stroke b. Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik 1) Penyakit Diabetes Mellitus 2) Penyakit gangguan Metabolik 3) Penyakit gangguan Tiroid 4) Gangguan Obesitas c. Pengendalian Penyakit Kanker d. Pengendalian Penyakit Kronis dan Generatif 1) Penyakit Akibat produk tembakau 2) Asma, Lupus, Thalassemia e. Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan 1) Pengendalian Cidera 2) Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas 3) Penanganan Kesehatan akibat Tindak Kekerasan
	KS. 10 KS. 10. 00 KS. 10. 01 KS. 10. 02 KS. 10. 03 KS. 10. 04	5. Penyehatan Lingkungan a. Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar 1) Pengawasan Kualitas Air Minum 2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat b. Penyehatan Pemukiman dan Tempat-Tempat Umum 1) Higiene sanitasi dan Bangunan Umum 2) Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan 3) Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum c. Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat 1) Penanggulangan kedaruratan bidang Kesehatan Lingkungan 2) Fasilitas Kesehatan Masyarakat di daerah terpencil perbatasan 3) Pelabuhan Sehat, Pasar Sehat, dan Kota Sehat 4) Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar d. Higiene Sanitasi Pangan 1) Makanan Jajanan 2) Restoran/Rumah Makan 3) Jasa Boga 4) Depot Air Minum e. Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi 1) Medis Fasyankes 2) Limbah Medis (Free Mercury) 3) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) 4) Pengamanan Dampak kesehatan radiasi non pengion
	KS. 11 KS. 11. 00	6. Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan a. Pengembangan Teknologi dan Laboratorium 1) Laboratorium Pengendali Penyakit 2) Laboratorium Kesehatan Lingkungan 3) Laboratorium Kesehatan Matra 4) Model dan Teknologi Tepat Guna 5) Uji kendali mutu dan kalibrasi 6) Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan pada instalasi

	KS. 12 KS. 12. 00 KS. 12. 01	7. Sertifikasi Sanitasi Kesehatan dan Pengujian Kesehatan a. Ship Sanitation 1) Ship Sanitation Control Exemption of Certificate (SSCEC) 2) Ship Sanitation Control of Certificate (SSCC) 3) Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K Kapal b. Sertifikat 1) Health Certificate 2) International Certificate of Vacination 3) Surat Keretangan Pengujian Kesehatan Nahkoda/Pilot dan Anak Buah Kapal. 4) Sertifikat Air Bersih 5) Sertifikat Penyelenggaraan Perusahaan Fumigasi di Kapal 6) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga 7) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan 8) Rekomendasi hasil uji laboratorium rujukan
	  KS. 13 KS. 13. 00 KS. 13. 01 KS. 13. 02 KS. 13. 03 KS. 13. 04	D. GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK a) Gizi 1. Gizi Makro a. Gerakan b. Pemantauan pertumbuhan Anak (Pos Yandu) 2. Gizi Mikro a. Upaya b. Manajemen Taburia c. Upaya penanggulangan masalah gizi mikro lainnya 3. Gizi Klinik dan Dietetik a. Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi b. Tatalaksana Anak Gizi Buruk c. Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih 4. Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan a. Makanan Pendamping ASI b. ASI Eksklusif c. Pedoman Gizi Seimbang d. Makanan Bayi dan Anak e. Buffer Stock Makanan Pendamping ASI f. Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Kurang g. Makanan Tambahan Anak Sekolah 5. Kewaspadaan Gizi a. Surveilans Gizi b. Epidemiologi Kasus Gizi Buruk c. Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana d. Jejaring Informasi Pangan dan Gizi
	KS. 14 KS. 14. 00 KS. 14. 01 KS. 14. 02	b) Kesehatan Ibu 1. Kesehatan Ibu Hamil a. Pelayanan Antenatal Terpadu b. Pelayanan Kelas Ibu Hamil c. Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA) 2. Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas a. Kemitraan Bidan dan Dukun b. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) c. Supervisi Fasilit 3. Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi a. Audit Maternal Perinatal b. Program c. Tanda Bahaya pada Kehamilan d. Surveilans Kematian Ibu

	KS. 14. 03 KS. 14. 04	4. Keluarga Berencana a. Pelayanan KB Pasca Persalinan b. Pelatihan KB Pasca Persalinan 5. Perlindungan Kesehatan Reproduksi a. Pelayanan Kese b. Pelayanan c. Pencegahan da d. Pengarus Utamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBK)
	KS. 14 KS. 14. 00 KS. 14. 01 KS. 14. 02 KS. 14. 03 KS. 14. 04 	c) Kesehatan Anak 1. Kelangsungan Hidup Bayi a. Pelayanan Kesehatan Neonatal b. Manajemen Asfeksia c. Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) d. Pencegahan Infeksi 2. Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah a. Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Dini Interfensi Deteksi Tumbuh Kembang) b. Rujukan Tumbuh Kembang c. Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (ICATT) 3. Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko a. Screening Hypotheroid Congenital b. Surveilance Kesehatan Anak c. Surveilance Kesehatan Bawaan 4. Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja a. Tempat Penanganan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit b. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja c. Usaha Kesehatan Sekolah 5. Perlindungan Kesehatan Anak a. Korban kekerasan terhadap anak b. Anak dengan disabilitas c. Anak terlantar/anak jalanan di panti d. Anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas/Rutan e. Anak kelompok terasing/kelompok minoritas
	KS. 15 KS. 15. 00 KS. 15. 01 KS. 15. 02 KS. 15. 03 	d) Kesehatan Tradisional Alternatif, dan Komplementer 1. Kesehatan Tradisional Keterampilan a. Akupresure b. Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional c. Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Fasyankes d. Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya 2. Kesehatan Tradisional Ramuan a. Health Tourism b. Peningkatan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) c. Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) d. Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional e. Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes 3. Kesehatan Alternatif dan Komplementer a. Akupunktur b. Obat Herbal / Obat Tradisional c. Integrasi Yankestrad d. Pelayanan Alternatif Komplementer lainnya 4. Penapisan dan Kemitraan a. Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T) b. Kelompok c. Penapisan Pengobat Tradisional Asing d. Kemitraan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer e. Pengobat Tradisional (Lokal)

		f. Asosiasi Pengobat Tradisional
	KS. 16 KS. 16. 00 KS. 16. 01	e) Kesehatan Kerja dan Olahraga 1. Pelayanan Kesehatan Kerja a. Penyakit Akibat Kerja b. Pemeriksaan Kesehatan Pekerja c. Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 2. Kapasitas Kerja a. Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif b. Kapasitas Kesehatan Kerja c. TP ASI
	 KS. 17 KS. 17. 00 KS. 17. 01 KS. 17. 02	E. KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 1. Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan, Pengelolaan,Analisis, Pemantauan & Evaluasi) a. Harga Obat Publik 1) Harga Jual Obat Generik 2) Harga Jual Obat Generik Berdagang 3) Harga Eceran Tertinggi pada Label Obat b. Pengadaan Obat 1) Pengadaan Vaksin Reguler 2) Obat Esensial 3) Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, Kabupaten Kota dan Nasional 4. Obat Program Malaria 4) Obat Program Kesehatan Anak 5) Obat Program Kesehatan Ibu 6) Obat Program Gizi 7) Obat Anti Tuberkulosis 8) Obat dan Alat Kesehatan Haji Indonesia 9) Obat Penderita Thalassemia 10) Obat Psikotropika Generik 11) Obat Anti Retro Viral c. Perbekalan Kesehatan 1) Gudang Farmasi 2) Kelengkapan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan 3) Pemusnahan Obat, Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 4) Pengadaan Reagen Screening Darah 5) Obat Buffer Stock 6) Hasil Stock Opname Obat
	KS. 18 KS. 18. 00 KS. 18. 01 KS. 18. 02	2. Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan a. Alat Kesehatan 1) Alat Kesehatan 2) Kopendium Alat Kesehatan 3) Pelabelan Alat Kesehatan Dan PKRT 4) Post Market & Surveillance Alat Kesehatan 5) Produk Alat Kesehatan Elektromedik 6) Produk Alat Kesehatan Non Elektromedik b. Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat 1) Industri Farmasi 2) Pedagang Besar Farmasi 3) Pedagang Eceran Obat 4) Penyalur Alat Kesehatan 5) Toko Alat Kesehatan 6) Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan c. Produk Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 1) Produk Diagnostik In Vitro 2) Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

		3) PKRT Klas III 4) PKRT Klas I dan II 5) Perusahaan Rumah Tangga PKRT 6) Penggunaan Pestisida Di Rumah Tangga 7) Post Market & Surveillance PKRT
	KS. 19 KS. 19. 00 KS. 19. 01 KS. 19. 02 KS. 19. 03 	3. Kefarmasian (Standarisasi, klinis, komunitas dan Obat Tradisional) a. Pelayanan Kefarmasian 1) Visite untuk Apoteker 2) Tanggung Jawab Apoteker terhadap Keselamatan Pasien (Patient Safety) 3) Penulisan Resep b. Farmasi Klinik 1) Pharmaceutical Care untuk Penyakit Artritis Rematik 2) Pharmaceutical Care untuk Penyakit Asma 3) Pharmaceutical Care untuk Penyakit Flu Burung 4) Pharmaceutical Care untuk Penyakit Hati 5) Pharmaceutical Care untuk Penyakit Diabetes Mellitus 6) Pharmaceutical Care untuk Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan 7) Pharmaceutical Care untuk Penyakit Tuberculosis 8) Pharmaceutical Care Lainnya 9) Dispensing Sediaan Steril 10) Pencampuran Obat Suntikan Penanganan Sediaan Sitostatika 11) Pharmaceutical Care untuk Pasien Penyakit Jantung Koroner : Fokus Sindrom c. Farmasi Komunitas 1) Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas 2) Kefarmasian di Rumah (Home Pharmacy Care) 3) Kefarmasian untuk Pasien Pediatri 4) Kefarmasian untuk Penyakit Malaria 5) Farmasi di Rumah Sakit d. Penggunaan Obat Rasional 1) Obat Rasional 2) Informasi Obat 3) Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik 4) Pemantauan Terapi Obat
	KS. 20 KS. 20. 00

		6) Materia Kosmetika Bahan Alam Indonesia
	KS. 20. 02	c. Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan Sediaan Farmasi Khusus 1) Narkotika dan Psikotropika 2) Prekursor Farmasi 3) Sediaan Farmasi Khusus 4) Persetujuan Impor dan Ekspor 5) Pelaksanaan Perizinan Import dan Eksport Narkotika, Psikotropika dan
	KS. 20. 03	d. Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat Indonesian Pharmaceutical Industry Directory
		F. SURAT KETERANGAN, SERTIFIKASI DAN PERIJINAN
	KS. 21	1. Surat Keterangan
	KS. 21. 00	a. Surat Keterangan Special Acces Scheme (SAS)
	KS. 21. 01	b. Surat Keterangan Alat Kesehatan
	KS. 21. 02	c. Sertifikasi Produksi PKRT
	KS. 21. 03	d. Surat Keterangan PKRT
	KS. 22	2. Sertifikasi dan Perijinan
	KS. 22. 00	a. Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan
	KS. 22. 01	b. Sertifikasi Sarana Distribusi Alat Kesehatan
	KS. 22. 02	c. Perijinan Dan Pengawasan Alat Kesehatan
	KS. 22. 03	d. Perijinan Penyalur Alat Kesehatan
	KS. 23	G. PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
	KS. 23. 00	1. Pencegahan, Mitigasi,Kesiapsiagaan a. Pencegahan dan Mitigasi b. Kesiapsiagaan
	KS. 23. 01	2. Tanggap Darurat dan Pemulihan a. Tanggap Darurat b. Pemulihan
	KS. 23. 02	3. Pemantauan dan Informasi a. Pemantauan b. Informasi
	KS. 23. 03	4. Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
	KS. 23. 04	5. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana
	KS. 24	H. PENGEMBANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN
	KS. 24. 00	1. Tersedianya data NHA Setiap Tahun
	KS. 24. 01	2. Tersedianya dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN
	KS. 25	I. INTELIGENSIA KESEHATAN
	KS. 25. 00	1. Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan a. Inteligensia Anak b. Inteligensia Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia
	KS. 25. 01	2. Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan a. Inteligensia Akibat Gangguan Bawaan b. Inteligensia Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem Persyarafan
	KS. 26	J. KESEHATAN HAJI
	KS. 26. 00	1. Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji a. Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji b. Pelayanan Kesehatan jamaah Haji kab/kota c. Rekruitmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) d. Rekruitmen Tenaga Musiman
	KS. 26. 01	2. Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji a. Advokasi dan Kemitraan Pembinaan Kesehatan Haji b. Kesehatan Haji di Kab/kota

		c. Kesehatan Haji Terpadu d. Pemeriksaan Jasa Boga Catering Jemaah Haji
	KS. 27 KS. 27. 00

XIX. URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No.	Kode Klasifikasi P S T	Jenis Dokumen/Arsip
1	*2*	*3*
XIX.	DL	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	DL. 00 DL. 00. 00 DL. 00. 01 DL. 00. 02	A. KEBIJAKAN Kebijakan Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang terdiri dari Pengkajian dan pengusulan kebijakan, Penyiapan Kebijakan, Perumusan Kebijakan, dan Masukan dan Dukungan Kebijakan.seperti; 1. Penyiapan Kebijakan 2. Perumusan Kebijakan 3. Masukan dan Dukungan Kebijakan
	DL. 01 DL. 01. 00 DL. 01. 01 DL. 01. 02 DL. 01. 03 DL. 01. 04 DL. 01. 05	B. PENGEMBANGAN PROGRAM DAN PEMBINAAN DIKLAT 1. Seleksi dan Pengembangan 2. Sertifikasi 3. Monitoring dan Evaluasi 4. Penilaian 5. Konsultasi, advokasi dan asistensi 6. Sistem Informasi
	DL. 02 DL. 02. 00 DL. 02. 01 DL. 02. 02 DL. 02. 03	C. PENYELENGGARAAN DIKLAT 1. Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan 2. Penyelenggaraan 3. Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat 4. Sistem Informasi Diklat
	DL. 03 DL. 03. 00 DL. 03. 01 DL. 03. 02	D. MONITORING DAN EVALUASI 1. Penyelenggara 2. Pasca diklat 3. Data lemabaga diklat
	DL. 04	E. ALUMNI

XX. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No.	Kode Klasifikasi P	S	T	Jenis Dokumen/Arsip
1	*2*			*3*
XX.	PO			KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	PO. 00			A. KEBIJAKAN Kebijakan Pemuda dan Olah Raga meliputi kebijakan dibidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, dan Harmonisasi dan Kemitraan
	PO. 00. 00			1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
	PO. 00. 01			2. Penyiapan Bahan
	PO. 00. 02			3. Perumusan Kebijakan
	PO. 00. 03			4. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan
	PO. 00. 04			5. Penetapan Berbentuk NSPK
				B. PEMBERDAYAAN PEMUDA
	PO. 01			1. Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
	PO. 01. 00			a. Penelusuran (duta kepemudaan) 1) Potensi Lokal (Provinsi) 2) Potensi Nasional 3) Potensi Internasional
	PO. 01. 01			b. Pengkajian (rekomendasi kepemudaan melalui forum kepemudaan) 1) Potensi Lokal (Provinsi) 2) Potensi Nasional 3) Potensi Internasional
	PO. 01. 02			c. Pengembangan 1) Potensi Nasional 2) Potensi Internasional (pertukaran pemuda)
	PO. 02			2. Peningkatan Wawasan Pemuda
	PO. 02. 00			a. Wawasan kebangsaan 1) Program 2) Evaluasi
	PO. 02. 01			b. Wawasan Lingkungan 1) Program 2) Evaluasi
	PO. 02. 02			c. Wawasan Sosial dan Hukum 1) Program 2) Evaluasi
	PO. 03			3. Peningkatan Kapasitas Pemuda
	PO. 03. 00			a. Kapasitas iman dan taqwa 1) Program 2) Evaluasi
	PO. 03. 01			b. Kapasitas Iptek 1) Program 2) Evaluasi
	PO. 03. 02			c. Pemanfaatan Iptek 1) Program 2) Evaluasi
	PO. 04			4. Peningkatan Kreativitas Pemuda
	PO. 04. 00			a. Pengkajian 1) Program 2) Evaluasi

	PO. 04. 01 PO. 04. 02	b. Pengembangan 1) Program 2) Evaluasi c. Pendayagunaan (fasilitasi) 1) Program 2) Evaluasi
		C. PENGEMBANGAN PEMUDA
	PO. 05 PO. 05. 00 PO. 05. 01	1. Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda a. Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan 1) Program 2) Evaluasi b. Kepeloporan pemuda : Kesukarelawanan, pengembangan kepedulian, pendampingan 1) Program 2) Evaluasi
	PO. 06 PO. 06. 00 PO. 06. 01 PO. 06. 02 PO. 07 PO. 07. 00

		D. PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
	PO. 10	1. Pengelolaan Olahraga Pendidikan
	PO. 10. 00	a. Olahraga pendidikan dasar dan menengah
		1) Pengembangan
		2) Evaluasi
	PO. 10. 01	b. Olahraga pendidikan tinggi
		1) Pengembangan
		2) Evaluasi
	PO. 10. 02	c. Olahraga pendidikan nonformal dan informal
		1) Pengembangan
		2) Evaluasi
	PO. 11	2. Pengelolaan Olahraga Rekreasi
	PO. 11. 00	a. Olahraga massal
		1) Pengembangan
		2) Evaluasi
	PO. 11. 01	b. Olahraga tradisional
		1) Pengembangan
		2) Evaluasi
	PO. 11. 02	c. Olahraga petualangan,tantangan dan wisata
		1) Pengembangan
		2) Evaluasi
	PO. 12	3. Pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga
	PO. 12. 00	a. Sentra olahraga
		1) Olahraga pendidikan
		– Pengembangan
		– Evaluasi
		2) Olahraga rekreasi
		– Pengembangan
		– Evaluasi
		3) Olahraga prestasi
		– Pengembangan
		– Evaluasi
	PO. 12. 01	b. Sekolah Khusus Olahraga
		1) Provinsi
		– Pengembangan
		– Evaluasi
		2) Nasional
		– Pengembangan
		– Evaluasi
	PO. 13	4. Pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus
	PO. 13. 00	a. Olahraga tradisional
		1) Lokal
		2) Nasional
	PO. 13. 01	b. Layanan khusus
		1) Olahraga usia dini dan lansia
		2) Olahraga penyandang cacat
	PO. 14	5. Kemitraan dan penghargaan olahraga
	PO. 14. 00	a. Kemitraan keolahragaan
		1) Lintas sektoral
		2) Daerah
		3) Luar Negeri
	PO. 14. 01	b. Penghargaan olahraga
		1) Penelusuran
		2) Penyelenggaraan

		E. PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
	PO. 15	1. Pembibitan dan Iptek olahraga
	PO. 15. 00	a. Pembibitan olahraga
		1) Pemandu bakat
		– Penelusuran bakat
		– Penelaahan bakat
		2) Pengembangan olahragawan berbakat
		– Program
		– Evaluasi
		3) Kompetisi
		– Daerah
		– Nasional
	PO. 15. 01	b. Iptek olahraga
		1) Penerapan
		– Identifikasi dan kajian
		– Pendayagunaan
		– Evaluasi dan diseminasi
		2) Pengembangan
	PO. 16	2. Peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan
	PO. 16. 00	a. Tenaga keolahragaan
		1) Pengembangan pelatih dan instruktur
		– Daerah
		– Nasional
		2) Pengembangan wasit dan juri
		– Daerah
		– Nasional
		3) Pengembangan tenaga pendidik dan pendukung
	PO. 16. 01	b. Organisasi keolahragaan
		1) Pendidikan dan rekreasi
		2) Olahraga prestasi
		– Kelembagaan
		– Sumberdaya
		3) Olahraga fungsional dan professional
	PO. 17	3. Industri dan promosi olahraga
	PO. 17. 00	a. Industri olahraga
		1) Jasa olahraga
		2) Produk olahraga
		3) Manajemen industri olahraga
	PO. 17. 01	b. Promosi olahraga
		1) Penelusuran
		2) Penyelenggaraan
	PO. 18	4. Olahraga prestasi
	PO. 18. 00	a. Daerah
		1) Pengembangan
		2) Pekan dan kejuaraan olahraga
	PO. 18. 01	b. Nasional
		1) Pengembangan
		2) Pekan dan kejuaraan olahraga
	PO. 19	5. Standarisasi dan infrastruktur olahraga
	PO. 19. 00	a. Standarisasi dan infrastruktur
		1) Olahraga prestasi
		2) Olahraga pendidikan dan rekreasi
	PO. 19. 01	b. Akreditasi dan sertifikasi keolahragaan
		1) Olahraga prestasi
		2) Olahraga pendidikan dan rekreasi
	PO. 19. 02	c. Infrastruktur olahraga
		1) Prasarana dan sarana olahraga pendidikan
		2) Prasarana dan sarana olahraga rekreasi
		3) Prasarana dan sarana olahraga prestasi

XXI. URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (ART)

No.	Kode Klasifikasi			Jenis Dokumen/Arsip
	P	S	T	
1	*2*			*3*
XXI.	PR			PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (ART)
	PR. 00 PR. 00. 00 PR. 00. 01 PR. 00. 02			1. Bangunan : a. Pendirian b. Pemeliharaan c. Pembahasan dan penertiban bangunan
	PR. 01 PR. 01. 00 PR. 01. 01 PR. 01. 02			2. Tata Kota : a. RIK (Rencana Induk Kota) b. Rencana detail tata ruang kota c. Rencana terinci kota
	PR. 02 PR. 03 PR. 04 PR. 05 PR. 06 PR. 07 PR. 07. 00 PR. 07. 01 PR. 07. 02 PR. 07. 03			3. Peta tanah bangunan 4. Gambar Konstruksi (blue print) 5. Data industri konstruksi bangunan 6. Studi kelayakan : Studi pendahuluan, studi pra kelayakan dan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) 7. Standarisasi, kriteria tekhnis, spesifikasi, manual tekhnis dan prosedur 8. Pelaksanaan bidang PU a. Pemberian izin bidang PU meliputi : Izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin Pemborong Pembangunan (SIPP), penggunaan pembangunan, pembuatan panggul/ pembuatan panggul tambak pada pinggiran sungai, mendirikan bangunan diatas sungai, pengambilan dan pembangunan air, diatas sungai, pengambilan dan pembuangan air, pembangunan air minum, sumur bor/arteis, proyek, pemanfaatan tanah bantaran, pemanfaatan danpenggunaan jalan dan sejenisnya termasuk persyaratannya serta tata lingkungan. b. Permohonan perizinan yang ditolak c. Keringanan pemberian izin meliputi : permohonan pembebasan atas pemberian keringanan d. Pembatalan izin meliputi : Pengaduan, hasil pemeriksaan/ penijauan, pembebasan, pembatalan dan pelaksanaan bongkaran
	PR. 08 PR. 08. 00 PR. 08. 01 PR. 08. 02			9. Kontraktor dan pemborong (tender, penunjukan, prakualifikasi) a. Daftar rekanan meliputi : Daftar rekanan golongan ekonomi lemah, daftar rekanan mampu dan tanda daftar rekanan. b. Permohonan prakualifikasi dan klasifikasi perusahaan meliputi: Permohonan, persyaratan, hasil penelitian. c. Kasus-kasus dalam pelaksanaan prakualifikasi perusahaan
	PR. 09 PR. 10 PR. 11			10. Konsultasi bangunan 11. Penertiban bangunan meliputi : Penertiban tanpa izin/tidak memenuhi sayat/ketentuan yang berlaku, bangunan yang sudah membahayakan/lapuk, peringatan/ teguran, penyegelan, pengosongan dan pelaksanaanya, kasus-kasus bangunan pengairan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengaturan lalu lintas air. 12. Inventarisasi bangunan kepunyaan dan atau yang dikuasai oleh pemerintah termasuk bukti kepemilikan dan cara perolehanya.

	PR. 12 PR. 12. 00 PR. 12. 01 PR. 12. 02 PR. 12. 03 PR. 12. 04	13. Peta bangunan a. Pembuatan, peta, blue print, pemeliharaan, perbaikan,peningkatan, bangunan pengairan meliputi: waduk, bendungan, bangunan pembagi, saluran dan tanggul b. Pembuatan, pemeliharaan dan rehabilitasi saluran pembangunan air kotor dan limbah c. Inventarisasi bangunan-bangunan pengairan Inventarisasi sungai dan mata air termasuk bukti-bukti kepemilikan d. Pemeliharaan dan pengelolaan pengairan oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A) meliputi : pengumpulan dana pemeliharaan, petunjuk tekhnis, pembinaan dan laporan e. Laporan mengenai kerusakan bangunan pengairan
	PR. 13 PR. 13. 00 PR. 13. 01 PR. 13. 02 PR. 13. 03 PR. 13. 04 PR. 13. 05 PR. 13. 06	14. Lingkungan hidup a. Pembinaan dan penyuluhan lingkungan hidup b. Pengawasan dan pengendalian tata lingkungan hidup c. Pelestarian lingkungan hidup, cagar budaya, taman nasional, flora dan fauna d. Pencemaran dan penanggulangan pencemaran lingkungan e. Penghargaan bidang lingkungan hidup f. Pemberian ijin berburu satwa, ijin galian golongan C dan ijin usaha tambang g. Pembinaan dan penyuluhan lingkungan hidup.
	PR. 14 PR. 14. 00 PR. 14. 01	15. Pelaksanaan dan pengawasan / pengendalian tata lingkungan hidup meliputi : a. Wilayah lingkungan hidup lingkungan industri,rekreasi, pertamanan, kawasan, lingkungan termasuk penertiban kasus b. Pelestarian lingkungan meliputi antara lain : Penetapan sebagai cagar budaya, taman nasional, flora dan fauna.
	PR. 15 PR. 15. 00 PR. 15. 01 PR. 15. 02	16. Pencemaran lingkungan dan penanggulangannya meliputi : a. Pencemaran udara, limbah industri dan kebisingan b. Pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam pemeliharaan c. Pelestarian lingkugan hidup
	PR. 16 PR. 16. 00 PR. 16. 01 PR. 16. 02 PR. 16. 03 PR. 16. 04	17. Pemberian ijin meliputi : a. Ijin berburu satwa yang dilindungi, ijin bahan galian golongan C. b. Data dan statistik lingkungan hidup daerah. c. Hasil-hasil seminar, simposium,lokakarya dan sejenisnya mengenai masalah lingkungan hidup. d. Pengawasan di bidang lingkungan hidup e. Neraca Kependudukan dan Lingkungan hidup Daerah (NKLD)
	PR. 17 PR. 17. 00 PR. 17. 01 PR. 17. 02 PR. 17. 03	18. Amdal meliputi : a. Kebijakan Teknis Amdal b. Pengkajian dan Penilaian Dokumen Amdal c. Evaluasi dan RKL dan RPL d. Penghargaan Adipura

XXII. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No.	Kode Klasifikasi P S T	Jenis Dokumen/Arsip
1	2	*3*
XXII.	PU.	PEKERJAAN UMUM
	PU. 00	1. Standar kebijakan umum bidang PU : Pengairan, jalan, jembatan, bangunan dan tata kota
	PU. 01	2. Pengairan :
	PU. 01. 00	a. Pembangunan baru
	PU. 01. 01	b. Rehabilitasi
	PU. 01. 02	c. Pemeliharaan
	PU. 02	3. Jalan :
	PU. 02. 00	a. Pembangunan baru
	PU. 02. 01	b. Rehabilitasi
	PU. 02. 02	c. Pemeliharaan
	PU. 02. 03	d. Peningkatan
	PU. 03	4. Jembatan :
	PU. 03. 00	a. Pembangunan baru
	PU. 03. 01	b. Rehabilitasi
	PU. 03. 02	c. Pemeliharaan
	PU. 04	5. Bangunan :
	PU. 04. 00	a. Pendirian
	PU. 04. 01	b. Pemeliharaan
	PU. 04. 02	c. Pembahasan dan penertiban bangunan
	PU. 05	6. Tata Kota :
	PU. 05. 00	a. RIK (Rencana Induk Kota)
	PU. 05. 01	b. Rencana detail tata ruang kota
	PU. 05. 02	c. Rencana terinci kota
	PU. 06	7. Peta tanah bangunan
	PU. 07	8. Gambar Konstruksi (blue print)
	PU. 08	9. Data industri konstruksi bangunan
	PU. 09	10. Studi kelayakan : Studi pendahuluan, studi pra kelayakan dan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
	PU. 10	11. Standarisasi, kriteria teknis, spesifikasi, manual teknis dan prosedur
	PU. 11	12. Pelaksanaan bidang PU
	PU. 11. 00	a. Pemberian izin bidang PU meliputi : Izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin Pemborong Pembangunan (SIPP), penggunaan pembangunan, pembuatan panggul/ pembuatan panggul tambak pada pinggiran sungai, mendirikan bangunan diatas sungai, pengambilan dan pembangunan air, diatas sungai, pengambilan dan pembuangan air, pembangunan air minum, sum ur bor/arteis, proyek, pemanfaatan tanah bantaran, pemanfaatan danpenggunaan jalan dan sejenisnya termasuk persyaratannya serta tata lingkungan.
	PU. 11. 01	b. Permohonan perizinan yang ditolak
	PU. 11. 02	c. Keringanan pemberian izin meliputi : permohonan pembebasan atas pemberian keringanan
	PU. 11. 03	d. Pembatalan izin meliputi : Pengaduan, hasil pemeriksaan/penijauan, pembebasan, pembatalan dan pelaksanaan bongkaran
	PU. 12	13. Kontraktor dan pemborong (tender, penunjukan, prakualifikasi)
	PU. 12. 00	a. Daftar rekanan meliputi : Daftar rekanan golongan ekonomi lemah, daftar rekanan mampu dan tanda daftar rekanan.
	PU. 12. 01	b. Permohonan prakualifikasi dan klasifikasi perusahaan meliputi : Permohonan, persyaratan, hasil penelitian.
	PU. 12. 02	c. Kasus-kasus dalam pelaksanaan prakualifikasi perusahaan
	PU. 13	14. Konsultasi bangunan

	PU. 14	15. Penertiban bangunan meliputi : Penertiban tanpa izin/tidak memenuhi sayat/ketentuan yang berlaku, bangunan yang sudah membahayakan/lapuk, peringatan/ teguran, penyegelan, pengosongan dan pelaksanaanya, kasus-kasus bangunan pengairan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengaturan lalu lintas air.
	PU. 15	16. Inventarisasi bangunan kepunyaan dan atau yang dikuasai oleh pemerintah termasuk bukti kepemilikan dan cara perolehanya
	PU. 16	17. Peta bangunan
	PU. 16. 00	a. Pembuatan, peta, blue print, pemeliharaan, perbaikan,peningkatan, bangunan pengairan meliputi: waduk, bendungan, bangunan pembagi, saluran dan tanggul
	PU. 16. 01	b. Pembuatan, pemeliharaan dan rehabilitasi saluran pembangunan air kotor dan limbah
	PU. 16. 02	c. Inventarisasi bangunan-bangunan pengairan Inventarisasi sungai dan mata air termasuk bukti-bukti kepemilikan.
	PU. 16. 03	d. Pemeliharaan dan pengelolaan pengairan oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A) Meliputi : pengumpulan dana pemeliharaan, petunjuk tekhnis, pembinaan dan laporan
	PU. 16. 04	e. Laporan mengenai kerusakan bangunan pengairan
	PU. 17	18. Pengelolaan air minum
	PU. 17. 00	a. Penyediaan fasilitas air bersih
	PU. 17. 01	b. Distribusi pemakaian air bersih
	PU. 17. 02	c. Pengawasan penggunaan air besih
	PU. 17. 03	d. Data dan statisktik air bersih
	PU. 18	19. Pengelolaan Jalan
	PU. 18. 00	a. Pemeliharaan dan perbaikan jalan
	PU. 18. 01	b. Penyediaan lokasi/area jalan
	PU. 18. 02	c. Pelebaran dan pemindahan jalan
	PU. 18. 03	d. Inventarisasi jalan
	PU. 18. 04	e. Data lalu lintas dan penggunaan jalan
	PU. 18. 05	f. Laporan penelitian jalan
	PU. 18. 06	g. Laporan kerusakan jalan

XXIII. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

No.	Kode Klasifikasi P	S	T	Jenis Dokumen/Arsip
1	2			*3*
XXIII.	PD			PEMERINTAHAN DAERAH
	PD. 00			A. KEBIJAKAN Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Politik Dalam Negeri, Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Bina Pembangunan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Keuangan Daerah.
	PD. 00. 00			1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
	PD. 00. 01			2. Penyiapan Kebijakan
	PD. 00. 02			3. Perumusan Kebijakan
	PD. 00. 03			4. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)
	PD. 00. 04			5. MOU
	BL			B. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	BL. 00			1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
	BL. 00. 00			a. Ketahanan Ideologi Negara 1) Penguatan Ideologi Negara 2) Implementasi Ideologi Negara
	BL. 00. 01			b. Wawasan Kebangsaan 1) Penguatan Kebangsaan 2) Pembinaan dan Sosialisasi 3) Implementasi
	BL. 00. 02			c. Bela Negara 1) Pendidikan Bela Negara 2) Pemberdayaan Bela Negara
	BL. 00. 03			d. Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan 1) Penguatan Nilai-Nilai Sejarah 2) Implementasi Nilai-Nilai Sejarah 3) Penerbitan Rekomendasi Penelitian
	BL. 00. 04			e. Pembauran dan Kewarganegaraan 1) Pembinaan Pembauran Kebangsaan 2) Pembinaan Kewarganegaraan
	BL. 01			2. Kewaspadaan Nasional
	BL. 01. 00			a. Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
	BL. 01. 01			b. Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
	BL. 01. 02			c. Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
	BL. 01. 03			d. Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial 1) Pedoman Kewaspadaan Nasional
	BL. 01. 04			e. Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing 1) Pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing 2) Surat pemberitahuan penelitian orang asing
	BL. 02			3. Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan
	BL. 02. 00			a. Ketahanan Seni 1) Fasilitasi pelaksanaan pelestarian kesenian 2) Pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kesenian
	BL. 02. 01			b. Ketahanan Budaya 1) Fasilitasi pelaksanaan pelestarian budaya 2) Pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kebudayaan
	BL. 02. 02			c. Agama dan Kepercayaan 1) Fasilitasi

		2) Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten/Kota 3) Pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan 4) Pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan
	BL. 02. 03	d. Organisasi Kemasyarakatan 1) Pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat a) Pendaftaran ormas b) Database ormas 2) Laporan hasil kerjasama kegiatan dengan Ormas/LNL 3) Evaluasi aktifitas Ormas : sanksi administrasi 4) Fasilitasi sengketa Ormas 5) Fasilitasi Ormas
	BL. 02. 04	e. Masalah Sosial Kemasyarakatan 1) Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika 2) Masalah sosial kemasyarakatan
	BL. 03	4. Politik Dalam Negeri
	BL. 03. 00	a. Implementasi Kebijakan Politik 1) Implementasi Kebijakan Politik a) Sosialisasi dan publikasi best practice dan inovasi 2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
	BL. 03. 01	b. Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan 1) Evaluasi Kelembagaan Politik Pemerintahan di Pusat a) Pendampingan kunjungan kerja DPR RI 2) Evaluasi Kelembagaan Politik Pemerintahan di Daerah a) Orientasi Anggota DPRD Provinsi
	BL. 03. 02	c. Fasilitasi Kelembagaan Partai Politiik 1) Verifikasi dan evaluasi partai politik yang memperoleh kursi 2) Partai Politik yang tidak memperoleh kursi 3) Pemerintah Daerah 4) Database Parpol
	BL. 03. 03	d. Pendidikan Budaya Politik 1) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik 2) Penyelenggaraan pendidikan budaya politik 3) Modul sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan
	BL. 03. 04	e. Pemilihan Umum
	BL. 04	5. Ketahanan Ekonomi
	BL. 04. 00	a. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian 1) Fasilitasi ketahanan di bidang sumber daya alam a) Sosialisasi dan publikasi best practice dan inovasi 2) Penanganan kesenjangan ekonomi
	BL. 04. 01	b. Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter 1) Failitasi identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi fiskal dan moneter 2) Penyiapan Bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi
	BL. 04. 02	c. Perilaku Perekonomian Masyarakat 1) Pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian 2) Evaluasi cinta produk dalam negeri dan perlindungan konsumen
	BL. 04. 03	d. Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi 1) Evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama penanganan kejahatan lembaga perekonomian 2) Evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian

	TM	C. PEMERINTAHAN UMUM
	TM. 00	1. Dekonsentrasi dan Kerjasama
	TM. 00. 00	a. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
	TM. 00. 01	b. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
	TM. 00. 02	c. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan evaluasi Kerjasama Daerah
	TM. 00. 03	d. Fasilitasi Kecamatan 1) Fasilitasi (database pembentukan Kecamatan) 2) Koordinasi 3) Pembinaan dan pengawasan 4) Monitoring dan evaluasi (evaluasi kinerja kecamatan)
	TM. 00. 04	e. Fasilitasi Pelayanan Umum 1) Fasilitasi pelayanan administrasi Kecamatan 2) Koordinasi pelayanan administrasi Kecamatan 3) Pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi Kecamatan 4) Monitoring dan evaluasi
	TM. 01	2. Wilayah Administrasi dan Perbatasan
	TM. 01. 00	a. Toponimi dan Data Wilayah 1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan toponimi 2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembakuan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan 3) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi perubahan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan 4) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan ibu kota daerah dan pemindahan pusat pemerintahan daerah 5) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan 6) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penghitungan luas wilayah
	TM. 01. 01	b. Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara 1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum pemerintahan di wilayah perbatasan Negara 2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan di daerah dan kerjasama internasional antar perbatasan
	TM. 01. 02	c. Batas Antar Daerah Wilayah 1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penetapan batas antar daerah 2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa batas antar daerah

	TM. 02 TM. 02. 00 TM. 02. 01 TM. 02. 02 TM. 02. 03 TM. 02. 04	3. Kawasan dan Pertanahan a. Kawasan Sumber Daya Alam 1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumber daya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian, dan lingkungan b. Kawasan Sumber Daya Buatan 1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perhubungan darat, laut, dan udara c. Kawasan Ekonomi,Industri dan Perdagangan Bebas 1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan ekonomi, industri, dan perdagangan bebas d. Pertanahan dan Kawasan Khusus 1) Penyelenggaraan urusan pertanahan 2) Penyelesaian sengketa pertanahan 3) Evaluasi penataan kawasan khusus e. Kawasan perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan 1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan 2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan
	OD OD. 00 OD. 00. 00 OD. 01	D. OTONOMI DAERAH 1. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah a. Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi 1) Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 2) Penyusunan standar pelayanan minimal 2. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
	OD. 02 OD. 02. 00 OD. 02. 01 OD. 02. 02 OD. 02. 03 OD. 02. 04	3. Fasilitasi, Monitoring, dan EvaluasiKepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga a. Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah b. Administrasi Kepala Daerah dan DPRD c. Penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di bidang Pemerintahan d. Hubungan antar lembaga daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD) e. Asosiasi Daerah
	OD. 03 OD. 03. 00 OD. 03. 01 OD. 03. 02	4. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah a. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah b. Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah c. Pengembangan Kapasitas Daerah

	BP	E. BINA PEMBANGUNAN DAERAH
	BP. 00	1. Perencanaan Pembangunan Daerah/ Per Wilayah
	BP. 01	2. Pengembangan Wilayah
	BP. 01. 00	a. Penyusunan pedoman penyerasian pengembangan wilayah
	BP. 01. 01	b. Penyusunan dan pemutakhiran basis data dan informasi pengembangan
	BP. 01. 02	c. Penyusunan dan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan
	BP. 01. 03	d. Kawasan Strategis dan Andalan 1) Evaluasi pengembangan data 2) Pengembangan kawasan strategis dan andalan
	BP. 01. 04	e. Wilayah Tertinggal 1) Penyusunan data dan pemutakhiran basis dan data informasi pengembangan wilayah tertinggal 2) Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal
	BP. 01. 05	f. Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pullau Kecil 1) Penyusunan masterplan dan evaluasi pelaksanaan kebijakaj pengembangan wilayah tertinggal 2) Penyusunan dan pemutakhiran basis data dan informas pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
	BP. 02	3. Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
	BP. 02. 00	a. Evaluasi perencanaan, pemanfaatan tata ruang wilayah 1) Evaluasi perencanaan, pemanfaatan tata ruang wilayah 2) Evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian tata ruang wilayah 3) Implementasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
	BP. 02. 01	b. Penataan Ruang Kawasan 1) Evaluasi tata ruang 2) Pembinaan tata ruang kawasan 3) Implementasi
	BP. 02. 02	c. Konservasi dan Rehabilitasi 1) Evaluasi pelaksanaan konservasi 2) Evaluasi pelaksanaan rehabilitasi 3) Implementasi
	BP. 02. 03	d. Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air 1) Evaluasi pengembangan potensi sumber daya air 2) Evaluasi pemanfaatan sumber daya air 3) Implementasi
	BP. 02. 04	e. Pengendalian Lingkungan Hidup 1) Pengembangan instrumen kelembagaan lingkungan hidup 2) Analisis dan audit pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
	BP. 03	4. Pengembangan Ekonomi Daerah
	BP. 03. 00	a. Pengembangan potensi Ekonomi Daerah 1) Identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah 2) Pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah
	BP. 03. 01	b. Promosi dan Investasi Daerah 1) Pelaksanaan promosi ekonomi daerah 2) Pelaksanaan investasi daerah
	BP. 03. 02	c. Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah 1) Pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah 2) Pelaksanaan perindustrian daerah
	BP. 03. 03	d. Kemitraan Usaha 1) Perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah 2) Pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah

	BP. 03. 04	e. Kelembagaan Ekonomi Daerah 1) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah 2) Penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah
	BP. 04 BP. 04. 00 BP. 04. 01 BP. 04. 02	5. Penataan Perkotaan a. Perencanaan Pengendaliajn Perkotaan 1) Evaluasi perencanaan perkotaan 2) Pengendalian penataan perkotaan 3) Fasilitasi b. Penataan Kota Besar dan Metropolitan, Kota Menengah, dan Kota Kecil 1) Pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan 2) Pengendalaian Pelaksanaan Pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan Perkotaan 3) Fasilitasi c. Kerjasama Perkotaan 1) Pengendalian kerjasama perkotaan antar Negara 2) Pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan Perkotaan Fasilitasi
	MD MD. 00 MD. 00. 00 MD. 00. 01 MD. 00. 02 MD. 00. 03 MD. 00. 04	F. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan a. Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan 1) Pelaksanaan Pengembangan Desa 2) Pelaksanaan Pengembangan Kelurahan b. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 1) Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 2) Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan c. Fasilitasi Permusyawaratan Desa 1) Pelaksanaan Penataan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa 2) Pelaksanaan Penataan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 1) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa 2) Pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa e. Pengembangan Kapasitas Desa 1) Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, dan 2) Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat
	MD. 01 MD. 01. 00 MD. 01. 01 MD. 01. 02 MD. 01. 03	2. Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat a. Lembaga Masyarakat 1) Pembinaan Penataan Lembaga Masyarakat di Desa 2) Pelaksanaan Kerjasama Lembaga Masyarakat b. Pembangunan Partisipatif 1) Pelaksanaan Pengembangan Metode Pembangunan Partisipatif 2) Pelaporan Kinerja Pembangunan Desa c. Pendataan Potensi Masyarakat 1) Inventarisasi Potensi Masyarakat a) Profil desa 2) Evaluasi Perkembangan Masyarakat d. Pengembangan Kawasan Pedesaan 1) Pelaksanaan Identifikasi dan Analisa Penataan Ruang Kawasan 2) Pelaksanaan Penataan Pengembangan Terpadu Kawasan Pedesaan

	MD. 01. 04	e. Pelatihan Masyarakat 1) Pelaksanaan Penyusunan dan Pengembangan a) Grand design pelatihan masyarakat b) Pedoman pelatihan masyarakat c) Fasilitasi d) Monitoring dan evaluasi 2) Evaluasi Pelatihan Masyarakat a) Penyelenggaraan pelatihan b) Monitoring dan evaluasi
	MD. 02 MD. 02. 00 MD. 02. 01 MD. 02. 02 MD. 02. 03 MD. 02. 04	3. Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a. Budaya Nusantara 1) Pelaksanan Pemberdayaan Masyarakat 2) Pelaksanaan Kerjasama Adat Istiadat b. Pemberdayaan Perempuan 1) Pelaksanaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan 2) Pembinaan, Perlindungan hak-hak perempuan dan ketidak setaraan gender c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 1) Pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga 2) Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga d. Kesejahteraan Sosial 1) Pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Sosial 2) Pelaksanaan Penanganan Masalah Sosial e. Tenaga Kerja Pedesaan 1) Fasilitasi dan Evaluasi Pembinaan dan Pembinaan Tenaga Kerja 2) Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja
	MD. 03 MD. 03. 00 MD. 03. 01 MD. 03. 02 MD. 03. 03	4. Usaha Ekonomi Masyarakat a. Usaha Pertanian dan Pangan 1) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pertanian, Agribisnis dan Lumbung Pangan a) Identifikasi data pertanian b) Fasilitasi c) Monitoring dan evaluasi b. Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam 1) Pelaksanaan Peningkatan Kerjasama dan Permodalan Usaha Perkredritan dan Simpan Pinjam a) Inventarisasi lembaga keuangan mikro yang belum berbadan hukum b) Inventarisasi dan pemetaan potensi desa c) Inventarisasi badan usaha milik desa d) Usaha ekonomi desa simpan pinjam e) Fasilitasi pembinaan, pendampingan dan pengawasan f) Monitoring dan evaluasi c. Produksi dan Pemasaran 1) Pelaksanaan pengembangan informasi pasar a) identifikasi produk unggulan pedesaan b) fasilitasi c) monitoring dan evaluasi 2) Pelaksanaan Difersifikasi Pasar a) fasilitasi pengelolaan pasar desa b) fasilitasi sarana dan prasarana desa c) sistem penilaian kinerja pasar desa/lomba pasar desa d) monitoring dan evaluasi desa e) data pasar desa d. Usaha Ekonomi dan Keluarga 1) Pelaksanaan peningkatan kewirausahaan dan perkoperasian a) fasilitasi pengembanganusaha ekonomi keluarga

		b) monitoring dan evaluasi 2) Pelaksanaan Pengembangan Usaha Jasa dan Industri Kecil a) Penyusunan modul b) Fasilitasi c) Monitoring dan evaluasi.
	MD. 03. 04	e. Ekonomi Pedesaan dan Masyarakat Tertinggal 1) Ekonomi Pedesaan a) identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi b) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi pedesaan c) monitoring dan evaluasi 2) Masyarakat Tertinggal a) identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal b) fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal c) monitoring dan evaluasi
	MD. 04 MD. 04. 00 MD. 04. 01 MD. 04. 02 MD. 04. 03 MD. 04. 04	5. Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pedesaan a. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan 1) Pembinaan pengelolaan konservasi kawasan 2) Pelaksanaan Rehabilitasi lingkungan b. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan 1) Pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya lahan pedesaan 2) Pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya pesisir pedesaan c. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan 1) Pembinaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan 2) Pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana pemukiman d. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi pedesaan 1) Pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi pedesaan 2) Pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi pedesaan e. Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan 1) Pelaksanaan pemasyarakatan teknologi pedesaan 2) Pelaksanaan kerjasama pengelolaan teknologi pedesaan
	DC DC. 00 DC. 00. 00 DC. 00. 01 DC. 00. 02	G. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1. Pendaftaran Penduduk a. Identitas Penduduk 1) Fasilitasi pelaksanaan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk 2) Penyiapan pemberian nomor kendali kartu keluarga dan kartu tanda penduduk 3) Fasilitasi pencetakan dan distribusi blanko dokumen kependudukan b. Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah NKRI 1) Fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk wni 2) Fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk orang asing 3) Fasilitasi pelaksanaan perubahan alamat c. Pindah Datang Penduduk Antar Negara 1) Fasilitasi pelalsanaan pendaftaran perpindahan penduduk indonesia ke luar negeri dan wni dari luar negeri 2) Fasilitasi pelaksanaan perubahan alamat

	DC. 00. 03 DC. 00. 04	d. Pendataan Penduduk Rentan 1) Fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana 2) Fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk daerah terbelakang 3) Pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan e. Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi 1) Pelaksanaan program pendaftaran pendudukan 2) Pelaksanaan program pendaftaran penduduk 3) Pelaksanaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk
	DC. 01 DC. 01. 00 DC. 01. 01 DC. 01. 02 DC. 01. 03 DC. 01. 04	2. Pencatatan Sipil a. Kelahiran dan Kematian 1) Fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran 2) Fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian 3) Fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian 4) Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pencatatan kelahiran dan kematian b. Perkawinan dan Perceraian 1) Fasilitasim pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian islam 2) Fasilitasim pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama non islam 3) Pencatatan perkawinan dan perceraian 4) Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pencatatan perkawinan dan perceraian c. Pengangangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta 1) Pelayanan perubahan dan pembatalan akta 2) Pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan pembatalan akta 3) Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta d. Pencatatan Kewarganegaraan 1) Pelaksanaan pelayanan pencatatan kewarganegaraan akibat kelahiran 2) Pelaksanaan pelayanan pencatatan kewarganegaraan akibat non kelahiran 3) Kelahiran 4) Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pengangkatan pelayanan pencatatan kewarganegaraan e. Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi 1) Penyusunan program dan kegiatan direktorat pencatatan sipil 2) Monitoring pelaksanaan program pencatatan sipil 3) Evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil 4) Pelaksanaan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil
	DC. 02 DC. 02. 00 DC. 02. 01	3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 1) Perencanaan pengembangan sistem informasi kependudukan 2) Pengembangan aplikasi 3) Pengembangan pemanfaatan infrastruktur b. Kelembagan informasi administrasi kependudukan 1) Pengembangan sistem kelembagaan 2) Pengembangan sumber daya manusia

		3) Kelembagaan informasi kependudukan
	DC. 02. 02	c. Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan 1) Pengelolaan data administrasi kependudukan 2) Pemeliharaan database administrasi kependudukan 3) Pengembangan database administrasi kependudukan 4) Pelayanan pengelolaan data administrasi kependudukan
	DC. 02. 03	d. Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan 1) Penyajian informasi administrasi kependudukan 2) Pelaksanaan pelayanan informasi melalui media elektronik 3) Pelaksanaan layanan informasi melalui media cetak
	DC. 02. 04	e. Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi 1) Pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan jalur luar sekolah 2) Kebijakan kependudukan dan pengembangan wawasan kependudukan 3) Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan 4) Pelaksanaan dokumentasi pelayanan informasi kependudukan
	DC. 03	4. Pengembangan Kebijakan Kependudukan
	DC. 03. 00	a. Kuantitas Penduduk 1) Pelaksanaan penyusunan analis jumlah, struktur dan komposisi penduduk 2) Pelaksanaan nalisis pertumbuhan penduduk 3) Kebijakan kuantitas penduduk
	DC. 03. 01	b. Kualitas Penduduk 1) Pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia anak, remaja dan pemuda 2) Pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia produktif dan lanjut usia 3) Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka kebijakan kualitas penduduk
	DC. 03. 02	c. Mobilitas Penduduk 1) Pelaksanaan penataan persebaran penduduk antar wilayah 2) Pelaksanaan penataan urbanisasi dan migrasi non permanen 3) Kebijakan mobilitas penduduk
	DC. 03. 03	d. Proyeksi Penduduk 1) Pelaksanaan Analisis Proyeksi Penduduk 2) Pelaksanaan Penyusunan Proyeksi Penduduk 3) Pelaksanaan Perumusan Implikasi Proyeksi Penduduk 4) Penyusunan Penetapan dan Perumusan Implikasi Proyeksi Penduduk
	DC. 03. 04	e. Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga
	KD.	H. KEUANGAN DAERAH
	KD. 00	1. Anggaran Daerah
	KD. 00. 00	a. Anggaran Daerah Wilayah I, II, III, dan IV 1) Fasilitasi anggaran daerah antara lain : konsultasi, narasumber, bimbingan teknis 2) Evaluasi rancangan Perda, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan anggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten 3) Monitoring

	KD. 00. 01	b. Dukungan Teknis Anggaran Daerah 1) Penyiapan bahaj perumusan sinkronisasi kebijakan anggaran daerah 2) Penyusunan tatalaksana anggaran daerah 3) Penyiapan dukunga teknis anggaran daerah 4) Penyiapan data, informasi dan penyusunan laporan keuangan daerah
	KD. 01 KD. 01. 00	2. Pendapatan dan Investasi Daerah a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standarisasi pajak daerah dan retribusi daerah 2) Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah retribusi daerah 3) Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah 4) Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak retribusi daerah
	KD. 01. 01	b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 1) Fasilitasi serta bimbinga teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan 2) Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang BUMD lembaga non keuangan 3) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi BUMD
	KD. 01. 02	c. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 1) Standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang polla pengelolaan keuangan BLU Daerah 2) Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan BLU Daerah 3) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan daerah BLU Daerah
	KD. 01. 03	d. Pengelolaan Kekayaan Daerah 1) Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan 2) Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah 3) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaankekayaan dan investasi daerah
	KD. 01. 04	e. Pinjam dan Obligasi Daerah 1) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan atau BUMD 2) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah 3) Fasilitasi pelaksanaan kebijkan dana bergulir yang bersumber dari APBN 4) Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah 5) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah
	KD. 02 KD. 02. 00	3. Fasilitasi Dana Perimbangan a. Fasilitasi Dana Alokasi Umum 1) Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum 2) Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum 3) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum
	KD. 02. 01	b. Fasilitasi Dana Alokasi Khusus 1) Koordinasi penyiapan data dasar 2) Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus 3) Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus

	KD. 02. 02	c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam 1) Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam 2) Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam 3) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam
	KD. 02. 03	d. Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya 1) Sosialisasi dan Supervisi dana otonomi khusus 2) Soaialisasi dan supervisi dan transfer lainnya 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonoi khusus dan dana transfer lainnya
	KD. 02. 04	e. Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan 1) Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan 2) Penyiapan dukungah teknis dana perimbangan 3) Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan
	KD. 03	4. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah
	KD. 03. 00	a. Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 1) Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah 2) Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
	KD. 03. 01	b. Pembinaan kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah 2) Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
	KD. 03. 02	c. Pembinaan dan Evaluasi pengelolaan Keuangan Daerah 1) Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah 2) Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
	KD. 03. 03	d. Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli 1) Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah 2) Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
	KD. 03. 04	e. Data Informasi dan Pengelolaan keuangan Daerah 1) Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah 2) Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah 3) Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

	SP.	I. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	SP. 00	1. Perlindungan Masyarakat
	SP. 01	a. Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
	SP. 01. 00	1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaantata operasional Polisi Pamomg Praja
	SP. 01. 01	2) Standarisasi sarana prasarana Polisi Pamong Praja a) Fasilitasi (data pengajuan DAK) b) Koordinasi c) Pembinaan dan pengawasan d) Monitoring dan evaluasi e) Laporan
	SP. 02	b. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
	SP. 02. 00	1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyusunan program peningkatan kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja
	SP. 02. 01	2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan evaluasi peningkatan kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja
	SP. 03	c. Perlindungan Masyarakat
	SP. 03. 00	1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat
	SP. 03. 01	2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparatur dan kelembagaan perlindungan masyarakat
	SP. 03. 02	3) Fasilitasi, koordinasi, pendataan dan pembinaan anggota Linmas
	SP. 03. 03	4) Fasilitasi penegakan Perda
	SP. 04	d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	SP. 04. 00	1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil
	SP. 04. 01	2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi administras aparatur penyidik pegawai negeri sipil
	SP. 05	e. Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia
	SP. 05. 00	1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia
	SP. 05. 01	2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi konvensi internasional
	SP. 06	2. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
	SP. 06. 00	a. Identifikasi Potensi Bencana 1) Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan Bencana dan Mitigasi Bencana
	SP. 06. 01	b. Organisasi Sistem dan Prosedur 1) Pengembangan Kerjasama Kelembagaan Serta Penanggulangan Bencana a) Fasilitasi (database daerah rawan bencana) b) Koordinasi c) Fasilitasi serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana
	SP. 06. 02	c. Sarana dan Prasarana 1) Evaluasi standardisasi aplikasi peralatan pemyelenggaraan penanggulangan bencana 2) Evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana
	SP. 06. 03	d. Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran

		1) Evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat di bidang pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran 2) Evaluasi peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran
	SP. 06. 04	e. Keamanan 1) Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan, pencegahan, dan penanggulangan gangguan / ancaman keamanan / ketertiban 2) Tata cara penanggulangan gangguan keamanan 3) Laporan mengenai situasi keamanan
	SP. 06. 05	f. Ketertiban 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum 2) Operasi penanggulangan / pencegahan adanya gangguan / ancaman ketentraman dan ketertiban umum 3) Tata cara tentang penyelenggaraan rapat umum, seminar, muktamar, dan kongres
	SP. 07	3. Pertahanan Sipil
	SP. 07. 00	a. Pengangkatan dan pemberhentian anggotan hansip dan linmas
	SP. 07. 01	b. Pembinaan pengembangan potensi hansip / linmas
	SP. 07. 02	c. Bimbingan dan pengarahan tenaga hansip / linmas
	SP. 07. 03	d. Laporan umum pelaksanaan tugas hansip / linmas
	SP. 07. 04	e. Penghargaan terhadap anggota hansip / linmas
	SP. 08	4. Kenakalan Remaja
	SP. 08. 00	a. Pembinaan anak remaja
	SP. 08. 01	b. Penanggulangan kenakalan remaja
	SP. 08. 02	c. Laporan tentang penanggulangan kenakalan remaja
	SP. 09	5. Pornografi, Pornoaksi, dan Tuna Susila
	SP. 09. 00	a. Pembinaan dan penyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan pornografi pornoaksi dan tuna susila
	SP. 09. 01	b. Pencegahan dan penanggulangan pornografi pornoaksi dan tuna susila
	SP. 09. 02	c. Laporan tentang Pencegahan dan penanggulangan pornografi pornoaksi dan tuna susila
	SP. 10	6. Pemadam Kebakaran
	SP. 10. 00	a. Penyusunan perencanaan kegiatan
	SP. 10. 01	b. Pengumpulan, pengolahan, penganalisaa, dan penyajian data
	SP. 10. 02	c. Penyusunan petunjuk teknis
	SP. 10. 03	d. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan
	SP. 10. 04	e. Pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat
	SP. 10. 05	f. Fasilitasi penanggulanganbencana
	SP. 10. 06	g. Kerjasama dengan satuan kerja , unit kerja, dan instansi terkait
	SP. 10. 07	h. Pemantauan, pencegahan, dan penanggulangan bencana
	PH.	J. PENDAPATAN DAERAH
	PH. 00	1. Pendapatan
	PH. 00. 00	a. Pendapatan Asli Daerah 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah 2) Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah antara lain : – Pajak kendaraan bermotor (PKB) – Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – Pajak Air Permukaan – Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – Pajak Rokok
	PH. 00. 01	b. Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan : 1) Laporan Pembayaran Royalty dan iuran tetap dari:

		a) Izin Usaha Pertambangan (IUP) b) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan (PKP2B)
	PH. 00. 02	c. Dokumen Penerimaan Lain-lain Perimbangan yang sah 1) Laporan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Jasa Raharja 2) Laporan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Dealer
	SR.	K. SEKRETARIAT DPRD
	SR. 00	1. Penyusunan rencana kerja tahunan
	SR. 01	2. Data keanggotaan DPRD meliputi unsur pimpinan dewan, komisi dewan dan fraksi dewan
	SR. 02	3. Data proses penggantian antar waktu anggota DPRD
	SR. 03	4. Kumpulan produk - produk DPRD
	SR. 04	5. Laporan - laporan insidentil
	SR. 05	6. Laporan tahunan
	SR. 06	7. Persidangan / Rapat (Paripurna / Pleno Komisi / Fraksi lainnya)
	SR. 07	8. Kegiatan Badan Perlengkapan Dewan (seperti Badan Kehormatan, Tim Kerja dan Perlengkapan Dewan)
	SR. 08	9. Tata tertib DPRD
	KR.	L. Kesejahteraan Rakyat (Agama)
	KR. 00	1. Kebijakan keagamaan meliputi kebijakan di bidang Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik,Bimas Hindu, Bimas Budha, Kerukunan Umat Beragama, dan penyelenggaraan Haji dan Umroh.
	KR. 00. 00	a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
	KR. 00. 01	b. Penyiapan Kebijakan
	KR. 00. 02	c. Perumusan dan penyusunan bahan
	KR. 00. 03	d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan.
	KR. 00. 04	e. Penetapan dalam Bentuk Norma Standar Prosedur dan Kriteria
	KR. 01	2. Bimbingan Masyarakat Islam
	KR. 01. 00	a. Wakaf 1) Permohonan Izin tukar menukar Tanah Wakaf (Ruislah) 2) Permohonan penunjukan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Uang Wakaf 3) Bantuan Pengembangan Wakaf Produktif 4) Bantuan Sertifikasi Tanah Wakaf 5) Pendataan Wakaf 6) Akta Ikrar Wakaf 7) Formulir Wakaf 8) Surat Pengesahan Nadzir Wakaf
	KR. 01. 01	b. Zakat 1) Bimbingan dan pembinaan Lembaga Zakat 2) Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat
	KR. 01. 02	c. Rumah Ibadah 1) Bantuan pengelola rumah ibadah 2) Penyuluhan dan Bimbingan Kemasjidan 3) sertifikat Aset-aset Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR